

Abstrak

SEMINAR NASIONAL II

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk
Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia”

Padang, 28-29 September 2016



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Sekretariat : Fisip Unand Kampus Limau Manis Padang , Tlp (0751) 71266

Website: <http://fisip.unand.ac.id>, e-mail : semnas2fisip@gmail.com

Abstrak

SEMINAR NASIONAL II
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora
Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Copyright @ 2016

1-123 halaman, 21 x 29 cm

ISBN: 978-602-71540-6-3

Penyunting

Andri Rusta

Sadri

Zulfadli

Lay Out

Binuang Sati.

Diterbitkan oleh:

Gedung Dekanat, FISIP Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang

Telp/faks. 0751-71266

Website: <http://fisip.unand.ac.id>

email: semnas2fisip@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA	11
RUNDOWN ACARA	13
JADWAL PRESENTASI SESI PARALEL	15
PELAYANAN PUBLIK	27
☞ PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA: STUDI PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT <i>Fernandes Simangunsong</i>	29
☞ STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN <i>PUBLIC SERVICE 21ST</i> PERSPEKTIF <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA <i>Andi Pitono, Ismail Nurdin</i>	29
☞ ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS <i>Roza Liesmana</i>	30
☞ <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL</i> BIROKRASI DI INDONESIA: PERBEDAAN <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION</i> PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU <i>Wayu Eko Yudiatmaja, Tri Samnuzulsari</i>	31
☞ TINJUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT <i>Kusdarini</i>	31
☞ ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG: STUDI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL TRANS PADANG <i>Edo Oksudi, Aldri Frinadi</i>	33
☞ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENKOMUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER <i>Abdullah, Ady Muzwardi, Arif Rahman Majid</i>	33
☞ INNOVATION OF PUBLIC SERVICES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY <i>Anne Friday Safaria</i>	34
☞ STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR: SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH <i>Ria Ariany</i>	34
☞ PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL PARA PEJABAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI <i>Hamirul</i>	35



☞ OPTIMALISASI FUNGSI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT <i>Malse Yulivestra</i>	36
MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH	37
☞ PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: SINERGI NILAI-NALAI ADAT DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT <i>Hasbullah Malau</i>	40
☞ HUTAN, MASYARAKAT, DAN EKOWISATA: INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN DAN PERANNYA DALAM KONSERVASI HUTAN DI SEKITAR OBJEK WISATA ALAM DI PULAU LOMBOK <i>Rubangi Al Hasan, Yumantoko</i>	40
☞ BANK SYARIAH DALAM AKULTURASI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI <i>Johannes Ibrahim Kosasih</i>	41
☞ PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI PENDIDIAN PERGURUAN AWALIAH QURAN DENGAN TRADISI KHATAM QURAN DI DESA BALAI GURAH KECAMATAN IV ANGKEK SUMATERA BARAT <i>Wirdanengsih</i>	42
☞ KEBERADAAN WIRUSAHAWAN ETNIK DALAM MEMBENTUK: REALITAS BUDAYA EKONOMI DI PERKOTAAN: ANALISIS ANTROPOLOGI EKONOMI <i>Nursyirwan Effendi</i>	43
☞ RUSDIYAH CLUB <i>Alfarabi</i>	43
☞ MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI <i>LIFE SKILL</i> MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT <i>Atem</i>	44
☞ KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI KONSTITUSI ASLI INDONESIA <i>Iwan Permadi, Dwi Yono</i>	45
☞ DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU DALAM ADAT MATRILINEAL <i>Sri Meiyenti</i>	45
☞ POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: REPRODUKSI IDENTITAS DAN RESISTENSI SIMBOLIK TERHADAP INTRODUKSI MAKANAN POKOK BERAS <i>Edi Indrizal, Muhammad Ansor</i>	46
☞ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>DESIGN THINKING</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR <i>Achmad Hidir, Nur Laila Meilani, Harapan Tua RFS</i>	46
☞ DIMENSI BUDAYA DALAM PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT ERA REFORMASI <i>Israr Iskandar</i>	47



☞	<i>TAUKE: PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG</i> M.Rawa El Amady	47
☞	KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN Undri	48
☞	GENEALOGIS TERRITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT Susi Fitria Dewi, Alia Azmi	49
☞	PEMBERDAYAAN INSTITUSI LOKAL UNTUK MENGELOLA POTENSI LOKAL Indraddin	50
☞	KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI <i>TEMPUNG</i> PADA MASYARAKAT REJANG Silvia Devi	50
☞	KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT Abdul Mutolib	51
☞	KEMATIAN MATERNAL IBU: RIGIDITAS PROGRAM VERSUS INERSIA BUDAYA Yunarti, Maihasni, Yulkardi, Sri Meiyenti	51
	KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SASTRA	53
☞	MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID Novieta Hardeani Sari, Fenty Asmara	55
☞	KOMUNIKASI PENDIDIKAN GENDER PADA ANAK-ANAK: STUDI KASUS KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK TK-SD Meilani Dhamayanti	55
☞	TELEVISI DAN TAYANGAN <i>LIVE</i> SEPAK BOLA: STUDI ETNOGRAFI TENTANG KEBERADAAN MEDIA MASSA TELEVISI DAN TAYANGAN <i>LIVE</i> SEPAK BOLA Rachmaniar, Puji Prihandini	56
☞	STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA ONLINE PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG Elva Ronaning Roem	56
☞	MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNA GRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL RINGAN Gusdi Sastra, Roby Joi Ekovani	57
☞	MEDIA DAN PENGATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015 Tri Udayani	58
☞	<i>ECO-VILAGE</i> & PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG Evie Ariadne Shinta Dewi	58
☞	KEBIJAKAN CRS OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN BARU (<i>NEW INSTITUTIONALISM</i>): STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH Isnaini Muallidin, Mukti Fajar Dewanto, Leli Joko Suryono	59



☞ CIVIC ENGAGEMENT MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE DI KALANGAN ANAK MUDA KOTA PADANG <i>Yayuk Lestari</i>	59
☞ MEDIA MASSA DAN KARAKTER BANGSA <i>Mulyanti Syas</i>	60
☞ AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA <i>Desy Mardhiah</i>	61
☞ PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA <i>Rika Widawati, Ani Rachmat</i>	61
☞ ANTARA REALITA DAN FIKSI: PARADIGMA SOSIOLOGI DALAM KAJIAN SASTRA <i>Khairil Anwar</i>	62
☞ PLACE BRAND MUSEUM ADITYAWARMAN PADANG: STUDI KASUS BRAND AWARENESS PENGGUNA TAMAN MELATI MUSEUM SEBAGAI TEMPAT MESUM <i>Yesi Puspita</i>	62
☞ STRATEGI NEW MEDIA OLEH HUMAS PEMERINTAH: STUDY TENTANG PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN KAIN TENUN SONGKET SILUNGKANG OLEH HUMAS KOTA SAWAHLUNTO <i>Revi Marta</i>	63
KELUARGA, GENDER, KEMISKINAN, KESEHATAN	65
☞ POLA PENGASUHAN ANAK DAN PELESTARIAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN: STUDI PADA NELAYAN URBAN DI KOTA PADANG <i>Syahrizal</i>	67
☞ ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI <i>Fery Andrianus</i>	67
☞ PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT <i>Yevita Nurti</i>	68
☞ KEMURAMAN DI PULAU BANGKA-TIMAH BUKAN HANYA MERUSAK EKONOMI MASYARAKAT, MALAH MENGANCAM KESEHATAN MASYARAKAT <i>Miho Sakai</i>	69
☞ PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG: STUDI FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENYEBAB KEMISKINAN <i>Muhammad Hidayat</i>	69
☞ MODEL PENGADAAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH, JENIS DAN KUALIFIKASI DALAM MENCAPI MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) KESEHATAN DI KOTA BOGOR DAN KABUPATEN SUKABUMI. <i>Irma Purnamasari, Euis Salbiah</i>	70
☞ MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (KEMENAKAN) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (MAMAK) DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU <i>Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini</i>	70



☞	LBT, “COMING OUT”, DAN NEGARA: SUATU KAJIAN TENTANG JARINGAN SOSIAL ORGANISASI LBT ARDHANARY INSTITUTE Sri Setiawati	71
☞	PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA Wenny Ira Reverawati	72
☞	PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT Fachrina, Machdaliza Masri	73
☞	DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN: STUDI KEWENANGAN KUA KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BOGOR Ani Yumarni	73
☞	MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS Adila Kasni Astiena, Suchyar Iskandar, Hanifah	74
POLITIK LOKAL		77
☞	PENGARUH SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI PELAKSANAAN LUU NO. 6/2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMTAERA BARAT Tamrin & Asrinaldi	79
☞	MODEL SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENYELENGGARA PEMILU YANG BERETIKA Yulia Sari	79
☞	ANTARA DAKWAH DAN POLITIK: PEMETAAN HABITUS AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DALAM KONSTELASI POLITIK INTRA DAN EKSTRA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2011-2015 Arifki	80
☞	PEMILIH PERMISIF DAN PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 Irawati dan Andri Rusta	81
☞	STRATEGI PELEMBAGAAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA Bambang Eka Cahya Widodo, Awang Darumurti	81
☞	JARINGAN KEKUASAAN PENGHULU ADAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT Asrinaldi	82
☞	OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG Dewi Anggraini, Febriani	83
☞	POLITIK INDEKS DAN ARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Caroline Paskarina	83
☞	<i>DUKUN KAMPONG</i> : KAJIAN TENTANG KAPITAL SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BELITUNG Aimie Sulaiman	84



☞	PENYELENGGARA PEMILU PROFESIONAL <i>Diana Sari Dewi Kosasi</i>	85
☞	KEGAGALAN PENDALAMAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA: SATU KAJIAN KASUS <i>PILKADA BADUNSANAK</i> DI SUMATERA BARAT <i>Bakaruddin Rosyidi Ahmad</i>	86
☞	POLITIK <i>NAGARI</i> : PEMBALIKAN DEMOKRASI DAN EKISTENSI LEMBAGA <i>NAGARI</i> DI SUMATERA BARAT (RENTANG TAHUN 1979-2015) <i>Tengku Rika Valentina</i>	87
KEBIJAKAN PUBLIK, ADMINISTRASI PUBLIK		89
☞	INHIBISI PROSTITUSI: KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI TELEJU OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU <i>M. Zainuddin</i>	91
☞	KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN <i>Navarin Karim</i>	91
☞	PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI PERATURAN DAERAH <i>Mochammad Farisi</i>	92
☞	PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM <i>REDUCE, REUSE, RECYCLE</i> DI KOTA MAKASSAR <i>Nuryanti Mustari, Ihyani Malik</i>	93
☞	JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU <i>Mustiqowati Ummul Fithriyyah</i>	94
☞	TAX HOLIDAY A POLICY TO INCREASE INVESTMENT IN INDONESIA <i>Juliannes Cadith</i>	94
☞	PRIVATISASI BUMN DAN PERBURUAN RENTE: STUDI PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL <i>Ilham Aldelano Azre</i>	95
☞	PEMODELAN STATUS GIZI BALITA UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN <i>Aidinil Zetra, Bakaruddin Rosyidi Ahmad</i>	95
☞	KETERLIBATAN MASYARAKAT (<i>PUBLIC ENGAGEMENT</i>) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA <i>Syaiful</i>	96
DEMOKRASI,		99
DESENTRALISASI, GOVERNANCE		99
☞	REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> <i>Zaenal Hirawan</i>	101




☞	PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN BERBASIS <i>STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> Suswanta	101
☞	OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM: STUDI OPTIMALISASI POTENSI SUMATERA BARAT DALAM KERJASAMA <i>INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION</i> (IORA) Apriwan, Silsila Asri, Wiwik Rukmi	102
☞	KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES) Busyra Azheri	103
☞	MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI: SUATU STUDI PENDAHULUAN Roni Ekha Putera	104
☞	DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA? Hendri Koeswara, Simson Ginting	105
☞	DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Desna Aromatica	105
☞	RELASI PEMERINTAH DAN PETANI: PENGALAMAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG Husni Kamil Manik, Didi Rahmadi	106
☞	PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA DEPAN:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDFFSDFFSFSFSFS4235466558888////////L.	
	PEMILU DAN PARLEMEN	107
☞	IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM: STUDI KPU PROVINSI RIAU Dewi Silvia Ariani	109
☞	E-DEMOKRASI UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN DI SUMATERA BARAT Aidinil Zetra	109
☞	ANALISA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Ira Novita	110
☞	AKUNTABILITAS POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP PEMILU LEGISLATIF 2014 Andri Rusta	111
☞	PEMASALAHAN-PEMASALAHAN PEREKRUTAN PENYELENGGARAN PEMILU: ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM Etwin Juanda	111
☞	DINAMIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU PERIODE 2014-2019 PASCA PENETAPAN MENJADI PASANGAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015 Alexsander Yandra	114



☞ DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF UNTUK PEMILU 2019 <i>Darwin Tarigan</i>	114
☞ DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH KEPADA KANDIDAT PADA PILKADA PADANG PARIAMAN TAHUN 2010 <i>Sadri Chaniago</i>	115
☞ <i>INDEPENDENT INDONESIAN MODEL</i> : KAJIAN MENGENAI MODEL BADAN PENYELENGGARA PEMILU INDONESIA <i>Hasnul Marli</i>	116
☞ PEMETAAN PARTISIPASI PEMILIH DAN SIKAP TERHADAP POLITIK UANG (<i>VOTE BUYING</i>) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN <i>Bakaruddin Rosyidi Ahmad, Aidinil Zetra, Canang Bagus Prahara Umpu</i>	116
PERUBAHAN SOSIAL, GERAKAN SOSIAL, MULTIKULTURALISME, KONFLIK, TERORISME, PENEGAKAN HUKUM	119
☞ KEJAHATAN TERORISME DAN RADIKALISME DI ABAD KE 21: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA <i>Aulia Rosa Nasution</i>	121
☞ ILMU SOSIAL PROFETIK INTEGRASI ILMU DAN AGAMA MENUJU HUMANISASI, LIBERASI DAN TRANSEDENSI <i>Zulfadli</i>	121
☞ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN <i>SOFTWARE</i> DI KOTA CILEGON <i>Putri Gemala Sari</i>	122
☞ POLITIK DAN KONFLIK GERAKAN SOSIAL OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 <i>Virtuous Setyaka</i>	122
☞ PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL <i>Anggraeni Primawati</i>	123
☞ MODEL INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT HORTICULTURE COMMODITY FOR SMALL FARMING SYSTEM BY USING POST-HARVEST TECHNOLOGY <i>Didet Deperiky, Helmi, Rika Ampuh Hadiguna, Muhammad Makky</i>	124
DENAH TEMPAT SEMINAR	127

KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA

uji syukur kehadiran Allah SWT karena pelaksanaan Seminar Nasional Ke-2 dengan tema “Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Manusia Indonesia” dapat diselenggarakan. Pemilihan tema ini tentu sudah dipikirkan dengan baik oleh panitia, apalagi melihat perkembangan ilmu sosial dan humaniora di banyak tempat yang mengalami stagnasi, termasuk di Indonesia. Salah satu alasan mengapa tema ini dipilih adalah munculnya keraguan banyak pihak bahwa ilmu sosial dan humaniora sudah tidak lagi memberi kontribusi nyata untuk perkembangan pembangunan di banyak negara. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah peran nyata ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan langsung seperti ilmu-ilmu alam serta ilmu teknologi komunikasi dan informasi. Bahkan di Jepang, misalnya, muncul keinginan pemerintahnya untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan program studi sosial dan humaniora di beberapa perguruan tinggi pemerintah. Tentu ini mengagetkan banyak pihak.

Beberapa tema dalam seminar ini sengaja dihadirkan dengan harapan peserta seminar dapat menjawab keraguan banyak pihak seperti yang dijelaskan di atas. Tema-tema tersebut dihimpun ke dalam pelbagai disiplin ilmu yang sosial dan humaniora yang dialami. Fakta yang menariknya adalah dari makalah yang masuk, ternyata masih banyak persoalan dalam kehidupan manusia, khususnya masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu dicarikan solusinya. Bahkan dari bahasan yang dilakukan oleh penulisnya banyak tawaran solusi yang diberikan sehingga menjadi solusi terhadap masalah yang ditemukan tadi. Tentu ini menjawab apa yang menjadi keraguan banyak pihak tentang eksistensi ilmu sosial dan humaniora ini.

Seminar Nasional Ke-2 ini diikuti oleh 100 lebih makalah dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Cukup membanggakan peserta dalam seminar ini datang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tentu ini akan memperkaya diskusi dan bahasan yang ada. Kami dari panitia berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama di bidang sosial dan humaniora. Harapan kami semoga seminar ini dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi lain sehingga dapat menjawab keraguan banyak pihak terkait peran ilmu sosial dan humaniora ini.

Terakhir namun penting disampaikan semoga seminar nasional ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama agar dapat memajukan Bangsa Indonesia. Tentunya kami menyadari kelemahan dan kekhilafan yang dihadapi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Atas segala kekurangan itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Semoga di masa mendatang kami lebih baik melaksanakan seminar nasional ini.

Padang, 28 September 2016

Ketua,
Dr. Asrinaldi A

RUNDOWN ACARA

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Venue
	16.00-18.30 WIB.	REGISTRASI PESERTA	Lobby Hotel Bumi Minang
	18.30-19.30 WIB.	KEPATANGAN PESERTA	
Selasa, 27 September 2016		WELCOMING DINNER	Auditorium Gubernuran Sumatera Barat
	19.30-22.00 WIB.	PEMBUKAAN ACARA	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ◆ Pembacaan ayat suci Alquran ◆ Sambutan Ketua Panitia ◆ Sambutan Dekan ◆ Sambutan Rektor ◆ Sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara ◆ Pembacaan Doa 	
		PERTUNJUKAN SENI DAN HIBURAN	
		REGISTRASI PESERTA	
08.00-09.00 WIB.	PLENARY SESSION 1	Lobby Hotel Bumi Minang	
Rabu, 28 September 2016	09.00-11.30 WIB.	1. Prof. Dr. Azyumardi Azra (UN Syarif Hidayatullah) "Kontribusi Ilmu Sosial dan Humaniora untuk Pembangunan Karakter Bangsa"	Ball Room Hotel Bumi Minang
		2. Prof. Dr. Iwan Prayitno (Universitas Muhammadiyah Jakarta/Gubernur Sumatera Barat) "Best Practices Ilmu Sosial dan humaniora dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat" ◆ Moderator: Prof Dr. Afrizal, MA	
	11.30-13.00 WIB.	ISHOMA	
		DISKUSI PARALEL 1	
		Kelas 1 Pelayanan Publik	
		Kelas 2 Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah	
		Kelas 3 Komunikasi, Media, Bahasa dan Sastra	
		Kelas 4 Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan	
		Kelas 5 Politik Lokal	
		COFFEE BREAK	
15.00-15.20 WIB.		Ruang Anai	



Abstrak Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Rabu, 28 September 2016	15.20-18.00 WIB.	DISKUSI PARALEL 2		
		Kelas 1 Kebijakan Publik dan Administrasi Publik	Ruang Kirantan	
		Kelas 2 Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah	Ruang Binuang	
		Kelas 3 Komunikasi, Media, Bahasa dan Sastra	Ruang Mentawai	
		Kelas 4 Demokrasi, Desentralisasi, Governance	Ruang Arau	
	08.00-08.30 WIB.	REGISTRASI PESERTA		Ruang Anai
		PLENARY SESSION 2		
		1. Prof. Eiji Oyamada (Doshisha University) "Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia : : Pengalaman Jepang"		Ball Room Hotel Bumi Mirang
		2. Prof. Dr. Nursyirwan Effendi (FISIP Universitas Andalas) "Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia" ♦ Moderator: Dr. Aidinil Zetra, MA		
		08.30-10.20 WIB.		
10.20-10.30 WIB.	COFFEE BREAK			
Kamis, 29 September 2016	10.30-12.30 WIB.	DISKUSI PARALEL 3		
		Kelas 1 Kebijakan Publik dan Administrasi Publik	Ruang Kirantan	
		Kelas 2 Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah	Ruang Binuang	
		Kelas 3 Komunikasi, Media, Bahasa dan Sastra	Ruang Mentawai	
		Kelas 4 Demokrasi, Desentralisasi, Governance	Ruang Arau	
	12.30-13.30 WIB.	ISHOMA		Ruang Anai
		DISKUSI PARALEL 4		
		Kelas 1 Kebijakan Publik dan Administrasi Publik		Ruang Kirantan
		Kelas 2 Perubahan Sosial, Gerakan Sosial, dan Multikulturalisme		Ruang Binuang
		Kelas 3 Konflik, Teorisme dan Penegakan Hukum		Ruang Mentawai
13.30-15.30 WIB.	Kelas 4 Demokrasi, Desentralisasi, Governance		Ruang Arau	
15.30-16.00 WIB.	Kelas 5 Pemilu dan Parlemen		Ruang Anai	
16.00-21.00 WIB.	PENUTUPAN ACARA OLEH REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS		Ball Room Hotel Bumi Mirang	
	CITY TOUR		Kota Padang	



JADWAL PRESENTASI SESI PARALEL

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : I (13.00 – 15.00)
RUANG : I (RUANG KINANTAN)
TOPIK : PELAYANAN PUBLIK
MODERATOR : DR. RIA ARIANY, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.00-13.20	FERNANDES SIMANGUNSONG	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, JATINANGOR	PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA: STUDI PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
2.	13.20-13.40	ANDI PITONO, ISMAIL NURDIN	FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN IPDN KAMPUS JATINANGOR DAN JAKARTA)	STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN <i>PUBLIC SERVICE 21st</i> PERSPEKTIF <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
3.	13.40-14.00	ROZA LIESMANA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS
4.	14.00-14.20	WAYU EKO YUDIATMAJA	JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISIP UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, KEPULAUAN RIAU	<i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL</i> BIROKRASI DI INDONESIA: PERBEDAAN <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION</i> PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
5.	14.20-14.40	KUSDARINI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	TINJUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : I (13.00 – 15.00)
RUANG : II (RUANG BINUANG)
TOPIK : MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH
MODERATOR : DR. ZAINAL ARIFIN, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.00-13.20	HASBULLAH MALAU, DASMAN LANIN	JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: SINERGI NILAI-NILAI ADAT DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT



Abstrak Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

2.	13.20-13.40	RUBANGI AL HASAN, YUMANTOKO	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU LOMBOK NTB	HUTAN, MASYARAKAT, DAN EKOWISATA: INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN DAN PERANNYA DALAM KONSERVASI HUTAN DI SEKITAR OBJEK WISATA ALAM DI PULAU LOMBOK
3.	13.40-14.00	JOHANNES IBRAHIM KOSASIH	JURUSAN ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	BANK SYARIAH DALAM AKUTURASI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI
4.	14.00-14.20	WIRDANENGSIH	UNP	PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI PENDIDIAN PERGURUAN AWALIAH QURAN DENGAN TRADISI KHATAM QURAN DI DESA BALAI GURAH KECAMATAN IV ANGKEK SUMATERA BARAT)
5.	14.20-14.40	NURSIRWAN EFFENDI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	KEBERADAAN WIRSAUSAHAWAN ETNIK DALAM MEMBENTUK REALITAS BUDAYA EKONOMI DI PERKOTAAN: ANALISIS ANTROPOLOGI EKONOMI RUSDIAH CLUB
6.	14.40-15.00	ALFARABI	UNIVERSITAS BENGKULU	

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016

SESI : I (13.00 – 15.00)

RUANG : III (RUANG MENTAWAI)

TOPIK : KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SASTRA

MODERATOR : DR. YULLIANDRE DARWIS

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.00-13.20	NOVIETA HARDEANI SARI, FENTY ASMARA	JURUSAN ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLTIK UNIVERSITAS NASIONAL	MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID
2.	13.20-13.40	MELANI DHAMAYANTI	DOSEN KOMUNIKASI DI BINUS (BINA NUSANTARA)	KOMUNIKASI PENDIDIKAN GENDER PADA ANAK-ANAK: STUDI KASUS KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK TK-SD
3.	13.40-14.00	RACHMANIAR, PUJI PRIHANDINI	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN	TELEVISI DAN TAYANGAN LIVE SEPAK BOLA: STUDI ETNOGRAFI TENTANG KEBERADAAN MEDIA MASSA TELEVISI DAN TAYANGAN LIVE SEPAK BOLA
4.	14.00-14.20	ELVA RONANING ROEM	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA ONLINE PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG
5.	14.20-14.40	GUSDI SASSTRA, ROBY JOI EKOVANI	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNA GRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL RINGAN
6.	14.40-15.00	TRI UDAYANI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	MEDIA DAN PENGATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015



HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : I (13.00 – 15.00)
RUANG : IV (RUANG ARAU)
TOPIK : KELUARGA, GENDER, KEMISKINAN, KESEHATAN
MODERATOR : DR. JENDRIUS, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.00-13.20	SYAHRIZAL	FISIP UNAND	POLA PENGASUHAN ANAK DAN PELESTARIAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN: STUDI PADA NELAYAN URBAN DI KOTA PADANG
2.	13.20-13.40	FERRY ANDRIANUS	FAKULTAS EKONOMI UNAND	ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI
3.	13.40-14.00	YEVITA NURTI	FISIP UNAND	PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT
4.	14.00-14.20	MIHO SAKAI	DOSEN TAMU JURUSAN SASTRA JEPANG, FIB UNAND	KEMURAMAN DI PULAU BANGKA-TIMAH BUKAN HANYA MERUSAK EKONOMI MASYARAKAT, MALAH MENGANCAM KESEHATAN MASYARAKAT
5.	14.20-14.40	MUHAMMAD HIDAYAT	FISIP UNAND	PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG: STUDI FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENYEBAB KEMISKINAN
6.	14.40-15.00	IRMA PURNAMASARI, EUIS SALBIAH	PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA, FISIP, UNIV. DUJANDA BOGOR	MODEL PENGADAAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH, JENIS DAN KUALIFIKASI DALAM MENCAPAI <i>MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS</i> (MDGs) KESEHATAN DI KOTA BOGOR DAN KABUPATEN SUKABUMI

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : I (13.00 – 15.00)
RUANG : V (RUANG ANAI)
TOPIK : POLITIK LOKAL
MODERATOR : DR. ERNITA ARIEF, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.00-13.20	TAMRIN, ASRINALDI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PENGARUH SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI PELAKSANAAN UU NO. 6/2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
2.	13.20-13.40	YULIA SARI	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENYELENGGARA PEMILU YANG BEREKTIKA



Abstrak Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

3.	13.40-14.00	ARIFKY	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ANTARA DAKWAH DAN POLITIK: PEMETAAN HABITUS AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DALAM KONSTELASI POLITIK INTRA DAN EKSTRA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2011-2015
4.	14.00-14.20	IRAWATI, ANDRI RUSTA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMILIH PERMISIF DAN POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014
5.	14.20-14.40	BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, AWANG DARUWURTI	JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	STRATEGI PELEMBAGAAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA
6.	14.40-15.00	TENGGU RIKA VALENTINA	FISIP UNAND	POLITIK <i>MAGARI</i> : PEMBALIKAN DEMOKRASI DAN EKSISTENSI LEMBAGA <i>MAGARI</i> DI SUMATERA BARAT (RENTANG TAHUN 1979-2015)

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : II (15.20 – 18.10)
RUANG : I (RUANG KINANTAN)
TOPIK : PELAYANAN PUBLIK
MODERATOR : DRS. YOSERIZAL, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	15.20-15.40	ABDULLAH, ADY MUZWARDI, ARIF RAHMAN MADJID	UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMKAB PONOROGO DALAM MENINGKUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER
2.	15.40-16.00	RIA ARIANY	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH
3.	16.00-16.20	HAMIRUL	UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA BANDUNG	PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL PARA PEJABAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH
4.	16.20-16.40	MALISE YULIVESTRA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	OPTIMALISASI FUNGSI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT
5.	16.40-17.00	EDO OKSUDI, ALDRI FRINADI	FIS UNP	ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG: STUDI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL TRANS PADANG



HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : II (15.20 – 17.20)
RUANG : II (RUANG BINUANG)
TOPIK : MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH
MODERATOR : PROF. DR. ERWIN, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	15.20-15.40	M. RAWA EL AMADY	INSTITUT ILMU ILMU SOSIAL (SI) RIAU	TAUKE: PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG
2.	15.40-16.00	IWAN PERMADI, DWI YONO	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWI JAYA	KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI KONSTITUSI ASLI INDONESIA
3.	16.00-16.20	SRI MEYENTI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU DALAM ADAT MATRILINEAL
4.	16.20-16.40	EDI INDRIZAL, MUHAMMAD ANSOR	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: REPRODUKSI IDENTITAS DAN RESISTENSI SIMBOLIK TERHADAP INTRODUKSI MAKANAN POKOK BERAS
5.	16.40-17.00	ACHMAD HIDIR, NUR LAILA MELANI, HARAPAN TUA RFS	FISIP UNIVERSITAS RIAU	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>DESIGN THINKING</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR
6.	17.00-17.20	ISRAR	FIB UNIVERSITAS ANDALAS	DIMENSI BUDAYA DALAM PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT ERA REFORMASI

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : II (15.20 – 17.20)
RUANG : III (RUANG MENTAWAI)
TOPIK : KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SASTRA
MODERATOR : DR. ASMAWI, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	15.20-15.40	EVE ARIADNE SHINTA DEWI	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN	<i>ECO VILLAGE</i> DAN PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG
2.	15.40-16.00	YAYUK LESTARI	FISIP UNAND	<i>CIVIC ENGAGEMENT</i> LEWAT MEDIA ONLINE DI KALANGAN ANAK MUDA KOTA PADANG



Abstrak Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

3.	16:00-16:20	MULYANTI SYAS	IAIN IMAM BONJOL	MEDIA MASSA DAN KARAKTER BANGSA
4.	16:20-16:40	DESY MARDIAH	FISIP UNIVERSITAS NEGERI PADANG	AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
5.	16:40-17:00	ISNAINI MUALLIDIN, MUKTI FAJAR DEWANTO, LELI JOKO SURYONO	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	KEBUJUKAN CRS OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN BARU (NEW INSTITUTIONALISM): STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH

HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016

SESI : II (15.20 – 17.20)

RUANG : IV (RUANG ARAU)

TOPIK : KELUARGA, GENDER, KEMISKINAN, KESEHATAN

MODERATOR : DR. INDRADDIN, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	15:20-15:40	NINI ANGGRAINI, DWIYANTI HANANDINI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (KEMENAKAM) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (MAMAK) DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU
2.	15:40-16:00	SRI SETIAWATI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	LBT "COMING OUT", DAN NEGARA : SUATU KAJIAN TENTANG JARINGAN SOSIAL ORGANISASI LBT ARDHANARY INSTITUTE
3.	16:00-16:20	WENNY IRA REVERAWATI	STISIP NURDIN HAMZAH JAMBI	PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA
4.	16:20-16:40	FACHRINA, MACHDALIZA MASRI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT
5.	16:40-17:00	ANI YUMARNI	DOSEN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR	DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN: STUDI KEWENANGAN KUA KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BOGOR
6.	17:00-17:20	ADILA KASNI ASTIENA, SUCHYAR ISKANDAR, HANIFAH MARDHATILLAH	PRODI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT, FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS ANDALAS	MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS



HARI/ TANGGAL : RABU, 28 SEPTEMBER 2016
SESI : II (15.20 – 17.20)
RUANG : V (RUANG ANAI)
TOPIK : POLITIK LOKAL
MODERATOR : PROF. DR. SRI ZULCHAIRYAH, MA.

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	15.20-15.40	ASRINALDI	FISIP UNAND	JARINGAN KEKUASAAN PENGHULU ADAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT
2.	15.40-16.00	DEWI ANGGRAINI, FEBRIANI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG
3.	16.00-16.20	CAROLINE PASKARINA	DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN	POLITIK INDEKS DAN ARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
4.	16.20-16.40	AIMIE SULAIMAN	JURUSAN SOSIOLOGI, FISIP, UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)	<i>DUKUN KAMPONG</i> : KAJIAN TENTANG KAPITAL SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BELITUNG
5.	16.40-17.00	DIANA SARI DEWI KOSASI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	PENYELENGGARA PEMILU PROFESIONAL
6.	17.00-17.20	BAKARUDDIN ROSYIDI AHMAD	FISIP UNAND	KEGAGALAN PENDALAMAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA: SATU KAJIAN KASUS PILKADA BADUNSANAK DI SUMATERA BARAT

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
SESI : III (10.30 – 12.30)
RUANG : I (RUANG KINANTAN)
TOPIK : KEBIJAKAN PUBLIK, ADMINISTRASI PUBLIK
MODERATOR : KUSDARINI, S.IP, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	10.40-11.00	M. ZAINUDDIN	DOSEN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ABDURRAB PEKANBARU RIAU	INHIBISI PROSTITUSI: KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI TELEJU OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
2.	11.00-11.20	NAVARIN KARIM	DOSEN FISIPOL UNIVERSITAS JAMBI	KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN



Abstrak Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

3.	11.20-11.40	MOCHAMMAD FARISI	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS JAMBI	PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI PERATURAN DAERAH
4.	11.40-12.00	NURYANTI MUSTARI, IHYANI MALIK	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM <i>REDUCE, REUSE, RECYCLE</i> DI KOTA MAKASSAR
5.	12.00-12.20	MUSTIQOWATI UMMUL FTHRIYYAH	JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA UIN SUSKA RIAU	JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

SESI : III (10.30 – 12.30)

RUANG : II RUANG BINUANG

TOPIK : MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH

MODERATOR : DRA. ERMAYANTI, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	10.40-11.00	ATEM KORNADI	DEPARTEMEN SOSIOLOGI PASCASARJANA FISIP UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG	MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI <i>LIFE SKILL</i> MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT
2.	11.00-11.20	UNDRI	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG	KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
3.	11.20-11.40	SUSI FITRIA DEWI, ALIA AZMI	JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN FIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG	GENEALOGIS TERRITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT
4.	11.40-12.00	INDRADDIN	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMBERDAYAAN INSTITUSI LOKAL UNTUK MENGELOLA POTENSI LOKAL
5.	12.00-12.20	SILVIA DEVI	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG	KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI <i>TEMPUNG</i> PADA MASYARAKAT REJANG
6.	12.20-12.40	ABDUL MUTOLIB	PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS	KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASTRAYA, SUMATERA BARAT



HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
SESI : III (10.30 – 12.30)
RUANG : III (RUANG MENTAWAI)
TOPIK : KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SASTRA
MODERATOR : DR. EMERALDY CHATRA, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	10.40-11.00	RIKA WIDAWATI, ANI RACHMAT	UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA BANDUNG	PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA
2.	11.00-11.20	KHAIRIL ANWAR	PRODI SASTRA MINANGKABAU - FIB UNAND	ANTARA REALITA DAN FIKSI: PARADIGMA SOSIOLOGI DALAM KAJIAN SASTRA
3.	11.20-11.40	YESSI PUSPITA, REVI MARTA, DWI LARA	FISIP UNAND	PLACE BRAND MUSEUM ADITYAWARMAN : STUDI KASUS BRAND AWARENESS PENGGUNA TAMAN MELATI MUSEUM SEBAGAI TEMPAT MESUM
4.	11.40-12.00	REVI MARTA	FISIP UNAND	STRATEGI NEW MEDIA OLEH HUMAS PEMERINTAH: STUDY TENTANG PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN KAIN TENUUN SONGKET SILUNGKANG OLEH HUMAS KOTA SAWAHLUNTO
5.	12.00-12.20	ANNE FRIDAY SAFARIA	MAHASISWA S3 ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG	INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA ERA OTONOMI DAERAH

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
SESI : III (10.30 – 12.30)
RUANG : IV (RUANG ARAU)
TOPIK : DEMOKRASI, DESENTRALISASI, GOVERNANCE
MODERATOR : DRS, SYAIFUL, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	10.40-11.00	ZAENAL HIRAWAN	FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NIAGA UNIVERSITAS SUBANG	REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
2.	11.00-11.20	SUSWANTA	DOSEN ILMU PEMERINTAHAN FISIPOL UMY	PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN BERBASIS STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE
3.	11.20-11.40	APRIWAN, SILSILA ASRI, MIWIK RUKMI	FISIP UNAND	OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM: STUDI OPTIMALISASI POTENSI SUMATERA BARAT DALAM KERJASAMA INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)



4.	11.40-12.00	BUSYRA AZHERI	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS	KEMENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)
----	-------------	---------------	------------------------------------	--

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
SESI : III (10.30 – 12.30)
RUANG : V (RUANG ANAI)
TOPIK : PEMILU DAN PARLEMEN
MODERATOR : DR. AZWAR, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	10.40-11.00	DEWI SILVIA ARIANI	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM: STUDI KPU PROVINSI RIAU
2.	11.00-11.20	AIDINIL ZETRA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	E-DEMOKRASI UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN DI SUMATERA BARAT
3.	11.20-11.40	IRA NOVITA	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
4.	11.40-12.00	ANDRI RUSTA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	AKUNTABILITAS POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP PEMILU LEGISLATIF 2014
5.	12.00-12.20	ETWIN JUANDA	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	PEMASALAHAN-PEMASALAHAN PEREKRUTAN PENYELENGGARAN PEMILU (ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM)

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
SESI : IV (13.30 – 15.30)
RUANG : I (RUANG KINANTAN)
TOPIK : KEBIJAKAN PUBLIK, ADMINISTRASI PUBLIK
MODERATOR : DRS. ALFITRI, MS

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.40-14.00	JULIANNES CADITH	PRODI ADMINISTRASI NEGARA FISIP UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	KEBUJAKAN PAJAK LIBURAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA
2.	14.00-14.20	ILHAM ALDELANO AZRE	FISIP UNAND	PRIVATISASI BUMI DAN PERBURUAN RENTE: STUDI PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL



3.	14:20-14:40	AIDINIL ZETRA, BAKARUDDIN ROSYIDI AHMAD	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMODELAN STATUS GIZI BALITA UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN PESIR SELATAN
4.	14:40-15:00	SYAIFUL	FISIP UNAND	KETERLIBATAN MASYARAKAT (<i>PUBLIC ENGAGEMENT</i>) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DHARMASTRAYA
5.	15:00-15:20	TITI STIAWATI, RINA YULIANTI	ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA BANTEN	REVITALISASI KENADZIRAN KESULTANAN BANTEN DALAM MENGELOLA WISATA RELIGI DI BANTEN LAMA DAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
6.	15:20-15:40	YUNARTI, MAIHASNI, YULKARDI, SRI MEYENTI	FISIP UNAND	KEMATIAN MATERNAL IBU: RIGIDITAS PROGRAM VERSUS INERSIA BUDAYA

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

SESI : IV (13.30 – 15.30)

RUANG : II (RUANG BINUANG)

TOPIK : PERUBAHAN SOSIAL, GERAKAN SOSIAL, MULTIKULTURALISME,

KONFLIK, TERORISME, PENEGAKAN HUKUM

MODERATOR : PROF. DR. DAMSAR, MA

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13:40-14:00	AULIA ROSA NASUTION	FAKULTAS HUKUM DI UNIVERSITAS MEDAN AREA, MEDAN	KEJAHATAN TERORISME DAN RADIKALISME DI ABAD KE 21: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA
2.	14:00-14:20	ZULFADLI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ILMU SOSIAL PROFETIK INTEGRASI ILMU DAN AGAMA MENUJU HUMANISASI, LIBERASI DAN TRANSEDENSI
3.	14:20-14:40	PUTRI GEMALA SARI	POLITEKNIK NEGERI PADANG	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SOFTWARE DI KOTA CILEGON
4.	14:40-15:00	VIRTUOUS SETYAKA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	POLITIK DAN KONFLIK GERAKAN SOSIAL OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998
5.	15:00-15:20	ANGGRAENI PRIMAWATI	PRODI SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL
6.	15:20-15:40	DEDET DEPERIKY, HELMI, RIKA AMPUH HADIGUNA, MUHAMMAD MAKKY	MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT HORTICULTURE COMMODITY FOR SMALL FARMING SYSTEM BY USING POST-HARVEST TECHNOLOGY

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
 SESI : IV (13.30 – 15.30)
 RUANG : IV (RUANG ARAU)
 TOPIK : DEMOKRASI, DESENTRALISASI, GOVERNANCE
 MODERATOR : APRILWAN, S.IP, MA

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.40-14.00	RONI EKHA PUTERA	FISIP UNAND	MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI: SUATU STUDI PENDAHULUAN
2.	14.00-14.20	HENDRI KOESWARA, SIMSON GINTING	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA?
3.	14.20-14.40	DESNA AROMATICA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
4.	14.40-15.00	HUSNI KAMIL MANIK, DIDI RAHMADI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	RELASI PEMERINTAH DAN PETANI: PENGALAMAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
5.	15.00-15.20	HASMUN A. SU'EB	KOPBATARA	PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA DEPAN: PENDEKATAN SISTEMIK UNTUK MENGGUNAKAN MASYARAKAT

HARI/ TANGGAL : KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016
 SESI : IV (13.30 – 15.30)
 RUANG : V (RUANG ANAI)
 TOPIK : PEMILU DAN PARLEMEN
 MODERATOR : DR. ELITRA, M.SI

NO.	WAKTU	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	13.40-14.00	ALEXSANDER YANDRA	UNIVERSITAS LANGANG KUNING	DINAMIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU PERIODE 2014-2019 PASCA PENETAPAN MENJADI PASANGAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015
2.	14.00-14.20	DARWIN TARIGAN	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF UNTUK PEMILU 2019
3.	14.20-14.40	SADRI CHANIAGO	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH KEPADA KANDIDAT PADA PILKADA PADANG PARIAMAN TAHUN 2010
4.	14.40-15.00	HASNUL MARLI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	INDEPENDENT <i>INDONESIAN MODEL</i> : KAJIAN MENGENAI MODEL BADAN PENYELENGGARA PEMILU INDONESIA
5.	15.00-15.20	BAKARUDDIN R. AHMAD, AIDINIL ZETRA, CAMANG BAGUS PRAHARA UMPU	FISIP UNAND	PEMETAAN PARTISIPASI PEMILIH DAN SIKAP TERHADAP POLITIK UANG (<i>VOTE BUYING</i>) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN PESIR SELATAN





PELAYANAN PUBLIK





PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	FERNANDES SIMANGUNSONG	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, JATINANGOR	PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA (STUDI PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT)
2.	ANDI PITONO, ISMAIL NURDIN	FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN IPDN KAMPUS JATINANGOR & JAKARTA	STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN <i>PUBLIC SERVICE 21ST</i> PERSPEKTIF <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
3.	ROZA LIESMANA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS
4.	WAYU EKO YUDIATMAJA, TRI SAMNUZULSARI	JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FISIP, UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	<i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL</i> BIROKRASI DI INDONESIA: PERBEDAAN <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION</i> PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU
5.	KUSDARINI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	TINJUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT
6.	EDO OKSUDI & ALDRI FRINADI	FIS UNP	ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG (STUDI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL TRANS PADANG)
7.	ABDULLAH & ADY MUZWARDI, ARIF RAHMAN MAJID	UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMKAB PONOROGO DALAM MENGGOMUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER
8.	ANNE FRIDAY SAFARIA	MAHASISWA S3 ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG	INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA ERA OTONOMI DAERAH
9.	RIA ARIANY	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH
10.	HAMIRUL	UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA BANDUNG	PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL PARA PEJABAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHU
11.	MALSE YULIVESTRA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	OPTIMALISASI FUNGSI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT



**PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI
WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA**
Studi Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Fernandes Simangunsong

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Indonesia harus melihat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan tidak lupa pula harus telah memenuhi usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Untuk persyaratan teknis, wajib bagi pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti bagi setiap pelaksanaan pemekaran kecamatan. Dan syarat kunci terakhir untuk suksesnya pemekaran kecamatan adalah terpenuhinya persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Dalam penelitian ini, hanya mengkaji dan menganalisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, karena kedua persyaratan ini dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini bersifat sampel jenuh, dimana akan dianalisis semua kekuatan potensi wilayah di Kota Bogor baik potensi desa/kelurahan maupun potensi wilayah kecamatan, dengan alasan agar pelaksanaan pemekaran nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Indonesia, tidak akan mengakibatkan terganggunya perkembangan wilayah baik kecamatan induk maupun kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran.

Kata kunci: *pemerintahan daerah, pemekaran kecamatan, pelayanan publik*

**STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN *PUBLIC SERVICE 21ST* PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE*
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA**

Andi Pitono, Ismail Nurdin

Negara Indonesia sebagai negara unitaris menjalankan pemerintahannya dengan semangat perjuangan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat. Dasar tersebutlah yang mendorong upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya dalam pelayanan, pemberdayaan, pengaturan, dan pembangunan. Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan prima. Selanjutnya upaya mencapai pelayanan prima oleh pemerintah dilakukan dengan menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Implementasi pelayanan pada tataran kecamatan bukan tanpa



kendala-kendala, di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, *performance* pelayanan publik senantiasa mencoba mengikuti arus perkembangan lingkungan dinamis dari tuntutan masyarakat, teknologi informasi, globalisasi, serta kebutuhan inovasi. Kendala pelayanan yang diberikan oleh Camat dan aparat Kecamatan Jatiluhur adalah terbatasnya kewenangan yang didelegasikan dari Bupati kepada Camat, sehingga pelayanan sangat terbatas dan cenderung bersifat rekomendasi, hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jatiluhur belum terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif yang dilakukan pada objek penelitian. Ruang lingkup penelitian pada pembahasan ini yaitu Studi Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya dokumentasi, observasi, penelusuran data online, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu terbagi menjadi 3 tahapan, diantaranya "*data reduction, data display, dan drawing conclusion*".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta belum menggambarkan kebutuhan masyarakat dikarenakan belum adanya Standar Pelayanan Minimal, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran kecamatan bersifat kepentingan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta sikap dan perilaku petugas yang belum menunjukkan cara pemberian pelayanan yang prima. Kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan dengan asumsi adanya antusiasme Camat dan Aparat Kecamatan Jatiluhur pada *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* sebagai usaha-usaha menuju pelayanan yang lebih baik. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pembentukan tim penyusun peraturan, penyusunan dan pengesahan peraturan tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), penyusunan tahapan *Public Service 21st* oleh tim ahli yaitu *embedding culture, service management, service infrastructure, career structures and development for servicers, institution and assessment, service structure, dan implementation*.

Keywords : *public service 21st, dynamic governance, Strategis.*

ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS

Roza Liesmana

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka percepatan pembangunan global di Asia Tenggara membawa implikasi besar bagi negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang multi-etnis ditambah dengan kedatangan arus pekerja asing belakangan ini menimbulkan "politik keras" bagi penduduk di Indonesia jika tidak dikemas secara adil dan transparan oleh pemerintah. Faktor etnis akan selalu menjadi dimensi yang penting dari politik dan pemerintahan, dan juga menjadi dimensi yang penting dari Administrasi Publik.

Mempersiapkan Administrasi Publik yang peka terhadap keragaman etnis untuk meminimalisir kemunculan konflik etnis menjadi keharusan. Langkah yang perlu dilakukan melalui perbaikan



Administrasi Publik dengan dua cara: kemampuan negara menangani keragaman etnis sangat ditentukan oleh kapabilitas Administrasi Publik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara yang adil dalam mengalokasikan sumber yang terbatas kepada kelompok-kelompok etnis yang selalu bersaing untuk memperoleh sumber dan kekuasaan yang terbatas tersebut. Cara kedua, fokus Administrasi Publik seharusnya pada formulasi dan implementasi kebijakan dan program untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menyediakan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan global.

Peranan Administrasi Publik dalam pembangunan global menjadi sangat signifikan. Administrasi Publik yang kompeten dan bertanggungjawab adalah salah satu faktor yang amat menentukan keberhasilan Indonesia dalam proses pembangunan global. Namun disisi lain kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis adalah kekayaan sosial budaya yang akan tetap ada dan harus dipertahankan.

Keywords: *public administration, multi-ethnicity*

PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL BIROKRASI DI INDONESIA
Perbedaan *Public Service Motivation* Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Honorar di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Wayu Eko Yudiatmaja, Tri Samnuzulsari

Tulisan ini membahas perbedaan *public service motivation* (PSM) birokrat level bawah (*street-level bureaucracy*) di Indonesia. Fokus tulisan ini mengkaji perbedaan PSM pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorar yang bertugas pada kelurahan-kelurahan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kajian ini menggunakan dimensi dan indikator PSM yang dirumuskan oleh Perry (1996) untuk mengetahui perbedaan PSM pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorar. Uji T (*independent sampel t-test*) dilakukan terhadap responden yang terdiri dari 129 orang PNS dan 74 orang pegawai honorar di Kota Tanjungpinang. Tidak seperti di negara-negara maju yang PSM pegawai negerinya lebih tinggi dibandingkan pegawai di sektor swasta, temuan penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan PSM PNS dan pegawai honorar di Indonesia.

Kata kunci: *public service motivation, street-level bureaucracy, PNS, pegawai honorar*

TINJUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
KELUHAN MASYARAKAT

Kusdarini

Paper ini akan membahas tentang kajian teoritis tentang respon organisasi penyelenggara pelayanan publik terhadap keluhan masyarakat. Penyediaan pelayanan dasar (*core public services*) dalam



konteks pendekatan social, berhubungan dengan penyediaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang harus disikapi secara bijak dengan pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan, karena hasilnya baru akan dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah dimasa mendatang. Kebijakan penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pada hakekatnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan public juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Hal ini memotivasi untuk selalu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan salah satu indikator baiknya sistem pelayanan publik adalah tersedianya *complaint management* (manajemen keluhan) bagi masyarakat. Tetapi tidak semua organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar dan pelayanan umum mempunyai *complaint management* yang baik. Padahal sistem manajemen keluhan ini bisa dianggap sebagai proses perubahan yang radikal pada “*customer service*” yang mentransformasikan perilaku aparat pemerintah dari “*bureaucratic routine*” menuju ke fokus “*citizen needs*”. Sehingga sistem manajemen keluhan harus di disain dan dilaksanakan untuk mengkonversikan “*complaining customers*” menjadi “*satisfied customer*”.

Selama ini penilaian tentang kemampuan untuk merespon keluhan dari masyarakat ini dilakukan dengan mengadopsi sistem yang biasa dilakukan dari *private sector*, yaitu dengan teorinya Devidow, yang menjelaskan bahwa respon organisasi terhadap keluhan harus memuat 6 aspek, yaitu: (1) *Timeliness* (2) *Facilities*; (3) *Redness*; (4) *Apology*; (5) *Credibility*; dan (6) *Attentiveness*. Penyediaan sarana menyalurkan respon yang tepat dari organisasi tersebut akan menimbulkan kepuasan kepada pelanggan yang melakukan pengaduan, sehingga mereka dapat menyebarkan pengalaman mereka kepada orang lain (*word of mouth*) baik yang positif (*word of mouth likelihood*) maupun yang negatif (*word of mouth valence*), dan *intention to repurchase*. Tetapi dalam pelayanan publik, teori ini tidak dapat diterapkan dengan sepenuhnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik, *customer* tidak memiliki pilihan organisasi penyelenggara pelayanan alternatif (*exit mechanism*). Konsumen yang tidak puas atas pelayanan publik yang diterimanya tetapi tidak berdaya untuk mencari dengan alternatif pelayanan publik lain biasanya akan diam saja atau akan melakukan pengajuan keluhan (*voice mechanism*).

Hal ini menguatkan argumen bahwa baik *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence* tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih pelayanan perizinan dari organisasi publik. Sedangkan pada pelayanan kesehatan, pada kondisi tertentu *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence*, bagi masyarakat tertentu akan berpengaruh terhadap pilihan pelayanan atau melakukan *exit mechanism* (pindah ke pelayanan yang diberikan swasta yang dinilai lebih baik pelayanannya).

Kata kunci: respon organisasi, pelayanan publik, keluhan masyarakat



ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG Studi Sarana dan Prasarana Operasional Trans Padang

Edo Oksudi, Aldri Frinadi

Transportasi pada masa modern ini sudah merupakan suatu kebutuhan utama masyarakat perkotaan, seperti hal kebutuhan sandang dan pangan. Penelitian ini dilakukan sebatas analisis tentang pengelolaan sarana dan prasarana bus trans Padang sebagai transportasi publik di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode *Purposive sampling* dalam penentuan informan. Adapun yang menjadi informan adalah pimpinan dan staf pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang pada pemerintah kota Padang. Kemudian staf, sopir, mekanik, dan kondektur pada Koperasi Jasa Sumbar Trans selaku penyedia layanan transportasi Trans Padang. Selanjutnya dengan 12 orang penumpang Bus Trans Padang dari berbagai kalangan. Pengumpulan data selain dengan wawancara, juga dilakukan studi dokumentasi (rencana strategis, tugas pokok dan fungsi), serta pengamatan terhadap bus trans Padang, halte dan pool (penempatan) kendaraan. Keabsahan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Trans Padang masih kurang optimal. Terlihat dari jumlah armada yang kurang, sebagian besar halte yang belum sesuai standar, sistem *ticketing* kurang bagus, jadwal perjalanan be;um terjadwal dengan terarah sehingga muncul keluhan pengguna yang merasa mengalami keterlambatan. Kendala pengelolaan sarana dan prasarana antara lain, kekurangan anggaran, kurangnya koordinasi dengan instansi horizontal dan vertikal terkait, ada oknum pengerusakan halte, tidak adanya jalur khusus Trans Padang. Kesimpulan diperoleh bahwa perlu penataan pengelolalaan sarana dan prasarana dengan lebih optimal, dan disaran kepada pemerintah kota membuka kesempatan kepada berbagai pihak yang berminat secara terbuka untuk ikut dalam penambahan armada kendaraan.

Kata kunci: *pengelolaan, sarana dan prasarana, trans padang, pemerintah kota padang.*

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENKOMUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER

Abdullah, Ady Muzwardi, Arif Rahman Majid

Salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di Pemkab Ponorogo adalah masyarakat yang belum menggunakan Smartphone. Kondisi ini secara jelas mengurangi kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Sistem Informasi Manajemen(SIM) merupakan bagian dari Open Government Data yang digunakan pemerintah dalam melayani kepentingan publik, salah satunya adalah pelayanan publik. Pemkab Ponorogo adalah lembaga pemerintah daerah yang menerapkan sistem SMS Center didalam pelayanan publik sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: *SIM, Pelayanan Publik, SMS Center.*



INNOVATION OF PUBLIC SERVICES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY

Anne Friday Safaria

Creative is one of among other nation's characters that builds civilization through innovations. Government efforts to encourage the development of innovation in the region, especially public services, has begun with the policy of strengthening regional innovation systems. Another effort is the implementation of inter-regional innovation competition, among them the Public Service Innovation System (Sinovik). The system of regional autonomy was deemed to contribute in a variety of innovations spawned local governments to provide better services to the public. This article describes the innovation as a magical concept and its controversial, particularly in the public sector, and also describes some practices in the various regions in Indonesia. The author will also analyze this public service innovation in comparative perspectives of New Public Management (NPM) and New Public Services (NPS).

Keywords: *innovation, public services, regional autonomy, NPM, NPS.*

STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR

Sebuah Model Alternative Peningkatan Semangat Pelayanan di Rumah Sakit Plat Merah

Ria Ariany

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah pusat/daerah, melalui unit pelayanan Rumah Sakit Umum milik pemerintah (RSUP/RSUD). Rumah Sakit membutuhkan sumberdaya manusia yang spesifik yaitu individu yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi fenomena yang berkembang bahwa RSUD adalah identik dengan ketidakramahan *front-liner*-nya. Motivasi diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kepekaan sosial para *front-liner* di RSUD.

Penelitian terdahulu yang berhasil merumuskan sebuah model motivasi yang dilabeli dengan Model Motivasi Empat Pilar (Ariany, 2015), merupakan sebuah konsep yang diperuntukkan bagi peningkatan motivasi pegawai, khususnya *front-liner* di RSUD. Akan tetapi dalam implementasi sebuah program atau kebijakan baru di organisasi seperti RSUD tidaklah mudah, hal ini disebabkan multi kepentingan turut mewarnai dan menjadi bagian dinamika dalam pelayanan di RSUD. Karenanya dibutuhkan strategi dalam mengimplementasikan model ini di RSUD, agar dapat dengan berhasil meningkatkan motivasi *front-liner* dalam mewujudkan pelayanan berkualitas di RS berplat merah ini.

Dalam merumuskan strategi implementasi Model Motivasi Empat Pilar digunakan konsep strategi 7S McKenssey sebagai pisau analisis utamanya, disamping beberapa teori pendukung lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis interaktif (Miles and Huberman; 1992). Lokus dari penelitian ini adalah RSUD Solok dan RSUD Pariaman. Kedua RSUD milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bermasalah pada perilaku pelayanannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke 7 komponen strategi yang dijadikan indikator dalam penelitian implementasi model motivasi empat pilar pada *front-liner* di RSUD yang menjadi lokus penelitian, ditemukan berbagai kondisi dalam lingkungan internal RSUD perlu dilakukan pembenahan



secara lebih serius untuk dapat mengimplementasikan model motivasi empat pilar ini secara berhasil. Terutama yang terkait dengan *shared value* yang telah terbangun dalam lingkungan internal organisasi, justru kondisi yang ada dikhawatirkan akan menjadi kesulitan utama atau bahkan penghambat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD melalui pengembangan sumberdaya manusianya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan Model Motivasi Empat Pilar sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan RSUD oleh *front-liner* membutuhkan tidak saja model struktur, sistem, sumberdaya, strategi, keahlian dan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi hal mendasar terkait dengan nilai-nilai budaya kerja yang terbangun dalam lingkungan organisasi menjadi *entry point* dalam pemanfaatan Model Motivasi Empat Pilar ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD melalui pengembangan sumberdaya *front-liner*-nya.

Keywords: *front-liner, rumah sakit umum daerah, 7s mckenssey, model motivasi empat pilar .*

PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG TIMBUL KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL PARA PEJABAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH

Hamirul

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.

Metode penelitian digunakan *Mixed Method* Triangulasi Konkuren, yaitu penelitian mendalam dengan cara menganalisis kedua metode baik kuantitatif maupun kualitatif kemudian keduanya di bandingkan sehingga masing-masing jenis patologi terlihat jelas kemudian diberikan terapi yang sesuai jenis patologi ini serta diharapkan pelayanan prima dapat terwujud dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi, pada penelitian ini untuk responden pegawai kantor pertanahan berjumlah 42 orang dan 10 *ordinary informan* dan 1 orang *key informan*.

Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi yang timbul karena Persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan biorkrasi, diantaranya: Pertentangan kepentingan, *Empire Building*, pilih kasih, bersikap sombong, ketidakpedulian terhadap kritik dan saran, kredibilitas yang rendah, ketakutan pada perubahan baik inovasi maupun resiko, penipuan, penggaburan masalah, menerima sogok.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau *one stop service*.

Keyword: *patologi birokrasi, pelayanan prima*



OPTIMALISASI FUNGSI *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT

Malse Yulivestra

Kehadiran teknologi tidak dapat dihindari atau *unavoidable*. Secara umum teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan, meskipun banyak permasalahan yang ditimbulkan dengan kehadiran teknologi ini. Terkait dengan perkembangan teknologi ini maka pemerintah sebagai salah satu actor penting dalam suatu Negara tidak bisa lepas tangan dan tidak peduli. Pemerintah harus mampu mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman bila tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Pada akhir-akhir ini sudah banyak pemerintah daerah yang sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam memaksimalkan pemberian pelayanan dan informasi kepada masyarakatnya, namun disisi lain masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga penggunaan teknologi oleh pemerintah daerah ini masih belum maksimal.

Terkait dengan permasalahan diatas maka perlu diteliti bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi dalam pemberian pelayanan dan informasi melalui *website* kepada masyarakat. Penelitian ini lebih detilnya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan *website* sebagai salah satu media pelayanan, komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dianalisis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam memaksimalkan fungsi *website* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan etik dan emik dalam merumuskan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, bahwa hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Barat telah memiliki *website* resmi pemerintahannya. Kedua, dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat termasuk Provinsi sendiri masih belum maksimal dalam mengembangkan dan memanfaatkan web sebagai media informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya. Ketiga, masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti; masalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, political will yang rendah, serta dukungan financial yang relative kecil. Sebagai factor dari masyarakat sendiri dimana masih minimnya kesadaran dan akses masyarakat akan teknologi terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan teknologi juga menjadi kendala. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan penyadaran bagi pemerintah akan pentingnya media *website* ini dalam mendukung optimalisasi peran pemerintah sehingga pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih dalam program pembangunannya.

Key words: *teknologi, website, pemerintahan daerah, sumatera barat*



**MASYARAKAT ADAT, ETNIS,
KEARIFAN LOKAL, SEJARAH**





MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	HASBULLAH MALAU	FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: SINERGI NILAI-NALAI ADAT DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
2.	RUBANGI AL HASAN, YUMANTOKO	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU LOMBOK NTB	HUTAN, MASYARAKAT, DAN EKOWISATA: INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN DAN PERANNYA DALAM KONSERVASI HUTAN DI SEKITAR OBJEK WISATA ALAM DI PULAU LOMBOK
3.	JOHANNES IBRAHIM KOSASIH	JURUSAN ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA	BANK SYARIAH DALAM AKULTURASI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI
4.	WIRDANENGSIH	UNP	PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI PENDIDIKAN PERGURUAN AWALIAH QURAN DENGAN TRADISI KHATAM QURAN DI DESA BALAI GURAH KECAMATAN IV ANGKEK SUMATERA BARAT)
5.	NURSYIRWAN EFFENDI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	KEBERADAAN WIRAUSAHAWAN ETNIK DALAM MEMBENTUK REALITAS BUDAYA EKONOMI DI PERKOTAAN: ANALISIS ANTROPOLOGI EKONOMI
6.	ALFARABI	UNIVERSITAS BENGKULU	RUSDIYAH CLUB
7.	ATEM	DEPARTEMEN SOSIOLOGI PASCASARJANA FISIP, UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG	MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI <i>LIFE SKILL</i> MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT
8.	IWAN PERMADI, DWI YONO	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI KONSTITUSI ASLI INDONESIA
9.	SRI MEIYENTI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU DALAM ADAT MATRILINEAL
10.	EDI INDRIZAL, MUHAMMAD ANSOR	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: REPRODUKSI IDENTITAS DAN RESISTENSI SIMBOLIK TERHADAP INTRODUKSI MAKANAN POKOK BERAS
11.	ACHMAD HIDIR, NUR LAILA MEILANI, HARAPAN TUA RFS	FISIP UNIVERSITAS RIAU	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>DESIGN THINKING</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR
12.	ISRAR	FIB UNIVERSITAS ANDALAS	DIMENSI BUDAYA DALAM PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT ERA REFORMASI
13.	M. RAWA EL AMADY	INSTITUT ILMU ILMU SOSIAL (SSI) RIAU	<i>TAUKE</i> : PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG



14.	UNDRI	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG	KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN
15.	SUSI FITRIA DEWI, ALIA AZMI	FIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG	GENEALOGIS TERRITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT
16.	INDRADDIN	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMBERDAYAAN INSTITUSI LOKAL UNTUK MENGELOLA POTENSI LOKAL
17.	SILVIA DEVI	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG	KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI <i>TEMPUNG</i> PADA MASYARAKAT REJANG
18.	ABDUL MUTOLIB	PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS	KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)
19.	YUNARTI, MAIHASNI, YULKARDI, SRI MEIYENTI	FISIP UNAND	KEMATIAN MATERNAL IBU: RIGIDITAS PROGRAM VERSUS INERSIA BUDAYA



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Sinergi Nilai-Nilai Adat Dan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat

Hasbullah Malau

Praktik desentralisasi umumnya dilandasi pemikiran yang bersifat birokrasi sentralistik sehingga dalam penerapannya terjadi keseragaman, baik struktur pemerintahan, pemerintahan, politik, kelembagaan, hukum, keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Namun, realitas variasi antar daerah yang satu dengan daerah lain sangat tidak memungkinkan untuk diterapkannya keseragaman.

Selain latar belakang sejarah dan hak asal usul daerah, penerapan desentralisasi dipengaruhi oleh identitas agama, bahasa, budaya, politik, geografi, ekonomi dan masalah etnik yang dapat melahirkan konflik. Namun, dalam praktek desentralisasi diharapkan adanya kesesuaian dan sinergi antara nilai-nilai adat dan nilai otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan kembali ke Nagari telah menimbulkan reorganisasi pemerintahan desa di Sumatera Barat. Hal ini menimbulkan perubahan yang dinamis dalam pemerintahan desa di Sumatera Barat dan pada akhirnya pemerintahan daerah memutuskan untuk kembali ke Pemerintahan Nagari. Dengan harapan adanya model sinergi antara nilai-nilai adat dan otonomi otonomi daerah pada pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Kata kunci: *sinergi, nilai-nilai adat, otonomi daerah.*

HUTAN, MASYARAKAT, DAN EKOWISATA Interaksi Masyarakat dengan Hutan dan Perannya dalam Konservasi Hutan di Sekitar Objek Wisata Alam di Pulau Lombok

Rubangi Al Hasan, Yumantoko

Hutan masuk dalam kategori sumberdaya milik bersama (*common pool resources*) sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hutan sendiri memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi perlindungan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tingkat interaksi masyarakat dengan hutan di Pulau Lombok, dan pandangan masyarakat terhadap hutan. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga lokasi yakni hutan di sekitar Air Terjun Sendang Gile, Air Terjun Kerta Gangga (Kabupaten Lombok Utara), dan Wisata Air Aik Nyet (Kabupaten Lombok Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Air Terjun Kerta Gangga lebih menekankan hutan pada fungsi konservasinya. Ini ditunjukkan dengan adanya upaya menjaga kondisi hutan agar tetap lestari dengan melakukan penanaman dan mencegah penebangan pohon. Upaya pelestarian hutan ini juga sebagai upaya melindungi objek wisata air terjun agar debitnya tidak berkurang. Sementara itu di Sendang Gile fungsi hutan ditekankan pada aspek ekologi dan sosial budaya. Hal ini terlihat dari upaya konservasi hutan dengan tidak melakukan penebangan. Dari



sisi sosial budaya masyarakat juga memandang bahwa hutan memiliki dimensi sakral dan memiliki unsur magi sehingga masyarakat tidak sembarangan melakukan aktivitas di dalam hutan (khususnya hutan adat). Pandangan masyarakat tersebut sekaligus berdampak pada terjaganya kelestarian hutan. Sementara itu masyarakat sekitar Wisata Air Aik Nyet lebih melihat hutan pada fungsi ekonominya. Indikasinya ditunjukkan dengan massifnya pemanfaatan hutan sebagai sumber ekonomi keluarga. Aktivitas ekonomi itu berupa pemanfaatan hutan untuk bercocok tanam tumpangsari dalam areal kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan pemanfaatan ekowisata pemandian yang berada di dalam kawasan hutan.

Kata kunci: *hutan, masyarakat, ekologi, ekonomi, sosial budaya.*

BANK SYARIAH DALAM AKULTURASI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI

Johannes Ibrahim Kosasih

Fenomena pendirian perbankan Syariah dimulai sejak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikarenakan prinsip syariah memberikan solusi alternatif di bidang keuangan. Bali merupakan salah satu potensi pasar bank syariah dan keunikannya telah memiliki budaya dan kearifan lokal di bidang lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di setiap Desa Pakraman. Penelitian tentang Bank Syariah di Bali untuk memberikan kontribusi perkembangan bank syariah yang bersentuhan dengan kearifan lokal dan berdampak terhadap akulturasi budaya, khususnya persepsi masyarakat di bidang keuangan pada era keterbukaan. Sebagaimana konsep Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan yang mengatakan bahwa “hukum sebagai sarana dalam merekayasa masyarakat”, tentunya kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan konsep perbankan syariah dapat memberikan hal yang positif dan alternatif pembiayaan selain dari perbankan konvensional. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan mengambil sampel penelitian pada bank nasional yang beroperasi di Bali dan bank lokal setempat yang menggunakan konsep syariah. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah dalam praktik di Bali seperti dua sisi mata uang, terdapat pihak yang menerima tetapi di sisi lain menolak. Belum banyak bank nasional syariah yang beroperasi dan melebarkan jaringan operasionalnya. Demikian juga bank lokal setempat baru terdapat satu yang beroperasi di Denpasar. Hal menarik dari penelitian ini ternyata nasabah yang menggunakan jasa bank syariah 60% (enam puluh persen) adalah masyarakat non muslim. Kehadiran bank syariah merupakan sebuah fenomena akulturasi budaya di bidang keuangan yang bertautan antara nilai-nilai islami yang meresap dengan budaya dan kearifan lokal.

Keywords: *bank syariah, akulturasi budaya, kearifan lokal, lembaga keuangan, masyarakat bali.*



PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Studi Pendidikan Perguruan Awaliyah Quran dengan tradisi khatam Quran
di desa Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Sumatera Barat

Wirdanengsih

Kearifan lokal disebut juga local wisdom dalam istilah asingnya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan atau pandangan hidup masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup baik secara materi maupun sosial dimana kearifan lokal ini menjadi titik penghubung dari generasi satu ke generasi berikut karena kearifan lokal merupakan konsep, ide dan gagasan yang senantiasa di tramsisikan kepada generasi berikut sehingga terbangun suatu kerasian dalam menata hidup dan lingkungan. Revitalisasi dari nilai lokal perlu dipertahankan pada masa kekinian ini dalam rangka keberlanjutan peradaban manusia dan kearifan lokal juga berguna dalam keangka poses pembentukan karakter anak bangsa. Alwasilah dkk (2009 ;53) menegaskan bahwa lembaga pendidikan selain sebagai agen pembaharu juga memproduksi nilai budaya atau kearifan lokal dan ini modal sosial dalam masyarakat. Untuk itulah proses kegiatan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal menjadi tuntutan yang perlu dibudayakan dan ini dapat menjadi sumber belajar bagi dunia pendidikan .untuk perlu mengali mendata dan menganalisis praktek pendidikan yang memiliki nilai kearifan lokal dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa.

Untuk membangun dan mengembangkan kepribadian manusia yang utuh ini dapat dilakukan dengan pendidikan budaya, pendidikan budaya melalui tradisi-tradisi yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi-tradisi yang memiliki nilai kearifan lokal dan nilai karakter baik .

Tujuan penelitian adalah menganalisis terapan nilai kearifan dan karakter baik yang tersosialisasi melalui tradisi Khatam Quran di nagari Balai Gurah kabupaten Agam Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran untuk mengaalisis kearifan local pada tradisi Khatam Quran adalah teori kepribadian dan kebudayaan yang dikembangkan oleh margareth Mead dan Ruth Benrdict dan konsep kearifan lokal serta Karakter yang dikaitkan dengan proses pendidikan nilai pada institusi pendidkan non formal, Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode EtnografikE

Kata kunci: *kearifan lokal, pendidikan, kebudayaan dan tradisi khatam Quran:*



KEBERADAAN WIRAUSAHAWAN ETNIK DALAM MEMBENTUK REALITAS BUDAYA EKONOMI DI PERKOTAAN Analisis Antropologi Ekonomi

Nursyirwan Effendi

Secara asumptif, terdapat hubungan erat antara kebudayaan dan ekonomi yang diperkuat oleh beberapa pendapat ahli seperti oleh Holton, 1992, dan Wilk, 2004. Relasi kedua dua konsep besar ini, dalam wujudnya, secara antropologis, diperlihatkan oleh perilaku ekonomi masyarakat yang terbelenggu di dalam sistem sosial dan budaya atau telah lama dikenal dengan isu *social embeddedness* (Granovetter, 1985) dan dipahami sebagai bagian dari proses sosial dan budaya dalam komunitas (Polanyi, 1944). Dalam prakteknya, sebagian wujud ekonomi memiliki identitas etnik/kesukubangsaan (Ndoen, 2004; Eriksen, 2005). Dengan dasar ini maka pada hakekatnya aktivitas ekonomi masyarakat dimanapun akan menjadi bagian dari dinamika sosial, budaya dan perkembangan komunitas dimana aktivitas tersebut berlangsung. Namun, aktivitas tersebut tidak memiliki figur dan penampilan yang seragam, melainkan beraneka ragam, yang dikuatkan dengan identitas budaya, khususnya karakteristik etnis. Pada konteks ini, realitas tersebut dipahami sebagai budaya ekonomi. Sementara, pelaku dari aktivitas ekonomi umumnya memiliki karakter etnis dan dikenal dengan istilah *ethnic entrepreneur*. Makalah akan berisi tentang hasil penelitian tentang eksistensi *ethnic entrepreneur* di dalam membentuk keanekaragaman aktivitas ekonomi di konteks perkotaan. Di asumsikan, bahwa wilayah perkotaan berisi aktivitas ekonomi yang monoton dengan ragam pelakunya, namun faktanya, pelaku ekonomi sangat bervariasi menurut karakter etnis yang sangat jelas terlihat. Makalah bertujuan menjelaskan tentang eksistensi *ethnic entrepreneur* yang dianggap sebagai inti dari terbangunnya budaya ekonomi perkotaan. Materi utama makalah adalah mendeskripsikan figur dari para *ethnic entrepreneur* dan menjelaskan karakter etnis mereka dalam membangun wujud budaya ekonomi di kota.

Kata kunci: *budaya ekonomi, ethnic entrepreneur, migran, jaringan bisnis, etnis.*

RUSDIYAH CLUB

Alfarabi

Rusdiyah Club adalah wadah cendekiawan yang berada di pulau Penyengat dan berada dalam kawasan kerajaan Melayu Riau-Lingga. Keberadaan club ini bertujuan untuk melepaskan diri kerajaan Melayu Riau-Lingga dari cengkraman kolonial Belanda. Club ini dipelopori oleh Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, dan Raja Abdullah. Anggota terdiri atas orang Minang, orang Arab, dan bangsawan Melayu Riau. Gerakan organisasi ini mencapai berbagai bidang, seperti agama, ilmu pengetahuan dan ekonomi yang kesemuanya digunakan sebagai perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Mempelajari perjuangan Rusdiyah Club berarti juga mempelajari penerapan strategi komunikasi yang mereka lakukan. Pentingnya media komunikasi begitu disadari oleh Rusdiyah Club sehingga



dalam perjuangannya mereka menerbitkan majalah Al Iman, membuat dan membagikan brosur serta menjadi tulang punggung Ahmadi Press di Singapura. Salah satu isu yang diangkat untuk membangkitkan perlawanan terhadap penjajah adalah dengan meminjam kemenangan Jepang atas Rusia. Isu ini dianggap penting karena bisa menjadi contoh kemenangan orang Asia terhadap bangsa Eropa. Kesadaran bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak terkesima dengan negara-negara yang dianggap maju merupakan sebuah jalan yang diperjuangkan oleh Rusdiyah Club. Berangkat dari perjuangan Rusdiyah Club di masa lampau, maka strategi hegemoni melawan kolonialisme baru bisa diadaptasi saat ini. Jika dahulu Rusdiyah Club bisa, maka saat ini tentu juga bisa.

Kata kunci: *rusdiyah club, hegemoni, komunikasi*

MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI *LIFE SKILL* MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Atem

Hampir seluruh wilayah perbatasan yang ada di Indonesia termasuk daerah tertinggal di berbagai aspek. Kondisi itu menempatkan masyarakat perbatasan pada posisi keterpurukan dengan tingkat sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi yang rendah, namun pada dasarnya daerah-daerah perbatasan merupakan wilayah yang strategis karena memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat diolah dan dikembangkan. Sama halnya dengan lima kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Keterbatasan yang dihadapi dan potensi sumber daya baik manusia maupun alam yang ada belum dikelola dengan baik menjadi alasan munculnya model pemberdayaan masyarakat yang lebih transformatif dalam mengembangkan dan merekonstruksi *lifeskill* masyarakat melalui sekolah komunitas perbatasan. Pengembangan model ini mengedepankan pembangunan dalam aspek kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang, guna mengatasi dan mengantisipasi potensi konflik agraria, degradasi hutan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perbatasan. dan membangun kesadaran serta *vokasi skill* masyarakat perbatasan dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Model pemberdayaan dengan mengedepankan potensi sumber daya yang lokal yang ada di kelola melalui sistem edukasi pada masyarakat tanpa mengesampingkan partisipasi mereka yang akan diberdayakan. Adapun tujuan penulisan ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan model pemberdayaan alternatif yang transformatif masyarakat berbasis sekolah komunitas perbatasan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.

Kata kunci: *pemberdayaan, masyarakat, sekolah komunitas perbatasan*



KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI KONSTITUSI ASLI INDONESIA

Iwan Permadi, Dwi Yono

Masyarakat adat yang keberadaannya lebih dulu sebelum lahirnya Negara Indonesia harusnya mempunyai peranan yang utama dalam pembangunan dan konstruksi ketatanegaraan Indonesia, yang menjadikan identitas asli Indonesia adalah keberaneka ragam suku-suku dan masyarakat adat di Indonesia, keberadaannya yang beraneka ragam mempunyai tata kelola pemerintahan yang khas dan lebih modern dari keberadaan Negara-negara demokrasi di barat serta kemajuan masyarakat adat di Indonesia harusnya menjadi sumber inspirasi penyusunan konstitusi Indonesia. Setelah terjadinya reformasi, kebebasan seakan tak terbatas sehingga dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam penelitian ini kita akan membahas bagaimana Negara Mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan dan hukum dari masyarakat adat untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan antropologi serta filsafat untuk menganalisisnya, dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan untuk menganalisisnya, maka akan didapat bahwa Negara kita belum mengadopsi nilai-nilai adat untuk pembangunan Indonesia, sehingga masih belum bisa menjiwai pengelolaan pemerintahan dan tata Negara untuk Indonesia yang satu, yang menyatukan secara utuh masyarakat di dalamnya dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: *masyarakat adat, nilai ketatanegaraan, konstitusi asli*

DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU DALAM ADAT MATRILINEAL

Sri Meiyenti

Masyarakat Minangkabau dengan adat matrilinealnya mengakibatkan kaum laki-laki memiliki status dan peran yang dilematis. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di dalam kerabat dan kaumnya yang disebut dengan *mamak kaum*. Sebagai pemimpin ia memiliki kewajiban atau peran yang berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabat atau kaumnya. Akan tetapi, di sisi lain ia tidak memiliki hak penuh atas sumberdaya ekonomi kaum kerabatnya. Sumberdaya ekonomi kerabat justru menjadi hak kaum perempuan yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia hanya berhak mengelola yang hasilnya adalah untuk menghidupi kaum kerabatnya tersebut.

Dilema ini makin menguat, di mana saat ini, laki-laki masih berstatus sebagai *mamak kaum*, akan tetapi peran atau kewajiban sosial ekonominya terhadap kaum kerabatnya sudah mulai melemah. Bisa dikatakan tidak ada lagi laki-laki Minangkabau yang mengelola harta pusaka kaum kerabatnya. Hal ini terjadi seiring menguatnya peran ayah dalam kehidupan sosial ekonomi anak dan istrinya. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan laki-laki Minangkabau semakin tidak memperoleh hak dari harta kaum kerabatnya, karena harta yang dikelola oleh mamak sudah beralih dikelola oleh suami dari saudara perempuan dan kemenakan perempuannya yang merupakan pemegang kuasa atas harta tersebut.

Kata kunci: *adat, matrilineal, status, dan peran*



POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI Reproduksi Identitas dan Resistensi Simbolik terhadap Introduksi Makanan Pokok Beras

Edi Indrizal, Muhammad Ansor

Artikel hendak membahas pengalaman negosiasi orang Mentawai terhadap kemasan modernitas lewat introduksi pangan pokok beras dan cetak sawah untuk bercocok tanam padi yang diperkenalkan 'the other' terhadap mereka. Tulisan berargumen bahwa praksis modernitas orang Mentawai hari ini sesungguhnya merupakan ekspresi perlawanan kultural terhadap kemasan modernitas yang dipromosikan 'the other' di lingkungan mereka itu. Pertama-tama kami mendeskripsikan konstruksi modernitas yang dikemas negara melalui kebijakan ketahanan pangan dan sejumlah faktor penting terkait pelaksanaannya di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dipaparkan negosiasi orang Mentawai terhadap kemasan modernitas tersebut dengan berfokus pada performa perlawanan kultural sehari-hari. Pemaparan disajikan berdasarkan kombinasi tiga teori sosial kritis, yakni power relation (Michel Foucault), agency (Pierre Bourdieu), dan hidden transcripts (James C. Scott). Data dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian tentang kearifan lokal dan peluang penguatan ketahanan pangan masyarakat di Kepulauan Mentawai yang dilakukan selama 2015-2016. Tulisan ini akan menjelaskan dua agenda yang bersifat praksis dan teoritis. Pertama, kemampuan komunitas suku asli Mentawai merumuskan modernitas menurut versi mereka yang otonom dalam mendefinisikan identitas di tengah gempuran "paksaan" modernitas. Kedua, pemaparan menunjukkan interkoneksi dan saling melengkapi antara konsep power relation, agency, dan hidden transcript, dalam menjelaskan narasi perlawanan kultural orang Mentawai, salah satu indigenous community di Indonesia.

Keyword: *indigenous community, packing modernity, orang mentawai di sumatra barat.*

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *DESIGN THINKING* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Achmad Hidir, Nur Laila Meilani, Harapan Tua RFS

Akar permasalahan gender gap bidang pendidikan adalah masih lemahnya komitmen dan pemahaman tentang gender di Kabupaten Rokan Hilir (Hidir & Yanis, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan/mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat berbasis design thinking dalam rangka mewujudkan pendidikan responsif gender di Kabupaten Rokan Hilir; (2) memformulasi desain pendidikan responsif gender yang kontekstual di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi. Unit analisisnya adalah komunitas kelembagaan Dinas Pendidikan dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dengan teknik analisis data berupa tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi design thinking



memungkinkan terwujudnya perubahan sosial khususnya mindset kelompok sasaran secara bottom up. Artinya bahwa komitmen dan pemahaman atas pendidikan yang responsif gender dapat ditingkatkan dari tingkat akar (grass root) tanpa memaksakan kelompok sasaran untuk mengubah nilai-nilai original lokalitas daerahnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mampu mendorong perubahan sosial yang smooth dan konstruktif untuk pembangunan daerah Rokan Hilir khususnya di bidang pendidikan dan gender.

Kata kunci: *pemberdayaan, gender, pendidikan*

DIMENSI BUDAYA DALAM PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT ERA REFORMASI

Israr Iskandar

Mengapa daerah yang budayanya notabene egaliter dan demokratis, ternyata korupsi juga marak terjadi? Mengapa korupsi yang identik dengan budaya asertif-maskulinitas juga menjangkiti etnis yang notabene mengagungkan posisi perempuan? Itulah beberapa pertanyaan krusial terkait banyaknya kasus korupsi yang terungkap di Sumbar di era reformasi. Korupsi tak hanya dilihat sebagai peristiwa (pelanggaran) hukum atau penyimpangan politik atau *moral hazard* dalam ekonomi, tetapi juga bisa dilihat dalam dimensi budaya. Hal itu tidak hanya karena peristiwa-peristiwa pengungkapan kasus korupsi dibumbui peristiwa-peristiwa budaya, seperti peristiwa kunjungan Ketua LKAAM terhadap terpidana korupsi di penjara; pembelaan tokoh-tokoh adat terhadap tersangka korupsi. Tetapi juga terkait dengan fenomena di aras masyarakat yang juga sarat dengan perilaku koruptif. Penelitian ini mengungkap bahwa kacaunya sistem (penegakan) hukum telah menisbikan potensi budaya antikorupsi yang ada di kalangan masyarakat Minangkabau sendiri.

Kata kunci: *budaya korupsi, antikorupsi, minangkabau*

TAUKE: PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG

M.Rawa El Amady

The study on the culture of debt in an effort to develop strategies to respond to the socio-cultural change in the village of Parit Baru, Kampar Riau. Parit Baru village was an isolated village but after 2005 turned into a suburban village which can be accessed easily.

Changes affecting the position of the *tauke* in the village, which is of six *tauques*, five bankrupt and only one *tauke* survived. This study used a qualitative approach to obtain the data and interpret the data, where *toke* as a major subject in this study. *Tauke* that survive are capable of reproducing the culture of debt and build some of the following strategies; *first*, change the pattern of the relationship



with the *anak semang*, from a strict pattern, pattern to the exclusive network consisting of a group toke, factory and village authorities to set prices. *Second*, *tauke* reproduce the debt culture and producing consumptive lifestyle.

The study revealed that; *first*, the changing patterns of trade *tauke* can be a window to understanding global capitalism, that the state should be dynamic centers on the periphery and semi-periphery, because the periphery has had extensive access and has a choice of economic and political independence. *Second*, *tauke* can explain that global capitalism must have consciousness on local culture to build a wider network of commodities. That the political and economic networks should pay attention to local culture that values consumerism is present in remote villages.

Keyword: *social-economic change, trading network and debt culture.*

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Undri

Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi topik bahasan menarik dibicarakan baik pada tingkat lokal, nasional dan global. Sebab disatu sisi masyarakat mempunyai kearifan lokal, terutama dalam pengelolaan hutan, serta disisi lain ternyata masih banyak kearifan lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang menopang akan keberlangsungan pengelolaan hutan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kegagalan pengelolaan hutan yang dikembangkan selama ini yang menyebabkan kerusakan ekologi, kemiskinan dan kehancuran sistem budaya masyarakat. Kemudian, semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan sebagai akibat berbagai faktor perilaku manusia, kepunahan pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal mengalami pelunturan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya kelestarian sumberdaya alam.

Salah-satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang berasal dari peserta program transmigrasi pada tahun 1986. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman transmigrasi tersebut. Selain itu, ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung.

Hutan di daerah Tabala Jaya merupakan hutan desa dengan luas lebih kurang 17.827 hektar sampai sekarang masih tetap eksis dan tidak terjadi pengurangan. Lain halnya di daerah lainnya, menurut data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tahun 1994 luas kawasan hutan di Sumatera



Selatan mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4.25 hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2003, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan tinggal hanya 3.77 juta hektar (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003). Hal tersebut disebabkan, seperti praktik-praktik penebangan hutan, terutama yang ilegal (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

Uniknya, bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.

Bertitik total dari persoalan di atas, kajian yang menggunakan metode penelitian sejarah ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan, mulai dari bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan, faktor-faktor yang menentukan eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dalam pengelolaan hutan serta pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: kearifan lokal, pengelolaan hutan dan desa tabala jaya.

GENEALOGIS TERRITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT

Susi Fitria Dewi, Alia Azmi

Terinspirasi dari pernyataan Brunet-Jailly (2005) bahwa pengkajian wilayah perbatasan tidak terlepas dari *The specific cultures of borderland communities*, maka tulisan ini menelusuri bagaimana realita konsep genealogis territorial pada dua Nagari yang sedang bersengketa wilayah perbatasan adat, yakni Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung Sumatera Barat. Dua temuan penulis adalah *pertama*, Nagari yang mendasarkan batas wilayah adatnya pada historiografi tradisional lebih kuat dalam memelihara ikatan genealogis territorial, yakni (1) berfungsinya penghulu (2) terdapatnya ranji (3) tercapainya kesepakatan wilayah adat. Ketiga prinsip ini penulis namakan trilogy genealogis territorial. *Kedua*, Nagari yang menerapkan kelarasan koto piliang lebih menjamin terlaksanakannya pewarisan gelar datuk. Hal ini dikarenakan prinsip *bapuntiang di tanah nan sirah* menjadikan kewajiban bagi penghulu untuk menyiapkan penerus gelar Datuknya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan masyarakat adat (penghulu bergelar Datuk), mengadakan focus group discussion dengan anggota kaum dan meneliti berbagai dokumentasi berkaitan dengan surat pernyataan wilayah kaum dan ranji yang dimiliki masyarakat adat.

Keywords: genealogis, territorial, datuk, ranji, tanah ulayat



PEMBERDAYAAN INSTITUSI LOKAL UNTUK MENGELOLA POTENSI LOKAL

Indraddin

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menuai kritikan, alasan yang muncul di masyarakat adalah masih banyaknya jumlah keluarga miskin yang ada di lingkungan mereka. Ketika Masalah kemiskinan masih belum teratasi pada masyarakat, akan berdampak negatif terhadap aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, politik, lingkungan, keamanan dan kenyamanan hidup. Pengiriman remitan oleh para migran dari tempat bekerja yang cukup tinggi, sangat membantu program, tentu saja apabila remitan dikelola dengan baik tidak hanya untuk keperluan konsumtif tetapi lebih pada keperluan produktif. Penelitian ini difokuskan pada kiat pemberdayaan institusi lokal sehingga mampu mengelola potensi lokal yang ada di lingkungan mereka. Potensi lokal dalam penelitian ini adalah remitan yang berasal dari perantau asal Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai panduan diteropong dari sudut pandang teori strukturasi dari Anthony Giddens, didukung dengan konsep-konsep pemberdayaan. Mengambil kasus remitan asal perantau Sumatera Barat, ditemukan bahwa pemberdayaan institusi lokal sangat dibutuhkan untuk tujuan keberlanjutan program pemberdayaan, karena orang luar sebagai pemberdaya memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melakukan suatu program pengentasan kemiskinan. Kiat dalam pemberdayaan institusi lokal juga sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang dapat menjamin kesinambungan program di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi institusi yang strategis diberdayakan dari segi keberadaannya di tengah masyarakat baik dari segi sumberdaya maupun dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Kata kunci: *pemberdayaan, institusi lokal, strategi sosial, potensi lokal*

KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI *TEMPUNG* PADA MASYARAKAT REJANG

Silvia Devi

Tradisi tempung sematen ngen ngenyan merupakan sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku bangsa Rejang Propinsi Bengkulu yang mengandung budi bahasa, sopan santun dan tata cara kehidupan yang mengandung nilai yang tinggi. Tradisi ini berkembang ditengah kemajuan zaman serta teknologi yang pesat. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui bentuk kearifan lokal apa saja yang terkandung dalam syair tempung tersebut dan apa fungsi dari pelaksanaan tradisi tempung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, wawancara dan observasi. Tulisan ini menggambarkan bahwa tradisi *tempung* masyarakat Rejang merupakan suatu upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman dan sekaligus menjaga kelestarian kosmos (alam semesta beserta isinya). Dapat disimpulkan bahwa melalui upacara diharapkan bisa memberikan keselamatan baik lahir maupun batin para peserta upacara. Adapun fungsi dari tradisi tempung ini mengandung fungsi sosial dan fungsi spiritual bagi masyarakat pendukungnya yakni suku bangsa Rejang.

Kata kunci: *kearifan lokal, tempung sematen ngen ngenyan, masyarakat Rejang*



KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT Studi Kasus pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat

Abdul Mutolib

Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya. Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuk penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya “*alas hak*” sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Kata kunci: *konflik agraria, pluralisme hukum, alas hak, tanah ulayat, KPHP*

KEMATIAN MATERNAL IBU Rigiditas Program Versus Inersia Budaya

Yunarti, Maihasni, Yulkardi, Sri Meiyenti

Persoalan kematian ibu karena hamil bersalin di Indonesia masih merupakan masalah yang belum terpecahkan secara konsisten. Saat ini dalam Rancangan Tekhnokratis dan Renstra Kemenkes 2015-2019, pemerintahan RI kembali meletakkan persoalan kesehatan reproduksi dan KB serta kesehatan ibu dan anak sebagai skala prioritas tinggi diantara 10 *leading sector* pembangunan bidang kesehatan. Pada renstra ini di publikasikan secara resmi bahwa angka kematian ibu (AKI) Indonesia tahun 2014 adalah 346 dan ditargetkan dapat ditekan hingga 306 pada tahun 2019. Angka ini jauh dari target MDG's yang dicanangkan pemerintah sebelumnya yaitu 102 / 100.000 kelahiran hidup yang sebelumnya dicanangkan hendak dicapai tahun 2015.

Tujuan intervensi berbagai program kesehatan maternal adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bersalin dan diukur melalui 6 indikator pemantauan cakupan pelayanan kebidanan. Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan cakupan kunjungan konsultasi ibu hamil ke tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan namun faktor penyulit persalinan yang berakhir dengan kematian ibu masih merupakan ancaman serius.



Temuan riset menunjukkan bahwa perilaku perawatan kehamilan persalinan yang di perlihatkan ibu merupakan suatu rangkaian kombinasi dimana sebagian dari praktek dalam program di adopsi disamping praktek-praktek lokal yang masih terus dipertahankan. Dalam interpretasi sosial kultural ibu, pengadopsian parsial itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis yang nilai kompensasinya paling mungkin mereka tanggung. Sementara dalam interpretasi medis hal ini merupakan suatu kegagalan. Pemanfaatan pelayanan kebidanan di polindes, pustu dan puskesmas belum memperlihatkan hasil memuaskan pada program pemeliharaan dan perawatan yang justru merupakan diktum penting program kesehatan ibu hamil bersalin.

Pendekatan program dipacu dengan target cakupan yang terlihat berhasil namun mungkin memberi informasi keberhasilan yang 'bukan sebenarnya' karena capaian dengan standar-standar kuantitatif tidak diiringi dengan perubahan berkualitas terhadap sistim mental pengguna program. Tingginya angka akses ibu hamil bersalin terhadap program yankes KIA masih merupakan *pseudoparticipation*, partisipasi semu yang menunjukkan keterlibatan ditingkat permukaan. Track yang akhirnya tersedia bagi program adalah bekerja demi tujuannya sendiri namun belum menyentuh perubahan mendasar dalam kognisi dan sistim mental masyarakat pengguna.

Keywords: *kematian ibu; program yankes KIA; budaya Minangkabau*



**KOMUNIKASI, MEDIA,
BAHASA, SASTRA**





KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SASTRA

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	NOVIETA HARDEANI SARI, FENTY ASMARA	JURUSAN ILMU KOMUNIKASI, FISIP, UNIVERSITAS NASIONAL	MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID
2.	MEILANI DHAMAYANTI	DOSEN KOMUNIKASI DI BINUS (BINA NUSANTARA)	KOMUNIKASI PENDIDIKAN GENDER PADA ANAK-ANAK (STUDI KASUS KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK TK-SD)
3.	RACHMANIAR, PUJI PRIHANDINI	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN	TELEVISI DAN TAYANGAN <i>LIVE</i> SEPAK BOLA (STUDI ETNOGRAFI TENTANG KEBERADAAN MEDIA MASSA TELEVISI DAN TAYANGAN <i>LIVE</i> SEPAK BOLA)
4.	ELVA RONANING ROEM	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA <i>ONLINE</i> PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG
5.	GUSDI SASTRA, ROBY JOI EKOVAI	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNA GRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL RINGAN
6.	TRI UDAYANI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	MEDIA DAN PENGATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015
7.	EVIE ARIADNE SHINTA DEWI	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNPAD	<i>ECO VILLAGE</i> & PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG
8.	ISNAINI MUALLIDIN, MUKTI FAJAR DEWANTO, LELI JOKO SURYONO	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	KEBIJAKAN CRS OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN BARU (NEW INSTITUTIONALISM): STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
9.	YAYUK LESTARI	FISIP UNAND	<i>CIVIC ENGAGEMENT</i> LEWAT MEDIA ONLINE DI KALANGAN ANAK MUDA KOTA PADANG
10.	MULYANTI SYAS	IAIN IMAM BONJOL	MEDIA MASSA DAN KARAKTER BANGSA
11.	DESY MARDHIAH	FISIP UNIVERSITAS NEGERI PADANG	AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
12.	RIKA WIDAWATI, ANI RACHMAT	UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA BANDUNG	PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA
13.	KHAIRIL ANWAR	FIB UNAND	ANTARA REALITA DAN FIKSI: PARADIGMA SOSIOLOGI DALAM KAJIAN SASTRA
14.	YESI PUSPITA	FISIP UNAND	<i>PLACE BRAND</i> MUSEUM ADITYAWARMAN PADANG: STUDI KASUS <i>BRAND AWARENESS</i> PENGGUNA TAMAN MELATI MUSEUM SEBAGAI TEMPAT MESUM
15.	REVI MARTA	FISIP UNAND	STRATEGI <i>NEW MEDIA</i> OLEH HUMAS PEMERINTAH: STUDY TENTANG PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN KAIN TENUN SONGKET SILUNGKANG OLEH HUMAS KOTA SAWAHLUNTO



MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID

Novieta Hardeani Sari, Fenty Asmara

Tujuan utama dari program literasi media KPID adalah meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isi tayangan televisi yang dinilai negatif. Namun untuk mencapai tahap kritis itu diperlukan sebuah proses internalisasi kognitif didalam masing individu-individu yang ikut berpartisipasi didalam proses diskursus yang berjalan. Makalah ini memaparkan model diskursus deliberasi yang dibuat dengan menerapkan pola manipulasi pesan didalam program kerja literasi media KPID – termasuk didalamnya retorik, karakter pesan dan konteks dan kanal media yang di gunakan untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang isi tayangan televisi yang dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang mendukung literasi media yang terjadi melalui proses self-referencing yang dapat menciptakan daya kritis yang terhubung dengan kekuatan solidaritas diantara partisipan diskursus – civic engagement, untuk mencegah meluasnya pornografi, kekerasan dan mendorong pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan isi media yang lebih berkualitas. Hal ini menarik karena, banyak pihak yang belum memahami esensi penting dari penerapan diskursus deliberasi dan manipulasi pesan didalam sebuah ide sosialisasi kebijakan yang berjalan. Dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, dilakukan penelusuran pendekatan wacana teori (grounded theory), dan analisa studi kasus program literasi media KPID DKI Jakarta 2013-2014. Dengan tujuan memperoleh sebuah thick description dari konsep diskursus deliberasi, yang dapat memberi bobot pada sebuah rancangan produk kebijakan literasi media dan sistem tata kelola yang berkualitas dan aplikatif. Keefektifitasan model dikursus deliberasi ini masih perlu diuji lebih lanjut secara konseptual, eksperimental dan inovasinya pada riset-riset ilmu sosial kedepannya.

Kata kunci: *literasi media, diskursus deliberasi, pesan manipulasi, civic engagement*

KOMUNIKASI PENDIDIKAN GENDER PADA ANAK-ANAK Studi Kasus keluarga yang Memiliki Anak TK-SD

Meilani Dhamayanti

Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Kualitas komunikasi keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan kepribadian positif anak anaknya. Pendidikan gender yang diberikan di usia dini akan memberi pengaruh positif bagi jati diri seorang anak, misal : pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan, pendidikan, pembagian kerja dan lain-lainnya. Tujuan mini riset ini adalah untuk mengetahui sejauhmana orangtua melakukan komunikasi pendidikan gender pada anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan teori-teori komunikasi pendidikan dan gender. Mini riset ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data mewawancarai beberapa keluarga yang memiliki anak anak yang usia sekolah TK hingga SD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak semua keluarga memiliki pemahaman tentang pendidikan



gender. Banyak faktor yang mempengaruhi orangtua dalam memberikan pendidikan gender pada anak-anaknya. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya orangtua memberikan pengenalan tentang gender sejak anak usia dini. Karena hal ini memberi banyak pengaruh positif pada anak-anak.

Keyword: *komunikasi, gender, anak-anak*

TELEVISI DAN TAYANGAN *LIVE* SEPAK BOLA **Studi Etnografi tentang Keberadaan Media Massa Televisi dan Tayangan Live Sepak Bola**

Rachmaniar, Puji Prihandini

Ada yang mengatakan bahwa munculnya media baru, seperti internet membuat keberadaan media massa, seperti televisi lambat laun akan ditinggalkan oleh khalayak. Namun kenyataannya, harus diakui ada beberapa tayangan televisi yang masih dinanti kehadirannya oleh khalayak, salah satunya adalah tayangan live sepak bola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi, dan keberlangsungan tayangan live sepak bola di televisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk mengetahui antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi dan keberlangsungannya. Objek utama dari penelitian ini yaitu berbagai macam tayangan live sepak bola di televisi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi partisipatif, dan studi literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi masih cukup tinggi, terutama pada tayangan-tayangan live yang menampilkan big match antara dua kesebelasan, baik pada kompetisi sepak bola nasional maupun internasional. Keberlangsungan tayangan live sepakbola terus hingga sekarang.

Kata kunci: *televisi, tayangan live sepak bola, studi etnografi*

STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA *ONLINE* PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG

Elva Ronaning Roem

Munculnya media online seperti facebook, Path, Twitter, Instagram, serta pesan instan melalui WhatsApp, Blackberry Messenger (BBM) saat ini juga dimanfaatkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Padang. Pemanfaatan teknologi ini diyakini ampuh untuk menggaet pelanggan yang cenderung bersifat tertutup atau terselubung dalam transaksi bisnis esek-esek di nagari Ranah Minang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melibatkan 15 orang PSK di Kota Padang. Hasil penelitian menyatakan, media online merupakan media yang efektif untuk melakukan promosi prostitusi. Dalam pemanfaatan teknologi ini, PSK cenderung menggunakan dua jenis media sosial yaitu facebook, dan twitter. Setelah komunikasi terjalin dengan pelanggan, komunikasi dilanjutkan



lewat pesan instan seperti WhatsApp, dan BBM. Proses pemanfaatan media sosial ini dimulai dalam 4 (empat) tahapan proses. Pertama, komunikasi, kedua, penawaran, ketiga adalah transaksi dan keempat menjalin hubungan (relationship). Strategi ini diyakini ampuh oleh PSK, karena sedikit menimbulkan resiko tertangkap oleh aparat Satpol PP. Strategi ini juga diyakini efisien, karena PSK juga tidak letih untuk menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan seperti yang dilakoni selama ini di kawasan Taman Melati.

Kata kunci: *strategi komunikasi, media Online, pekerja seks komersial*

MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNA GRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL RINGAN

Gusdi Sastra, Roby Joi Ekovani

Makalah ini membahas tentang model terapi wicara untuk peningkatan kemampuan berkomunikasi anak penderita tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu model dengan pendekatan neurolinguistik sehingga terjadi komunikasi verbal antarpenderita, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan teknik pancing terstruktur. Subjek penelitian adalah anak tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan yang tinggal dan belajar di panti sosial tuna grahita Kalumbuk Kota Padang dalam kategori kelas mampu didik. Berdasarkan pemahaman aspek teoritis dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap penderita tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan, maka ditemukan bahwa kemampuan verbalnya secara fonologis mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan anak normal, yaitu pada tiga tingkat kemampuan; sudah dikuasai dengan sempurna (S), dikuasai secara belum sempurna (BLS), dan belum dikuasai sama sekali (BLD). Pada tingkat S, anak mampu melafalkan bunyi /p, b, h, c, j, ñ, l, y, w, pada tingkat BLS; /t, d, k f, m, n, ŋ, sedangkan pada tingkat BLD adalah bunyi /v, g, s, z, r,x. Disabilitas fonem tersebut sulit diperoleh secara alami, baik pada tataran kata apalagi pada tataran kalimat sejak penderita masuk usia sekolah, sedangkan pada anak normal mampu memproduksi fonem pada tingkat frase dan kalimat secara tepat. Dengan menerapkan model terapi wicara yang disusun secara neurolinguistik, telah ditemukan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berbicara anak penderita tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan, yaitu meningkatnya grafik abilitas verbal anak melalui peningkatan jumlah kosakata, ketepatan leksikal, dan kebenaran makna. Indeks lingual tersebut sangat signifikan sebagai upaya terapi wicara terhadap anak tuna grahita yang mengalami disabilitas verbal. Test PICA terhadap abilitas verbal anak yang ditabulasikan melalui metode terapi terdapat peningkatan yang signifikan dari waveform gelombang bunyi pada speech analyzer praterapi dengan pascaterapi. Adanya peningkatan kemampuan berbicara melalui metode terapi perilaku, membuktikan bahwa anak penderita tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan dapat ditingkatkan kemampuan komunikasinya meskipun anak mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Dengan demikian model ini dapat dipakai untuk peningkatan komunikasi penderita tuna grahita secara neurolinguistik.

Keyword: *tuna grahita, disabilitas verbal, waveform gelombang, speech analyzer.*



MEDIA DAN PENGATURAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

Tri Udayani

Delapan belas tahun setelah era reformasi berlalu, Indonesia masih dipercaya berada pada jalur melaksanakan konsolidasi dalam menjalankan demokrasi. Sebuah hal yang memang masih menjadi harapan terbesar agar proses demokrasi tidak berjalan mundur sehingga reformasi yang telah diperjuangkan bersama-sama harus menjadi sebuah hal yang sia-sia. Salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam proses ini adalah media massa. Media massa yang menjadi salah satu elemen yang merasakan manfaat dari era reformasi yang menjadikan media sebagai pihak yang tidak terkekang lagi seperti yang terjadi di era kepemimpinan yang sebelumnya.

Namun, pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi ketika media yang ada lebih banyak melayani hasrat akan kekuasaan dibandingkan menyajikan informasi yang berpihak kepada masyarakat. Hal ini secara vulgar diperlihatkan oleh dua media nasional yang secara nyata menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu calon pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Masyarakat dipaksa untuk menyaring sendiri informasi yang didengarnya dari media tersebut. Inilah yang menjadi salah satu penyebab dari dikeluarkannya Peraturan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih menertibkan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015. Dengan aturan yang jelas, pelaksanaan kampanye dirasa jauh lebih tertib dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu turunnya angka partisipasi masyarakat dan ini juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015. Kedepannya, diperlukan formula yang tepat dalam mengatur pelaksanaan tahapan kampanye pada pelaksanaan pemilihan umum.

Kata kunci: media, kampanye dan tingkat partisipasi

ECO-VILAGE & PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG

Evie Ariadne Shinta Dewi

Salah satu persoalan krusial yang harus diantisipasi beberapa tahun ke depan oleh masyarakat Jatiningor adalah krisis air tanah, yang diakibatkan oleh adanya miss management Sumber Daya Air dan Lingkungan yang selama ini dilakukan tidak hanya oleh masyarakat tetapi mungkin saja termasuk di dalamnya pemerintah dan pelaku ekonomi bisnis di kawasan Jatiningor, sebagai akibat dari kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan.

Konsep Ecovillage merupakan solusi dari persoalan tersebut, sehingga rencana menjadikan desa Sindang Sari sebagai Eco Village meliputi pelibatan masyarakat untuk secara aktif menjadi bagian dari perencanaan berbagai aspek pendukung dan penopang kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial dan budaya juga terutama ekonomi berbasis pertanian dan perikanan.



Penelitian ini mencoba menggali peran Ilmu Komunikasi dalam upaya pelibatan masyarakat agar memiliki awareness terhadap masalah lingkungan terutama konservasi air. Penggalan data meliputi pemaknaan dan motif masyarakat Desa Sindang Sari terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta harapan kehidupan mereka di masa depan.

Menggunakan metode action research, kami berusaha mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Dengan pengembangan konsep Eco Village ini diharapkan dapat menciptakan Desa Sindang Sari sebagai daerah konservasi air sekaligus sebagai desa yang mandiri dalam hal ekonomi karena masyarakat memiliki keunggulan komoditas Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kata kunci: *ilmu komunikasi, eco-village, action research, konservasi air.*

KEBIJAKAN CRS OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN BARU (NEW INSTITUTIONALISM) Studi di DIY dan Provinsi Jawa Tengah

Isnaini Muallidin, Mukti Fajar Dewanto, Leli Joko Suryono

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif kelembagaan baru.. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jateng secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua, Kebijakan CSR oleh pemerintah daerah dengan dalam persktik kelembagaan baru masih bersifat regulatif sedangkan kognitif dan kultur belum menguat.

Keyword: *kebijakan CSR, pemerintah daerah, kelembagaan baru (new institutionalism)*

CIVIC ENGAGEMENT MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE DI KALANGAN ANAK MUDA KOTA PADANG

Yayuk Lestari

Idealnya, melalui media masyarakat bisa memperoleh, membangun sekaligus menyebarkan wacana atau opini yang dianggap penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Media secara tidak langsung telah menghubungkan masyarakat dengan isu-isu publik (public concerns) tanpa dibatasi jarak dan waktu. Lewat social media misalnya, sebuah isu bisa cepat berkembang dan dibicarakan secara massal. Namun dari hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap



media, terutama media konvensional. Media dianggap tidak netral atau ditunggangi oleh kepentingan. Hal ini membuat masyarakat semakin menjauh dengan isu-isu publik, terutama anak muda yang memilih untuk mengkonsumsi konten non-politik. Hasil dari penelitian kami memperlihatkan kecenderungan masyarakat lebih mengkonsumsi konten di media massa yang membahas tentang kriminalitas, gossip dan isu sosial

Salah satu indikasi keterasingan masyarakat di Kota Padang dengan isu-isu publik adalah ketika pemilihan umum atau daerah mereka tidak berinisiatif untuk mencari informasi tentang pilihan dan informasi politik. Fenomena enggan masyarakat terlibat aktif dalam bertindak atau hanya sekedar mencari informasi juga terlihat pada Pilkada daerah salah satunya di Pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Pada pilkada ini angka Golput mencapai 41,38%. Keengganan masyarakat untuk terlibat atau mencari tahu informasi yang berkaitan dengan isu-isu publik juga bisa dilihat dari bagaimana mereka mengkonsumsi media. Keterlibatan individu akan isu-isu publik biasanya dimulai dari kegiatan memperoleh informasi melalui media dan membicarakan atau mendiskusikannya dengan orang lain baik dalam ruang nyata (tatap muka) maupun dalam ruang virtual (melalui sosial media). Kegiatan ini akan membentuk ruang publik (public sphere) yang akhirnya mendorong keinginan seseorang baik secara individu maupun kolektif untuk mengetahui lebih dalam, terlibat/berorientasi dan bertindak lebih jauh terhadap isu tersebut.

Kata kunci: *civic engagement, media online, kota Padang*

MEDIA MASSA DAN KARAKTER BANGSA

Mulyanti Syas

Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini telah jauh dari nilai-nilai serta jati diri bangsa yang sebenarnya, seperti kesopanan, kejujuran, kebersamaan dan nilai tauladan lainnya. Yang mengemuka saat ini adalah nilai-nilai perpecahan, meningkatnya perilaku korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta dekadensi moral. Khusus masalah dekadensi moral, banyak ahli dan peneliti khususnya di bidang komunikasi menyebutkan bahwa faktor pendukung perilaku negatif masyarakat adalah media massa. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini telah melahirkan berbagai media baru yang mempermudah proses komunikasi, seperti; situs-situs atau portal berita, website, facebook, blog, dan youtube. Munculnya media baru ini membuat sejumlah perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yaitu akses informasi yang semakin mudah, cepat dan murah. Hal ini selanjutnya juga mempermudah tersalurnya konten-konten negatif di kalangan masyarakat.

Seperti diketahui, salah satu fungsi media massa adalah to educate atau mendidik. Pendidikan merupakan aspek utama dalam pembentukan karakter bangsa. Untuk memperkaya wilayah kajian bidang ilmu komunikasi khususnya tentang; bagaimana peran mendidik yang telah dilakukan media massa? Apakah pendidikan tersebut sejalan dengan nilai-nilai atau karakter bangsa? Artikel ini akan menyajikan tinjauan kritis tentang konsepsi peran media massa dalam membangun karakter bangsa.

Kata kunci: *media massa, media baru, pendidikan karakter, karakter bangsa*



AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Desy Mardhiah

Tulisan ini mencoba menganalisa tentang cerita rakyat yang melegenda dari daerah Sumatera Barat yakni cerita Malin Kundang. Cerita itu berkisah tentang seorang anak muda yang merantau dan pulang dengan membawa kesuksesan. Akan tetapi, sang anak tidak mau mengakui identitasnya sehingga ia menjadi durhaka pada ibunya. Tulisan ini menelaah relevansi cerita tersebut di masa sekarang sebagai upaya menghadirkan kembali karakter bangsa di tengah berbagai cerita-cerita yang berkembang saat ini. Hasil telaahan itu menemukan bahwa pertama, cerita yang dibangun menghadirkan karakter tokoh yang kuat dengan latar belakang struktur sosial masyarakat. Kedua, ideologi dalam cerita Malin Kundang menunjukkan paradoksalitas antara identitas tokoh yang berhasil versus identitas tokoh yang diharapkan oleh aktor lain sebagai daya tarik cerita. Ideologi itu didominasi oleh cara pandang orang Minang yang matrilineal dan agamis. Ketiga, cerita Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat ini dapat diterima secara nasional karena mengandung nilai-nilai universal seperti merantau, mobilitas sosial, dan status sosial. Keempat, Bila diperhatikan dengan cermat, cerita Malin Kundang memberikan sumbangan penting bagi pembentukan karakter bangsa di tengah-tengah banyak cerita di masa sekarang tetapi kehilangan makna.

Keywords: *karakter bangsa, cerita malin kundang.*

PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA

Rika Widawati, Ani Rachmat

Menghargai, setia, dan peduli terhadap bahasa negara adalah bentuk cinta tanah air yang merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia. Dewasa ini pemuda Indonesia kurang menghargai bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam kesungguhan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia di sekolah maupun di Perguruan tinggi. Nilai UN peserta didik sekolah dasar sampai menengah atas rendah untuk pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan di perguruan tinggi mahasiswa banyak yang mengabaikan mata kuliah bahasa Indonesia. Nilai UN bahasa Indonesia menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Padahal bahasa Indonesia adalah salah satu kebanggaan nasional dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kasus ini menjadi tantangan bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Makalah ini akan menyajikan peran pendidik dalam menyelesaikan masalah pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Di seluruh perguruan tinggi di Indonesia ada mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia, mata kuliah ini sifatnya wajib. Metode yang digunakan untuk mengkaji makalah ini adalah metode deskriptif. Dalam makalah ini akan dideskripsikan bagaimana pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum. Penulis sebagai pengajar Bahasa Indonesia di perguruan tinggi telah mengembangkan berbagai metode pengajaran yang bertujuan agar dapat merebut perhatian generasi muda untuk bangga dan melestarikan bahasa Indonesia. Metode tersebut adalah metode diskusi, permainan, drama.

Kata kunci: *metode pembelajaran, karakter bangsa, pembinaan bahasa Indonesia*



ANTARA REALITA DAN FIKSI Paradigma Sosiologi dalam Kajian Sastra

Khairil Anwar

Sebagaimana dikemukakan para pakar sastra bahwa karya sastra tidak berangkat dari kekosongan sosial, sistem sastra tertentu tidak tumbuh dan berkembang dalam isolasi mutlak, kemunculan karakteristik tertentu pada karya bukanlah sesuatu yang khas secara inheren pada dirinya sendiri. Hal-hal tersebut memiliki hubungan dengan aspek-aspek lain di luar sastra. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan bahwa eksistensi karya sastra terkait dengan realita sosialnya. Yang dimaksud realita sosial adalah segala sesuatu yang melingkupi proses dan karenanya menginspirasi penciptaan karya sastra. Dalam paradigma sosiologis, karya sastra diposisikan sebagai suatu realitas sosial atau komponen dalam sebuah komunitas. Hidup dan berkembangnya sebuah karya sastra adalah akibat aksi dan reaksi sosiologis dalam kondisi komunitas tertentu yang kompleks dan kait-mengkait. Karya sastra fungsional dalam kehidupan komunitasnya. Dalam paradigma sosiologi, kemunculan karya sastra bisa dipandang sebagai bukti adanya evolusi, adaptasi, atau kemungkinan-kemungkinan unik lainnya. Kajian sosiologi terhadap karya sastra dimungkinkan karena ada kesejajaran antara fenomena karya sastra dan fenomena komunitasnya. Oleh karena itu, kajian sosiologis terhadap karya sastra juga dapat memanfaatkan pendekatan-pendekatan dalam penelitian sosiologi.

Kata kunci: *sastra, realitas sosial, kajian sastra, paradigma sosiologi*

PLACE BRAND MUSEUM ADITYAWARMAN PADANG Studi Kasus *Brand Awareness* Pengguna Taman Melati Museum sebagai Tempat Mesum

Yesi Puspita

Fenomena brand Taman Melati/Museum memiliki image yang negative di mata public. Namun keberadaan Taman melati tersebut sekarang telah satu pintu dengan Museum Adityawarman dan tiga tahun belakangan telah dilakukan upaya untuk merubah image tersebut. Namun situasi dan kondisi Taman Melati yang banyak ditumbuhi pohon pohon besar dan sejuk membuat banyak pasangan remaja yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpacaran, namun gaya pacaran yang dilakukan telah masuk indikasi mesum tingkat ringan (berangkulkan, berpelukan, sampai berciuman). Hal tersebut membuat pengunjung lain risih akan perilaku mesum di Taman Museum. Sehingga ada persepsi yang berbeda dari yang seharusnya dipersepsi sebagai tempat edukasi sejarah dan budaya, namun bagi pasangan remaja dipersepsi sebagai tempat mesum. Untuk itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul Brand Place Museum Adityawarman Padang (Studi Kasus: Brand Awareness Pengguna Taman Melati Museum sebagai Tempat Mesum).

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pisau analisis teori persepsi, dimana ada Pengalaman, Interpretasi, Lingkungan, dan Proses Belajar, untuk mengungkapkan persepsi dari pelaku mesum mengenai Brand Place Taman Melati/Museum.



Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Brand Awareness mereka berada pada level Top of mind brand: maksudnya, kawasan Museum Adityawarman adalah yang pertama kali terlintas dalam pikiran dan diucapkan ketika ditanyakan di mana tempat pacaran yang direkomendasikan karena kenyamanan, harga terjangkau, dan aman. Hasil selanjutnya di dapatkan adalah Dominant brand: yaitu, satu-satunya nama/tempat yang diingat informan kunci adalah Taman Melati/ Museum Adityawarman. Sementara untuk Brand Place sangat positif karena memberikan kenyamanan khususnya pada hari kerja yang sepi pengunjung.

Kata kunci: *brand place, awareness, park, museum, mesum*

STRATEGI NEW MEDIA OLEH HUMAS PEMERINTAH
Study tentang Penggunaan Facebook sebagai Media Komunikasi Pemasaran
Kain Tenun Songket Silungkang oleh Humas Kota Sawahlunto

Revi Marta

Tenun Songket terkenal oleh masyarakat memiliki motif yang unik, kilauan benang, kualitas tinggi Songket tidak hanya sebagai hasil tenun masyarakat Minangkabau, tetapi merupakan kelengkapan kostum tradisional sebagai fungsi sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki perbedaan hasil tenun yang dapat dilihat dari benang yang digunakan, motif songket dan bahan yang digunakan. Di Sumatera barat ada dua daerah penghasil kain ntenun yaitu Pandai Sikek dan Silungkang. Silungkang adalah nama salah satu desa yang berada di kota Sawahlunto, berada di tepi jalan lintas Sumatera.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model komunikasi Lasswel dan Teori Management Public relations menurut Cutlip & Center.

Humas Pemerintahan Kota Sawahlunto menggunakan new media sebagai saluran dalam mempromosikan kain tenun Silungkang. Salah satu new media yang digunakan yaitu Facebook, penggunaan new media ini belum maksimal dilakukan namun ini merupakan salah satu bukti keseriusan kota Sawahlunto dalam mempromosikan kain tenun songket. New media merupakan bentuk media sosial baru yang digunakan oleh masyarakat, mengingat media konvensional lama dalam mentransfer pesan. New media mampu membantu pemerintahan kota dalam mempromosikan kegiatan, kebijakan, produk industri kreatif ke masyarakat.

Kata kunci: *humas, komunikasi promosi, new media, tenun silungkang*



**KELUARGA, GENDER,
KEMISKINAN, KESEHATAN**





KELUARGA, GENDER, KEMISKINAN, KESEHATAN

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	SYAHRIZAL	FISIP UNAND	POLA PENGASUHAN ANAK DAN PELESTARIAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN: STUDI PADA NELAYAN URBAN DI KOTA PADANG
2.	FERY ANDRIANUS	FAKULTAS EKONOMI UNAND	ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI
3.	YEVITA NURTI	FISIP UNAND	PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT
4.	MIHO SAKAI	DOSEN TAMU JURUSAN SASTRA JEPANG, FIB UNAND	KEMURAMAN DI PULAU BANGKA-TIMAH BUKAN HANYA MERUSAK EKONOMI MASYARAKAT, MALAH MENGANCAM KESEHATAN MASYARAKAT
5.	MUHAMMAD HIDAYAT	FISIP UNAND	PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG: STUDI FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENYEBAB KEMISKINAN
6.	IRMA PURNAMASARI, EUIS SALBIAH	PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA, FISIP, UNIV. DJUANDA BOGOR	MODEL PENGADAAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH, JENIS DAN KUALIFIKASI DALAM MENCAPAI <i>MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS</i> (MDGS) KESEHATAN DI KOTA BOGOR DAN KABUPATEN SUKABUMI
7.	NINI ANGGRAINI, DWIYANTI HANANDINI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (<i>KEMENAKAM</i>) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (<i>MAMAK</i>) DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU
8.	SRI SETIAWATI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	LBT, " <i>COMING OUT</i> ", DAN NEGARA : SUATU KAJIAN TENTANG JARINGAN SOSIAL ORGANISASI LBT ARDHANARY INSTITUTE
9.	WENNY IRA REVERAWATI	STISIP NURDIN HAMZAH JAMBI	PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA
10.	FACHRINA, MACHDALIZA MASRI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT(JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT
11.	ANI YUMARNI	DOSEN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR	DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (STUDI KEWENANGAN KUA KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BOGOR)
12.	ADILA KASNI ASTIENA, SUCHYAR ISKANDAR, HANIFAH MARDHATILLAH	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS ANDALAS	MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS



POLA PENGASUHAN ANAK DAN PELESTARIAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN Studi pada Nelayan Urban di Kota Padang

Syahrizal

Masyarakat nelayan dikenal sebagai masyarakat yang umumnya hidup dalam kemiskinan. Persentase kemiskinan nelayan tersebut sembilan puluh persen, persentase yang tinggi kalau dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Banyak penyebab kemiskinan nelayan yang telah diungkapkan misalnya sumberdaya yang terbatas, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada nelayan kecil, sistem bagi hasil yang tidak adil, cuaca, harga ikan yang berfluktuasi, modal yang selalu harus diperbaharui, dan keterisoliran tempat tinggal nelayan. Nelayan Padang yang tinggal di perkotaan tidak tinggal di daerah terisolir, di mana mereka mudah mengakses alat transportasi, komunikasi, dan pendidikan tetapi sebagian besar juga miskin

Selain itu ada latar belakang lestarinya kemiskinan dalam masyarakat nelayan yang jarang diperhatikan yaitu anak-anak yang juga meneruskan pekerjaan ayah mereka sebagai nelayan, mereka umumnya tidak bekerja di sektor lain atau menjadi nelayan yang lebih baik dari orang tuanya, hal ini yang menyebabkan tidak ada mobilitas sosial vertikal. Anak-anak nelayan umumnya juga menjadi nelayan meneruskan pekerjaan orang tuanya ketika usia yang masih kanak-kanak. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pola pengasuhan anak-anak nelayan. Apa yang menyebabkan anak-anak nelayan kehidupan mereka tidak bisa lebih baik dari orang tua mereka. Karena salah satu strategi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah dengan mobilitas sosial vertikal di mana pekerjaan anak-anak lebih baik dari orang tuanya. Makalah ini mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menjelaskan pola pengasuhan anak-anak nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang juga berkaitan dengan budaya masyarakat nelayan.

Kata kunci : *kemiskinan, nelayan, pola pengasuhan, budaya*

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI

Fery Andrianus

Pemukiman kembali yang dilakukan pemerintah pada rumah tangga yang terkena dampak pembangunan bendungan, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga yang terkena dampak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun fakta menunjukkan, secara umum rumah tangga yang ikut program tersebut, kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya, seperti yang terjadi di Kedungombo, Nipah, Karian, Jatibaran, Jati Gede dan Kotopanjang. Mereka mengalami kondisi yang memprihatinkan, sehingga tidak aneh terjadi protes terhadap pemerintah, baik secara pribadi maupun kelompok. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk kasus Koto Panjang, ditemukan bahwa kesejahteraan rumah tangga terkena dampak pembangunan di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Terjadinya perbedaan kondisi ini merupakan hal yang



menarik untuk dikaji, kenapa kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah, apakah ukuran kesejahteraan dengan menggunakan indikator ekonomi masih relevan atau tidak, bagaimana kalau ukuran kesejahteraan yang digunakan menggabungkan indikator ekonomi dan non ekonomi apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Selanjutnya bagaimana peran dan kemandirian perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani yang ikut program pemukiman kembali. Dalam kajian ini ditawarkan suatu model analisis pemukiman kembali rumah tangga petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam model tersebut, ditawarkan peran dan kemandirian perempuan serta program pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Kata kunci: *Pemukiman Kembali, Kesejahteraan, Peran Perempuan*

PENGEMBANGAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

Yevita Nurti

Untuk menunjang keberhasilan program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, diperlukan modifikasi terhadap model-model pendekatan yang digunakan selama ini. Secara antropologis, asumsinya adalah bahwa dalam program-program kesehatan atau intervensi kesehatan dan untuk mengembangkan intervensi yang lebih sesuai secara kultural dan berkelanjutan, perlu pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan budaya kesehatan masyarakat, memahami sikap, keyakinan dan perilaku warga suatu masyarakat secara keseluruhan.

Tulisan ini bermaksud untuk memancing diskusi lebih jauh mengenai pengembangan masyarakat partisipatif dalam program-program kesehatan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kab. Agam Sumatera Barat, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa program pengobatan massal filariasis yang ditujukan pada masyarakat di Kab. Agam Sumatera Barat, yang sudah dilakukan 5 tahun berturut-turut belum berhasil? Berdasarkan data sosial budaya di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa kegagalan program kesehatan pengobatan massal filariasis yang terjadi lebih disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Kurangnya keterlibatan masyarakat berimbas kepada tidak tersebarnya informasi mengenai penyakit secara baik kepada masyarakat, dan hampir tidak ditemukannya bentuk dukungan masyarakat terhadap program kesehatan masyarakat tersebut.

Tulisan ini sebagian berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik atau metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Melalui dua teknik yang dilakukan secara bersamaan ini, maka peneliti bisa mengambil bagian dalam interaksi, dan peneliti dapat menjadi lebih mengalami dan memahami pandangan *insider*.

Kata kunci: *masyarakat partisipatif, pembangunan kesehatan, antropologi*



KEMURAMAN DI PULAU BANGKA-TIMAH BUKAN HANYA MERUSAK EKONOMI MASYARAKAT, MALAH MENGANCAM KESEHATAN MASYARAKAT

Miho Sakai

Makalah ini bertujuan untuk mengangkat kasus dampak dari tambang timah, yaitu kasus sosial yang amat besar bagi masyarakat setempat, di Pulau Bangka, dengan menerangkannya apa dan mengapa bermasalah di situ, kondisi kini, dan tindakan yang diharapkan akan diambil untuk ke depan.

Sejak masa lalu, Pulau Bangka cukup terkenal dengan perikanan dan pertambangan timah yang merupakan sebagian besar dari pendapatan atau pekerjaan masyarakat. Dan, timah yang diperkirakan bawa rejeki bagi masyarakat itu, mulai merebut pekerjaan masyarakat, yaitu nelayan (perikanan). Namun, belum diketahui bahwa timah ini bisa saja mengancam jiwa masyarakat.

Timah di Pulau Bangka, dimana terdapat banyak tambang di sungai-sungai, semenjak abad 19, pertambangan dikembangkan oleh pihak kolonial Belanda. Karena sekian lama, banyak dan cukup sungai-sungainya digali, hingga sungai-sungainya banyak berlobang-lobang dan rusak, tetapi begitu dibiarkan. Maka sulit untuk rehabilitasi alam seperti semula. Agar mendapat lebih banyak keuntungan, maka kini pihak perusahaannya sudah mulai beroperasi di tengah laut untuk mencari timah. Ini pasti berdampak kepada lingkungan di sekitarnya, hingga berdampak negatif pula kepada nelayan (perikanan) masyarakat.

Sedangkan itu, masih terlihat pula pekerja tambang timah di sungai-sungai yang cara bekerjanya manual. Jelas kesadaran atas keamanannya masih sangat berkurang, maka itu sering menimbulkan aksiden yang tidak kita inginkan. Tetapi, apa yang ingin saya tekan di sini adalah bahwa timah bisa saja sungguh-sungguh mengancam jiwa masyarakat. Itu karena “radiasi” yang terkandung dalam timah di Pulau Bangka.

Timah atau limbah yang tingkat radiasinya tinggi sekali selalu berada di dekat masyarakat. Bisakah masyarakat memperbaiki kondisi yang parah begini? Lalu, bisakah mineral alam dan manusia co-existence secara aman? Itu yang akan dibahas dalam makalah ini.

Kata kunci: *pulau Bangka, ekonomi tambang, kesehatan masyarakat*

PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG Studi Faktor-faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan

Muhammad Hidayat

The background of this research is based on the low level of socio-economic traditional fishermen, especially in urban areas that have to deal with modern fisherman fishing technology. The complexity of the factors of poverty is not only related to the rapid changes in the fishing seasons, limited human resources, capital and access, trade networks exploitative fish to fishermen as a producer, but also due to the negative impact of modernization of fisheries or blue revolution encouraged excessive depletion of marine resources. This process continues and leads to a decrease in income levels and the difficulty



of obtaining the catch among the traditional fishermen in urban areas. Other conditions that further compound the traditional fishing conditions are internal factors; lack of education, do not have the capital, do not have the technology and skills in improving outcomes fishermen. The research problem is: how internal problems of traditional fishermen by socio-cultural factors causing poverty in Padang City?

Keywords *traditional fishermen, internal factors, socio-cultural of poverty*

MODEL PENGADAAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH, JENIS DAN KUALIFIKASI DALAM MENCAPI *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* (MDGS) KESEHATAN DI KOTA BOGOR DAN KABUPATEN SUKABUMI.

Irma Purnamasari, Euis Salbiah

Di bidang kesehatan, tantangan MDGs tertinggi di Indonesia adalah menurunkan angka kematian akibat persalinan ibu dan angka kematian bayi. Untuk dapat mencapai sasaran MDGs Kesehatan, perlu didukung dengan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan. Saat ini tenaga kesehatan di Indonesia masih kurang dilihat dari jumlah, jenis, dan kualifikasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data yang terkumpul melalui studi literatur, observasi, kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tenaga kesehatan belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan, hal ini terkait dengan pengadaan tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan diketahui masih terdapat hambatan antara lain penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan belum berdasarkan rasio jumlah penduduk /tenaga, dan belum berdasarkan beban kerja yang juga menggambarkan permintaan (*demand*). Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini menawarkan model pengadaan tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan aspek jumlah, jenis dan kualifikasi dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Keywords: *model pengadaan tenaga kesehatan, MDGs kesehatan.*

MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (*KEMENAKAN*) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (*MAMAK*) DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini

Data menunjukkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Masyarakat Minangkabau mempunyai mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Sistem keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat



Minangkabau dan institusi *mamak* merupakan suatu nilai sosial budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Bagaimana memberdayakan keluarga luas (*mamak*) dalam mengatasi masalah keluarga inti (*kemenakan*) untuk mencegah perceraian?. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini adalah keluarga luas (*mamak*). Untuk mewakili keluarga luas ditetapkan *mamak* sebagai responden. Besar sampel ditetapkan sebanyak 150 orang *mamak*. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja/kebetulan. Data diambil menggunakan kuesioner tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Nagari Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan Nagari Mungka, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi meminang merupakan prosesi yang banyak memerlukan ritual adat yang memerlukan keterlibatan *mamak*, karena biasanya *mamak* pasangan yang dilamar akan menanyakan hal tersebut. Ketidakhadiran *mamak* dapat membuat proses lamaran menjadi batal. Dalam proses mendapatkan jodoh *kemenakan*, *mamak* melibatkan keluarga *saparuiknya*. *Mamak* perlu dilibatkan sejak awal terbentuknya keluarga *kemenakan* agar dapat ikut bertanggungjawab terhadap keberlanjutan keluarga tersebut. Melalui keterlibatan sejak awal, *mamak* akan lebih disegani *kemenakanya* sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya, *kemenakan* tidak segan-segan minta bantuan *mamaknya*. Perceraian sebagai bentuk kegagalan dalam berkeluarga dapat diminimalisir dengan cara melibatkan dan memberdayakan *mamak* dalam mencari jodoh *kemenakanya*.

Kata kunci: *perceraian, keluarga luas, mamak, pemberdayaan. minangkabau.*

LBT, "COMING OUT", DAN NEGARA Suatu Kajian Tentang Jaringan Sosial Organisasi LBT Ardhanary Institute

Sri Setiawati

Disertasi ini membahas mengenai organisasi LBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Ardhanary Institute di Jakarta. Organisasi feminis ini, dimaknai telah "*coming out*" di tengah kondisi sosial budaya yang mengalami perubahan global dan pasca reformasi. Pada dasarnya penolakan-penolakan lebih kuat dari pada penerimaan keberadaan mereka, namun mereka berani untuk "*coming out*". Disebabkan adanya jaringan sosial yang mereka lakukan melalui aktor-aktor di dalam organisasi ini yang membangun relasi dengan aktor serta lembaga lainnya. Sebagai disiplin antropologi, kajian ini lebih menekankan pada jaringan sosial yang bersifat deskriptif, tidak pada tataran analitik. Maka dalam teknik pengumpulan datanya tidak ada pengukuran tapi lebih pada proses pengamatan intensif dan wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Penelitian ini juga berpijak pada pendekatan etnografi feminis, dimana hubungan-hubungan global hanya dapat dipahami dalam "bahan-bahan nyata yang saling bertaut erat dalam pertemuan sehari-hari" (Anna Tsing, 2005:1), yaitu tindakan dan praktik sehari-hari yang menjadi bahan dari penelitian etnografi.



Manfaat kajian ini; *Pertama*, mengisi ruang penelitian akademik tentang organisasi LBT (Lesbian, Biseksual dan Transgender) yang telah “*coming out*” dalam perspektif antropologi. *Kedua*, menambah kajian selama ini terabaikan, yakni tentang jaringan sosial yang bersifat deskriptif pada organisasi LBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia, selama ini kajian jaringan sosial cenderung bersifat analitik dalam perspektif sosiologi. Kesimpulan dari kajian ini: 1). Situasi global sangat mempengaruhi eksistensi dari organisasi LBT di Indonesia terutama organisasi AI “*coming out*” melalui jaringan sosial yang relasi internasional yang dilakukan aktor-aktor dalam organisasi ini, 2). Sebagai organisasi yang telah “*coming out*”, memberikan efek “*struggling*” dimana aktor-aktor lesbian inilah sebagai motivator, fasilitator, inspirator dan berimplikasi dalam pergerakan organisasi LBT yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia, 3). Organisasi ini secara aktif membangun jaringan sosial yang lebih luas dan secara eksternal relasi sosial diperoleh melalui dukungan kerjasama dari berbagai organisasi-organisasi perempuan lainnya, baik secara langsung maupun tidak, dan 4). Berkaitan dengan negara, adanya kontestasi dan sikap negara yang “*ambivalen*” terhadap LGBT/LBT. Satu sisi negara seakan-akan tidak pernah hadir atau absen bahkan negara seakan-akan berada dalam wilayah yang tidak jelas atau dengan istilah “*the blurred zone*”. Negara yang memiliki tugas untuk melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang sewenang-wenang, tanpa memandang orientasi seksual dari warga negaranya.

Kata kunci: *LBT, LGBT, jaringan sosial, “coming out”, relasi sosial*

PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA

Wenny Ira Reverawati

Perempuan pedesaan memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat yang sama diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara sebagaimana halnya laki-laki. Secara khusus, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) memuat hak-hak perempuan pedesaan tersebut ke dalam pasal 14 konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Adat- istiadat, budaya, tafsir agama dan politik kerap mengungkung perempuan pedesaan kedalam ketidakberdayaan. Perempuan pedesaan dengan demikian semakin termarginal dalam proses pembuatan keputusan penting bagi perencanaan pembangunan pedesaan. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Desa, menjadi rujukan bagi prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan di akomodir ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebagaimana azas pemerintahan desa dalam Undang-Undang Desa, menganut azas kesetaraan. Prinsip demokrasi desa dengan hadirnya Undang-Undang Desa, secara umum menjadikan pengembangan kehidupan demokrasi sebagai kewajiban bagi desa dan pemerintahannya. Secara khusus demokrasi desa juga menekankan prinsip keadilan gender. Pada kewajiban desa dan



pemerintahannya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi tersebut, hubungan antara elit desa dan masyarakatnya mengalami redefinisi. Saat ini, masyarakat desa merupakan pemilik sejati kekuasaan desa, bukan elit desa. Perempuan pedesaan dalam euforia demokrasi desa, juga menjadi pertimbangan untuk masuk kedalam redefinisi hubungan antara masyarakat dan elit desa. Menggunakan metode penelitian yang berbasis pada kajian literatur, penelitian ini akan menganalisis prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam Undang-Undang Desa. Perempuan pedesaan mendapatkan bagian dari azas kesetaraan dalam pengaturan pemerintahan desa, analisis penelitian akan diarahkan untuk mendeskripsikan porsi azas kesetaraan diberlakukan terhadap perempuan pedesaan.

Kata kunci: *perempuan pedesaan, undang-undang desa, prinsip keadilan gender*

PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Fachrina, Machdaliza Masri

Penyakit Masyarakat (Pekat) membawa dampak negatif yang besar bagi perorangan, keluarga dan masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Akibat yang ditimbulkan tak hanya materi tapi juga merusak moral yang menjadi pemicu tindakan pelanggaran asusila, kenakalan remaja, kriminal dan lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan maraknya Pekat di tengah masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas sehingga dapat memperlemah ketahanan sosial masyarakat. Penanggulangan Pekat saat ini masih bersifat represif dengan mengandalkan petugas keamanan baik polisi maupun satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Penanggulangannya mesti melalui pendekatan partisipatif dengan memberdayakan berbagai unsur dalam komunitas tempatan (lokal)

Kata kunci: *pencegahan, penyakit masyarakat, komunitas lokal*

DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN Studi Kewenangan KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bogor

Ani Yumarni

Dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir ini, permasalahan fenomenal dan faktual yang menguak di tengah masyarakat Kota Bogor adalah dengan semakin tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bogor pada Tahun 2013 hingga Tahun 2014, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan bawah umur. Maka permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) kewenangan PPN di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan, 2) faktor yang menyebabkan banyaknya perkawinan bawah umur, dan 3) dampak perkawinan bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga.



Selanjutnya, kewenangan Absolut Peradilan Agama yang menyangkut perkawinan adalah mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan KUA, yang dikepalai oleh PPN. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Lembaga PPN di Kota Bogor berupaya maksimal guna terciptanya tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administrasi Nikah) yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur. Faktor terjadinya perkawinan bawah umur adalah pergaulan bebas serta kurangnya perhatian orangtua terhadap aktifitas anak di luar rumah, didukung dengan beragam keterbukaan akses informasi saat ini yang dapat merusak moral remaja. Apabila laki-laki yang menikah di bawah umur, maka akan sulit untuk menyadari sepenuhnya bahwa perannya adalah sebagai kepala rumah tangga yang punya wibawa sehingga dapat bersikap dewasa dan bijak menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga. Sebaliknya apabila perempuan yang menikah bawah umur, selain beresiko terhadap kesehatan reproduksi wanita, ia belum sepenuhnya cakap untuk berperan sebagai ibu yang akan menjadi teladan anak-anaknya.

Kata kunci: *perkawinan bawah umur, perceraian, KUA*

MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

Adila Kasni Astiena, Suchyar Iskandar, Hanifah

Perilaku merokok pada remaja mengalami peningkatan dari 25,7% (Riskesdas 2007) menjadi 26,4% (Riskesdas 2013). Dari penelitian Bambang (2015) tentang perilaku merokok mahasiswa di Fakultas Teknik UNAND didapatkan 90% mahasiswa laki-laki merokok. Dari studi pendahuluan pada 10 mahasiswa FTUA didapatkan 5 orang memiliki persepsi buruk, 7 orang memiliki sikap negatif terhadap promosi kesehatan pada kemasan rokok dan 7 orang memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Motivasi Berhenti Merokok dan Determinan yang Mempengaruhinya Pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. Jenis penelitian kuantitatif dengan disain cross sectional study. Variabel dependen (motivasi) dan variabel independen (persepsi, perhatian, dan sikap) diukur pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Unand pada Bulan Februari-Mei 2016. Populasi adalah mahasiswa laki-laki FTUA sebanyak 3005 dan sampel 101 dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel diambil secara Proportional sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan uji statistik Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Hasil penelitian



menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perokok berusia kurang dari 21 tahun (54,5%), lama merokok lebih dari 5 tahun (62,4%), jumlah rokok yang dikonsumsi per hari lebih dari 10 batang (37,6%), memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok (61,4%), persepsi buruk (62,4%), perhatian rendah (62,4%), dan sikap negatif (58,4%) mengenai promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Determinan yang berhubungan dengan motivasi berhenti merokok adalah persepsi dan sikap, sedangkan yang tidak berhubungan adalah perhatian. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi dan sikap mengenai promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok dengan motivasi berhenti merokok. Untuk meningkatkan motivasi berhenti merokok pada mahasiswa, seharusnya tidak hanya mengandalkan pada promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok, tetapi dengan membuat peraturan yang tegas dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berikut sanksi pada mahasiswa dan penjual rokok baik di tingkat Fakultas maupun universitas.

Kata kunci: *motivasi berhenti merokok, sikap, promosi kesehatan*



POLITIK LOKAL





POLITIK LOKAL

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	TAMRIN, ASRINALDI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PENGARUH SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI PELAKSANAAN UU NO. 6/2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
2.	YULIA SARI	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENYELENGGARA PEMILU YANG BERETIKA
3.	ARIFKY	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ANTARA DAKWAH DAN POLITIK: PEMETAAN HABITUS AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DALAM KONSTELASI POLITIK INTRA DAN EKSTRA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2011-2015
4.	IRAWATI, ANDRI RUSTA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMILIH PERMISIF DAN POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014
5.	BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, AWANG DARUMURTI	JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, FISIP, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	STRATEGI PELEMBAGAAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA
6.	ASRINALDI	FISIP UNAND	JARINGAN KEKUASAAN PENGHULU ADAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT
7.	DEWI ANGGRAINI, FEBRIANI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG
8.	CAROLINE PASKARINA	DEPARTEMEN ILMU POLITIK FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN	POLITIK INDEKS DAN ARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
9.	AIMIE SULAIMAN	JURUSAN SOSIOLOGI, FISIP, UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (UBB)	<i>DUKUN KAMPONG</i> : KAJIAN TENTANG KAPITAL SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BELITUNG
10.	DIANA SARI DEWI KOSASI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	PENYELENGGARA PEMILU PROFESIONAL
11.	ASRINALDI	FISIP UNAND	JARINGAN KEKUASAAN PENGHULU ADAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT
12.	BAKARUDDIN ROSYIDI AHMAD	FISIP UNAND	KEGAGALAN PENDALAMAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA: SATU KAJIAN KASUS <i>PILKADA BADUNSANAK</i> DI SUMATERA BARAT
13.	TENGGU RIKA VALENTINA	FISIP UNAND	POLITIK NAGARI: PEMBALIKAN DEMOKRASI DAN EKSISTENSI LEMBAGA NAGARI DI SUMATERA BARAT (RENTANG TAHUN 1979-2015)



PENGARUH SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI PELAKSANAAN LUU NO. 6/2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

Tamrin & Asrinaldi

Terdapat missing link antara praktek demokratisasi politik lokal dengan pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. Setiap pemerintahan daerah di Indonesia memiliki ciri khas sendiri, keunikan desa ini harus menyesuaikan diri dengan bentuk penentuan pemimpin masyarakat yang dilakukan secara langsung melalui demokrasi prosedural. Perbedaan antara keunikan desa di Indonesia dapat dilihat dari bentuk demokrasi deliberatif yang memilih pemimpin secara tidak langsung, tetapi proses pengambilan keputusan dilakukan secara langsung. Sebaliknya demokrasi prosedural menekankan pemilihan pemimpin secara langsung, tetapi pengambilan keputusan dilakukan secara tidak langsung. Bentuk demokrasi prosedural ini sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, seperti persaingan bebas, partai politik, dan parlemen. Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai representasi partai politik dan parlemen di desa melahirkan gegar politik, seperti konflik Kepala Desa dengan BPD. Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat mengurangi gegar politik yang terjadi, bentuk otonomi kewenangan yang lebih besar diberikan terhadap lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD. Kewenangan ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh lembaga adat mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah desa dengan BPD. Tulisan ini menjelaskan pengaruh pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang pemerintahan desa dalam pelaksanaan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, bentuk pengaruh tersebut diantaranya ditentukan oleh persepsi lembaga adat tentang bentuk sistem pemerintahan nagari tersebut serta oleh kemampuan anggota lembaga adat dalam Badan Musyawarah (BAMUS) desa dalam mempengaruhi sistem pemerintahan nagari tersebut..

Kata kunci: *demokrasi lokal, desentralisasi, sistem pemerintahan nagari,*

MODEL SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENYELENGGARA PEMILU YANG BERETIKA

Yulia Sari

Pelaksanaan pemilu sangat tergantung kepada individu-individu yang berada dalam sebuah institusi kelembagaan penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai dengan amanat dari Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kelembagaan KPU harus diisi oleh orang-orang yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah dan partai politik. Sejak seleksi untuk penyelenggara dari pemilu 2004 hingga pemilu 2014 sangat memperhatikan orang-orang yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah dan partai politik. Begitupun di Sumatera Barat, seleksi dari periode ke periode mengalami proses yang



lebih baik. Namun dalam kondisi aturan yang lebih baik tersebut, ternyata di tingkat Sumatera Barat juga tidak bisa dilepaskan dari kasus-kasus etika penyelenggara pemilu. Tercatat sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 dan pemilihan kepada daerah serentak tahun 2015 ada 4 orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan secara tetap dan 16 orang yang mendapatkan teguran tertulis oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Menarik untuk mengkaji tentang bagaimana model seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan di Provinsi Sumatera Barat? karena sebagai provinsi yang jauh dari persoalan-persoalan kekerasan pemilu dan pemilihan harusnya diwujudkan dalam penyelenggara yang beretika. Dengan melihat model-model seleksi yang ditawarkan oleh Allan Wall maka model seleksi terbuka adalah yang terbaik untuk Indonesia dibandingkan model seleksi pemerintah dan campuran. Namun berkaca kepada model seleksi untuk penyelenggara pemilu tahun 2014 maka harus ditambahkan beberapa seleksi untuk memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang beretika. Diantara pilihan tersebut adalah adanya penguatan seleksi psikologis dan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara yang dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi.

Kata kunci: *penyelenggara pemilu, model seleksi dan etika pemilu*

ANTARA DAKWAH DAN POLITIK Pemetaan Habitus Aktivistis Dakwah Kampus dalam Konstelasi Politik Intra dan Ekstra Universitas Andalas Tahun 2011-2015

Arifki

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan fenomena kegiatan dakwah kampus yang berkembang di Universitas Andalas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kiprah aktivis dakwah kampus dalam internal dan eksternal Universitas Andalas. Dalam konteks penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori strukturalisme Pierre Bourdieu: habitus, modal dan arena. Hasil penelitian ini adalah, pertama, aktivis dakwah kampus berperan dalam lembaga-lembaga mahasiswa keagamaan yang tergabung di internal Universitas Andalas. Kedua, gerakan dakwah kampus berakumulasi dengan kegiatan politik mahasiswa dalam memperebutkan pos-pos strategis lembaga mahasiswa. Ketiga, gerakan dakwah kampus terlibat memobilisasi massa di eksternal Universitas Andalas dengan kepedulian terhadap isu-isu keagamaan dan kemanusiaan. Dalam gerakan dakwah kampus di internal dan eksternal Universitas Andalas menjelaskan tentang gerakan dakwah kampus sebagai struktur (Lembaga Dakwah Kampus) dan agensi (Aktivistis Dakwah Kampus) yang memainkan doxa sebagai politik identitas.

Kata kunci: *dakwah kampus, habitus, modal, doxa*



PEMILIH PERMISIF DAN PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014

Irawati dan Andri Rusta

Pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka (*open-list proportional representation*), yang digunakan pada pemilu 2014 lalu, telah mendorong semakin masifnya praktik politik uang (*money politics*). Pelaku *money politics* bukan hanya institusi partai, melainkan para caleg, baik karena inisiatif sendiri maupun inisiatif yang berasal dari masyarakat pemilih dan para calo suara (*vote-brokers*). Sasaran politik uang saat ini tidak hanya berfokus pada pejabat pemerintah ditingkat pusat ataupun provinsi dan kabupaten sebagai pengambil kebijakan, melainkan semakin melebar hingga ke desa atau dusun dan Rukun Tetangga (RT). Praktik politik uang ini menggunakan jaringan-jaringan yang di Indonesia sering disebut tim sukses, atau di beberapa daerah disebut tim keluarga. Tim ini berfungsi untuk menghubungkan kandidat dengan pemilih di tingkat komunitas lewat beberapa level. Dalam praktiknya, sebagian besar kandidat menganggap pemberian barang/hadiah bukan bagian dari politik uang. Pemilih menganggap pemberian hadiah oleh kandidat dalam masa kampanye adalah hal yang biasa, bahkan akan semakin banyak yang menerima secara terbuka praktek tersebut. Perilaku permisif pemilih ini sangat mendorong semakin kuatnya praktek politik uang dalam pemilu legislatif.

Kata kunci: *pemilu legislatif, pemilih, politik distribusi, politik uang, tim sukses*

STRATEGI PELEMBAGAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA

Bambang Eka Cahya Widodo, Awang Darumurti

Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, *Money Politic*, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep *good governance* tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *rule of law*, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi pelebagaan *good governance* dalam proses pemilu di Indonesia agar persoalan-persoalan pemilu di atas dapat diminimalisir dan tujuan pemilu dapat tercapai. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga merupakan tujuan lain dalam penelitian ini. Inovasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah terciptanya *code of conduct* atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat *governability* nya tinggi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *semi structure group* dan *interview*. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive random sampling*. Lokasi penelitian dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di kedua provinsi tersebut ditemukan banyak pelanggaran dan persoalan terkait pemilu legislatif yang lalu, disamping juga jumlah pemilih yang sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan masalah utama terletak pada sentralisasi



kewenangan., pembentukan KPUD yang tidak serentak di seluruh Indonesia, tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga good citizen tidak tercapai, penggunaan teknologi dan sistem informasi seperti SIDALIH memegang peranan penting dalam implementasi nilai-nilai good governance. Disamping itu komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara dan peserta juga dengan masyarakat pemilih sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Salah satu praktik yang baik yang sangat membantu transparansi penyelenggaraan pemilu adalah keputusan untuk menscan dan upload form C1 sehingga mengurangi resiko timbulnya kecurangan ditingkat penyelenggara di bawah. Temuan lain yang penting terkait pengadaan logistik adalah perlunya pengelolaan proses lelang pengadaan surat suara memperhitungkan zonasi percetakan dan pelatihan SDM menjadi kunci keberhasilan pengatasi masalah surat suara tertukar..

Keywords: *pelembagaan, good governance, pemilu.*

JARINGAN KEKUASAAN PENGHULU ADAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT

Asrinaldi

Makalah ini didasarkan pada penelitian lapangan tentang kedudukan penghulu adat dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Posisinya yang sangat strategis dalam masyarakat adat ini menempatkan penghulu pada kedudukan politik dan pemerintahan di luar institusi tradisionalnya. Selain memiliki relasi kekuasaan secara tradisional ke dalam suku dan kaumnya secara internal, penghulu juga memiliki pengaruh terhadap proses politik dan pemerintahan modern. Pengaruh ini terbentuk karena jaringan kekuasaan yang dimilikinya dalam masyarakat yang menjadi basis tradisionalnya. Artikel ini menjelaskan seperti apa legitimasi penghulu adat dalam aktivitas suku dan kaum sebagai institusi tradisionalnya. Lebih jauh, artikel ini menjelaskan bagaimana legitimasi yang dimiliki penghulu ini dapat membentuk jaringan kekuasaan sebagai basisnya sehingga mempengaruhi aktivitas politik dan pemerintahan di luar ranah kekuasaan tradisional yang sebenarnya. Fenomena politik dan pemerintahan terkait dengan jaringan kekuasaan penghulu ini dapat dilihat dari proses berdemokrasi di nagari yang juga menyentuh aktivitas-aktivitas pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, makalah ini akan memfokuskan pada pertanyaan, bagaimanakah bentuk jaringan kekuasaan yang dimiliki penghulu adat ini dalam aktivitas politik dan pemerintahan tersebut? Bagaimana proses terbentuknya jaringan kekuasaan dalam suku dan kaum mereka? Lalu, apa implikasi dari jaringan kekuasaan politik dan pemerintahan itu secara kelembagaan adat yang berada di bawah pengaruh penghulu tersebut? Bagaimana pula dampaknya kepada pribadi penghulu dalam aktivitas mereka sehari-hari? Inilah substansi yang akan dijelaskan secara komprehensif dalam makalah ini.

Kata kunci: *jaringan kekuasaan dan penghulu adat.*



OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Dewi Anggraini, Febriani

Politik pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak Menguasai Negara berkaitan dengan kegiatan Negara dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Pada aktivitas tambang emas ilegal yang tidak memiliki izin sesuai UU No. 4 tahun 2009 Tentang Minerba, maka Negara atau pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk mengatur aktivitas pertambangan tersebut. Akan tetapi kondisi ini menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat, di satu sisi dengan adanya aktivitas pertambangan emas ilegal telah membawa perubahan standar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi disisi yang lainnya terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif sekali, terjadi konflik dan pencemaran air dan tanah, perubahan peruntukan lahan pertanian yang produktif menjadi lahan tambang, Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan teori politik pengelolaan sumber daya alam yang dikaitkan dengan peran negara sebagai perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan teknik pengumpulan data berupa survey, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum optimal dalam merumuskan kebijakan/regulasi terkait dengan pengaturan dan pengawasan tambang emas rakyat, pemerintah daerah baru bisa mengeluarkan Perbub No.23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). akan tetapi perauran ini tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengurus perizinan tambang mereka, dengan alasan beratnya syarat-syarat yang harus mereka penuhi.

Kata kunci: *politik, pengelolaan SDA, konflik tambang, ilegal*

POLITIK INDEKS DAN ARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Caroline Paskarina

Tulisan ini ingin menganalisis arah perkembangan demokrasi di Indonesia dengan mengungkapkan sistem pengetahuan di balik berbagai indeks pengukuran kualitas demokrasi. Keberadaan berbagai indeks demokrasi merupakan upaya positif untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki dalam implementasi demokrasi, tetapi di sisi lain, keberadaan indeks-indeks ini juga turut mengarahkan perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai ukuran yang dipakai dalam asesmen demokrasi membentuk batasan tersendiri tentang



mana yang termasuk kategori demokrasi dan mana yang bukan. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan demokrasi bukan sebuah proses yang netral, tapi merupakan pertarungan kekuasaan untuk membentuk realitas tentang demokrasi, termasuk meminggirkan konsep-konsep alternatif yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang diterima secara universal. Untuk membuktikannya, dipakai metode analisis diskursus untuk mengungkap makna dari setiap metodologi indeks. Metodologi dipahami sebagai instrumen kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas tentang demokrasi, termasuk menyediakan konsep dan metode ilmiah untuk menjustifikasi pilihan terhadap suatu bentuk demokrasi. Dengan menggunakan asumsi ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap 2 (dua) indeks pengukuran demokrasi yang saat ini digunakan di Indonesia, yakni: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Demokrasi Asia (IDA). IDI dikembangkan oleh Bappenas dan UNDP sejak tahun 2007, sedangkan IDA dikembangkan oleh Pusat Kajian Politik FISIP UI, DEMOS (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi), Institut Demokrasi dan Gerakan Sosial Universitas Sungkonghoe Korea Selatan dan Pusat Studi Dunia Ketiga Universitas Filipina sejak tahun 2012. Analisis difokuskan pada dimensi kontekstual, dimensi konseptual, dan dimensi metodologis dari setiap indeks, untuk mengidentifikasi parameter yang digunakan, teknik perhitungan, dan selanjutnya diinterpretasi implikasi dari ketiga dimensi tersebut terhadap arah perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *pengukuran demokrasi, politik indeks*

DUKUN KAMPONG

Kajian tentang Kapital Sosial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Belitung

Aimie Sulaiman

Sosiologi pengetahuan melihat realitas kehidupan sehari-hari didasari oleh hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana pemikiran itu timbul, berkembang dan dilembagakan. Pernyataan ini dapat dimaknai sebagai kenyataan dimana pengetahuan manusia tentang suatu objek sosial berdasarkan penafsirannya tentang objek tersebut. Pengalaman-pengalaman yang berulang secara terus menerus akan mempengaruhi cara berpikir manusia dan berikutnya menjadi sistem pengetahuan mereka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan (habitus) bagi masyarakat tersebut.

Konsep dukun sebagai salah satu pengetahuan yang didapat berdasarkan pengalaman dimaksud sampai saat ini masih melekat dalam pikiran masyarakat di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak berfokus pada fungsi dukun dalam melakukan praktik-praktik perdukunan (shanism) tetapi lebih kepada fungsi sosialnya yaitu sebagai pemimpin informal (informal leader) bagi masyarakat di tiap-tiap kampung. Realitas sosial di Belitung menjelaskan bahwa selain pemimpin formal pada tiap-tiap desa (selanjutnya di sebut kampung) ada tokoh yang berpengaruh, dihargai, didengar dan dipatuhi larang pantangnya oleh masyarakat. Mereka inilah yang disebut dukun kampung yang memiliki nilai tawar yang cukup strategis untuk memberikan pengaruh kepada keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan maupun tata kehidupan sosial. Selain daripada itu, salah satu unsur pelanggaran



keberadaan dukun kampung ditandai dengan adanya organisasi yang sengaja dibentuk untuk memperkuat jaringan. Paguyuban dukun kampung menjadi bukti bahwa struktur sosial dibentuk dan dipertahankan sebagai upaya dalam menjaga eksistensi hubungan-hubungan sosial.

Fakta yang menunjukkan adanya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap dukun kampung dalam hubungan-hubungan sosial, terdapatnya jaringan (network) baik antara dukun kampung, masyarakat dan pemerintah daerah, serta masih taatnya masyarakat terhadap norma sosial budaya (norms), menunjukkan adanya kapital sosial yang dapat digerakkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dukun kampung, sebagai tokoh yang masih disegani oleh masyarakat inilah yang dapat dijadikan kapital sosial dimana kedudukan dan fungsinya diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kata kunci: *dukun kampung, kapital sosial dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

PENYELENGGARA PEMILU PROFESIONAL

Diana Sari Dewi Kosasi

Artikel ini membahas tentang penyelenggara pemilu di Indonesia. Bagaimana suatu penyelenggara pemilu dapat dikatakan profesional. Selama ini kita telah melihat penyelenggara pemilu di Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan setiap lima tahun, apakah itu pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan sejumlah apresiasi dari berbagai negara sudah diraih oleh Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilannya menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan desentralisasi politik melalui pemilihan kepala daerah dalam transisi yang cukup cepat namun relatif aman terkendali. Paling tidak demikian adanya nilai pragmatik praktek demokrasi politik di Indonesia pasca reformasi.

Namun, ini tidak secara signifikan mengindikasikan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Karena hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat sengketa yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Munculnya sengketa tidak jarang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara pemilu. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus di daerah yang pada akhirnya memberhentikan komisioner KPU di daerah tersebut. Terwujudnya KPU yang profesional sangat ditentukan oleh peranan para komisioner di tingkat pusat sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan kriteria penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

Dengan memperhatikan kapasitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai panitia ad hoc yang didapatkan dari hasil seleksi, diharapkan penyelenggara pemilu di Indonesia ke depannya lebih profesional.

Kata kunci: *penyelenggara pemilu, KPU*



KEGAGALAN PENDALAMAN DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA Satu Kajian Kasus *Pilkada Badunsanak* di Sumatera Barat

Bakaruddin Rosyidi Ahmad

Reformasi politik yang terjadi semenjak keruntuhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada 1998 telah merubah banyak struktur politik dan administrasi di Indonesia. Pemilihan umum yang sebelumnya diselenggarakan hanya sebagai formalitas politik telah berubah menjadi pemilihan umum yang jujur dan adil. Sistem kepartaian yang hegemonik berkembang menjadi sistem multi-partai. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang pro sentralistik kini berubah menjadi lebih desentralistik. Perubahan ini telah menarik perhatian Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk mempromosikan Program Pendalaman Demokrasi yang memberi fokus kepada tiga bidang tematik: promosi pendalaman demokrasi melalui pemilihan umum dan dukungan parlemen; dukungan terhadap desentralisasi dan reformasi tata kelola pemerintahan daerah; dan pelaksanaan reformasi undang-undang yang lebih adil. Program UNDP ini dilaksanakan sepanjang pemilihan umum 1999 dan 2004 dengan memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (*Pilkada*). Terdapat enam petunjuk praktik pendalaman demokrasi dalam *Pilkada*, yakni mempromosikan keunikan kearifan lokal seperti *pilkada badunsanak*; minimalisasi konflik; *pilkada* yang bebas korupsi; pendalaman nilai-nilai integritas; penggalakan partisipasi politik perempuan; dan *pilkada* yang bebas daripolitik transaksional. Tulisan ini berdasarkan kajian yang menguji realitas pendalaman demokrasi dalam *Pilkada* 2010-2013 di Sumatera Barat dengan menggunakan konsep pendalaman demokrasi dan politik transaksional. Metodologi yang digunakan adalah metode observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik pendalaman demokrasi mengalami kegagalan yang disebabkan empat faktor: budaya unik *badunsanak* gagal berfungsi karena penerapannya yang tidak konsisten; *money politics* (*vote buying*) masih mendalam; tingkat partisipasi perempuan masih rendah; dan elemen politik transaksional masih kentara. Kesimpulannya, budaya tradisional *badunsanak* yang sering menjadi pemelihara integritas dan moral politik dalam masyarakat ini ternyata gagal berhadapan dengan kepentingan individu dalam bentuk politik transaksional. Sekaligus membuktikan kelemahan struktural-fungsionalisme dalam menjelaskan *malpratik* dalam *Pilkada* di Sumatera Barat.

Kata kunci: *Pendalaman demokrasi, Pilkada Badunsanak, politik uang (vote buying), politik transaksional.*



POLITIK NAGARI: PEMBALIKAN DEMOKRASI DAN EKSISTENSI LEMBAGA NAGARI DI SUMATERA BARAT (RENTANG TAHUN 1979-2015)

Tengku Rika Valentina

Setting politik lokal dalam masyarakat nagari diwarnai dengan problematika eksistensi lembaga dan kearifan lokal yang tadinya pernah terkenal sebelum perlakuan dan penyeragaman atas undang-undang desa pada tahun 1975 (UU No 5 tahun 1979 tentang Desa sampai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa), ada suatu ironi yang terlihat, ketika rantai birokrasi moderen yang dibentuk oleh negara (baca: pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) yaitu menciptakan lembaga-lembaga nagari yang tugas dan fungsinya seperti miniatur 'negara kecil', yang terjadi proses desentralisasi dan demokratisasi lokal di Sumatera Barat berlangsung penuh dengan polemik, selain itu campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya merusak peranan lembaga-lembaga nagari, termasuk merusak hubungan antara pemimpin lokal dan warga masyarakat. Menarik dan sekaligus menjadi permasalahan yang berkelanjutan sampai pada saat sekarang ini, ketika nagari sebagai basis kehidupan masyarakat akar rumput (grass-roots) mempunyai dua wilayah yang berbeda yaitu: (i) wilayah internal nagari yaitu relasi hubungan antara pemerintah nagari dengan lembaga-lembaga nagari serta masyarakat; (ii) adalah wilayah eksternal nagari, yaitu wilayah hubungan antara nagari dengan pemerintah supra nagari (baca: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dalam konteks formasi negara sentralistik), dua wilayah ini pada akhirnya merupakan titik masuk dan menjadi masalah yang krusial bagi negara (baca: pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten), yaitu ketika negara ingin mewujudkan pembaharuan terhadap instansi nagari dan model demokrasi nagari, dan itu harus sejalan dengan reformasi politik maupun pembaharuan pemerintahan (governance reform), tetapi ketika semuanya itu tidak terwujud akhirnya menjadi potensi konflik antara negara dengan nagari. Dengan menggunakan analisis neoinstitusionalisme secara sosiologis dan historis dan dilakukan secara metode postpositive eksploratif, nagari di Sumatera Barat masih menjadi sebuah kajian menarik untuk diangkat kepermukaan ketika dalam perjalanannya begitu kompleks dinamika politik di dalamnya.

Kata kunci: *nagari, lembaga nagari, model demokrasi, neoinstitusionalisme sosiologis dan historis*



KEBIJAKAN PUBLIK, ADMINISTRASI PUBLIK





KEBIJAKAN PUBLIK, ADMINISTRASI PUBLIK

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	M. ZAINUDDIN	DOSEN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ABDURRAB PEKANBARU - RIAU	INHIBISI PROSTITUSI: KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI TELEJU OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
2.	NAVARIN KARIM	DOSEN FISIPOL UNIVERSITAS JAMBI	KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN
3.	MOCHAMMAD FARISI	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS JAMBI	PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI PERATURAN DAERAH
4.	NURYANTI MUSTARI, IHYANI MALIK	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM <i>REDUCE, REUSE, RECYCLE</i> DI KOTA MAKASSAR
5.	MUSTIQOWATI UMMUL FITHRIYYAH	JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA UIN SUSKA RIAU	JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU
6.	JULIANNES CADITH	PRODI ADMINISTRASI NEGARA FISIP UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	KEBIJAKAN PAJAK LIBURAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA
7.	ILHAM ALDELANO AZRE	FISIP UNAND	PRIVATISASI BUMN DAN PERBURUAN RENTE: STUDI PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL
8.	AIDINIL ZETRA, BAKARUDDIN ROSYIDI AHMAD	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	PEMODELAN STATUS GIZI BALITA UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
9.	SYAIFUL WAHAB	FISIP UNAND	KETERLIBATAN MASYARAKAT (<i>PUBLIC ENGAGEMENT</i>) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA
10.	TITI STIAWATI, RINA YULIANTI	ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA BANTEN	REVITALISASI KENADZIRAN KESULTANAN BANTEN DALAM MENGELOLA WISATA RELIGI DI BANTEN LAMA DAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG



INHIBISI PROSTITUSI Kajian Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Teleju Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

M. Zainuddin

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang 'tidak bisa' diselesaikan. Keinginan untuk melarang keberadaan prostitusi bagaikan makan buah si malakama, jika lokalisasi ditutup maka efeknya ia akan muncul di setiap sudut kota. Jika dibiarkan, maka hal ini menyalahi aturan kehidupan beragama, dan pemimpin suatu wilayah akan dianggap melegalkan hal sebenarnya tidak boleh legal keberadaannya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menutup lokalisasi Teleju sebagai salah satu bentuk inhibisi prostitusi di Pekanbaru. Kegiatan penutupan lokalisasi ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pemerintah merealisasikan niat baiknya untuk menyelesaikan penyakit masyarakat. Namun, hal negatif ternyata lebih banyak, diantaranya bermunculan 'lokalisasi mini' yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Pelarangan tersebut menimbulkan efek negatif yang lebih besar sehingga menyebarnya prostitusi di pinggir wilayah Kota Pekanbaru. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan penutupan tersebut dan efek yang ditimbulkannya.

Pemerintah Kota Pekanbaru merasa sudah cukup berhasil memberantas prostitusi dengan hanya menutup satu lokalisasi dengan tidak mempertimbangkan akibatnya yakni lokalisasi-lokalisasi mini yang baru. Kepuasan terhadap kebijakan tersebut terbukti dengan tidak dilakukannya kebijakan serupa kepada lokalisasi-lokalisasi mini sebagaimana di Teleju. Tidak dilakukannya pembahasan dalam rapat-rapat di dinas terkait dan tidak disediakannya anggaran untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Kata kunci: *kebijakan, dampak kebijakan, inhibisi, prostitusi*

KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN

Navarin Karim

Banyak kebijakan pemerintah daerah sepintas terkesan baik, namun secara hakiki tidak memenuhi prinsip kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap rakyat kecil (wong cilik). Akibatnya tidak ada perubahan yang significant terhadap kesejahteraan rakyat.

Ada kebijakan yang menekankan produktivitas petani, namun keberhasilan produktivitas tidak diikuti dengan keterlibatan pemerintah dalam pemasaran lebih lanjut (sustainability). Secara fakta statistik pemerintah daerah mampu menunjukkan data bahwa mereka berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi keberhasilan semu. Bahkan ini dijadikan jualan aksesoris politik untuk memenangkan pemilukada selanjutnya jika ia maju lagi sebagai petahana.

Ada pula Perda Pemerintah Daerah tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan, sepintas menunjukkan petani diperhatikan berkaitan dengan memberikan insentif dan keringanan pajak dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah, dengan tujuan ketahanan pangan daerah lebih terjamin dan mengurangi ketergantungan import. Namun petani tetap saja tidak berkuat tingkat



kesejahteraannya karena jika ada musibah banjir dan kekeringan serta hama, petani tidak mampu menghadapi terpaan ini, karena tidak menyentuh revitalisasi yang sesungguhnya.

Adalagi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan melakukan tindakan coercion dengan tujuang keindahan kota, tapi mengorbankan hak hakiki masyarakat bahkan dapat dikatakan melanggar prinsip equity dan Hak Azazi Manusia bahwa setiap manusia berhak mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulisan ini bertujuan untuk (a) memberikan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah agar lebih berorientasi terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup, (b) memberikan masukan terhadap pemerintah terhadap revitalisasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam menuju kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup.

Kasus kebijakan yang diambil di tiga daerah dalam lingkungan provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi.

Identifikasi masalah diperoleh berdasarkan pengamatan (observasi) langsung di lokasi kejadian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Hasil evaluasi kemudian diajukan rekomendasi untuk revitalisasi kebijakan.

Kata kunci: *kebijakan, pemerintah daerah, evaluasi dan revitalisasi.*

PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI PERATURAN DAERAH

Mochammad Farisi

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropoka dan bahan adiktif lainnya (narkoba) merupakan masalah sosial yang urgen yang harus segera dicarikan solusi karena Indonesia sudah masuk kategori darurat narkoba. Meluasnya penyalagunaan narkoba ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Narkoba juga telah merambah kepemukiman masyarakat yang memicu terciptanya kawasan-kawasan mrawan narkoba, yang akhir-akhir ini marak di kota-kota besar di Indonesia, seperti daerah Pulau Pandan di Jambi, Kampung Ambon di Jakarta dan Kampung Kubur di Medan. Salah satu penyebab lingkungan masyarakat yang rawan narkoba adalah karena mudarnya system pengawasan dan peran serta masyarakat akan pelaksanaan norma dan nilai-nilai luhur yang menjadi indikator ketertiban bersama. Selama ini upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah dilakukan berlandaskan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh BNN dan aparat-aparat lain yang terkait seperti Kepolisian, TNI serta Bea dan Cukai, namun faktanya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap masih terus meningkat setiap tahun. Ini membuktikan bahwa tidak cukup mengandalkan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya P4GN tersebut. Dengan memperhatikan fenomena-fenomena diatas semua komponen bangsa ini harus menyadari dan



mengambil peran untuk ikut serta dan bertanggungjawab dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang tidak biasa dalam mencegah dan memberantas Narkoba. Untuk itu, ditingkat daerah diperlukan payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk melakukan upaya P4GN dengan fokus mengatur peran serta masyarakat dalam hal melakukan antisipasi dini dan usaha pencegahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari Narkoba.

Kata kunci: *peran serta masyarakat, penyalahgunaan, peredaran dan peraturan daerah*

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCE, REUSE, RECYCLE DI KOTA MAKASSAR

Nuryanti Mustari, Ihyani Malik

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yakni penyandang disabilitas kurang diberdayakan dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi dan politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh seperti masyarakat umumnya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan model pemberdayaan penyandang disabilitas Fisik dalam implementasi program Reuse, Reduce dan Recycle (3R) di Kota Makassar. Pengembangan Model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dilakukan melalui (1) pendekatan aksesibilitas non fisik meliputi pemberian pemahaman, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program 3R, dan (2) pendekatan pelatihan keterampilan kerja mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan. Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, seperti triangulasi terhadap data-data implementasi program pemerintah Reuse, Reduce, Recycle (3R). Pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program pemerintah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian pemahaman kepada penyandang disabilitas fisik terkait program 3R dilakukan cukup baik oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Akan tetapi tingkat partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomis masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari segi pendekatan rehabilitasi pelatihan, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pemberdayaan pelatihan kerja belum cukup mampu mendorong penyandang disabilitas ke arah yang lebih berdaya.

Keywords: *pemberdayaan, disabilitas fisik, implementasi kebijakan.*



JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Mustiqowati Ummul Fithriyyah

Jejaring kebijakan menjadi sesuatu yang sangat urgen dilakukan oleh pemerintah daerah pada era demokratis partisipatif ini, demi tercapainya otonomi, efisiensi, politik dan demokrasi. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah untuk menganalisis dan mendefinisikan *stakeholders* sebaik mungkin dan menjelaskan pihak-pihak mana saja yang seharusnya diperlakukan sebagai *stakeholders*. Konsep pemerintahan daerah yang demokratis partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* bukan hanya sekedar menumbuhkan partisipasi *stakeholders* tetapi juga harus menumbuhkan kerjasama di antara *stakeholders* itu sendiri.

Tulisan ini mengkaji tentang jaringan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, karena setiap organisasi publik akan selalu membutuhkan pembangunan jejaring kebijakan atau jaringan *stakeholders*, demikian juga dengan perumusan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Perumusan kebijakan sangat erat kaitannya dengan pembahasan aktor-aktor yang terlibat (*stakeholders*). Dan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kelompok-kelompok mana saja yang benar-benar menjadi *stakeholders*. Selanjutnya memetakan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kelompok politik, asosiasi perusahaan, komunitas-komunitas masyarakat, dll.

Kata Kunci: *jejaring kebijakan, stakeholder, perumusan kebijakan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan*

TAX HOLIDAY A POLICY TO INCREASE INVESTMENT IN INDONESIA

Juliannes Cadith

Foreign investment is an option to fulfil the needs of domestic investment. Tax holiday is one of the incentives provided by the government to attract foreign investors. In this regard, this article would like to explain; 1. The mechanisms and requirements to apply for tax holiday; 2. The effectiveness of tax holiday implementation in Indonesia. The results showed that tax incentive policy is not the main factor considered by foreign investors to invest in Indonesia, and the provision of tax holidays to a particular taxpayer violates the principles of fairness, simplicity and neutrality. The author gives the following suggestions: the need for a clear criteria in the provision of tax holiday, and the need to expand the recipients of tax holiday not only by the category of industry but also by the lack of investment and industrial conditions in a region. Besides that, tax sparing provision rules should also be considered.

Keywords: *holiday tax, fiscal policy*



PRIVATISASI BUMN DAN PERBURUAN RENTE **Studi Privatisasi PT. Krakatau Steel**

Ilham Aldelano Azre

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Privatisasi BUMN di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan perusahaan, efisiensi dan produktifitas perusahaan, mencipkayakan perusahaan yang sehat dan berorientasi global, penunjang stabilitas ekonomi makro, menumbuhkan iklim usaha dan kapasitas pasar. Kebijakan Privatisasi BUMN tidak lepas dari iklim politik yang menjadikan BUMN sebagai sumber pendanaan dan keuangan bagi kelompok penguasa dan partai politik. Privatisasi PT Krakatau Steel dilaksanakan melalui metode Initial Public Offering yaitu penerbitan saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan privatisasi PT Krakatau Steel dan praktek perburuan rente dalam pelaksanaan kebijakan privatisasi tersebut. Teori yang peneliti pakai adalah teori privatisasi dan rent seeking theory. Metode yang peneliti lakukan dalam penelitan ini adalah metode kualitatif dengan paradigma post positivisme. Dalam kebijakan privatisasi PT Krakatau Steel peneliti menemukan kebijakan privatisasi memerlukan campur tangan kekuatan politik dan memakan proses yang sangat panjang yang melibatkan persetujuan DPR, proses politik inilah yang membuka terjadinya praktek perburuan rente yang melibatkan penguasa, partai politik kroni pengusaha dan media. Kebijakan privatisasi BUMN harus mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada publi dimulai dari awal pelaksanaan kebijakan tersebut, penetapan harga saham dan sampai kepada periode pemesanan saham. Privatisasi BUMN dengan metode IPO kedepannya harus membuka ruang partisipasi publik dalam penguasaan saham BUMN sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menguasai saham BUMN.

Kata kunci: *kebijakan BUMN, privatisasi, perburuan rente*

PEMODELAN STATUS GIZI BALITA UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Aidinil Zetra, Bakaruddin Rosyidi Ahmad

Fokus penelitian ini adalah pada penemuan tren model status gizi balita yang sesuai untuk wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Model ini digunakan untuk perumusan kebijakan kesehatan di khususnya peningkatan stus gizi balita di Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik *structural equation modeling* (SEM) dan modifikasinya, karena dianggap paling sesuai untuk mencapai fokus penelitian dan juga sesuai dengan model dan jenis data penelitian. Sebelum itu akan dipelajari keadaan, permasalahan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat 5 tahun terakhir di tiga lokasi penelitian. Luaran penelitian ini ialah ditemukannya tren perubahan model status gizi balita untuk kawasan perkotaan dan pedesaan di Pesisir Selatan teridentifikasi tren atau kecendrungan kebiasaan hidup masyarakat perkotaan dan



pedesaan menurut variabel model, melakukan eksplanasi antara faktor biologi, perilaku dan lingkungan di kalangan masyarakat perkotaan dan pedesaan serta pengaruhnya terhadap prevalensi gizi buruk pada balita di Pesisir Selatan. Luaran lain adalah disusunnya rekomendasi kebijakan berdasarkan dari model status gizi pada balita di Kabupaten Pesisir Selatan, hasil evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan 5 tahun belakangan untuk merumuskan kebijakan baru di bidang kesehatan

Kata kunci: *status gizi balita, kabupaten pesisir selatan, status gizi balita di perkotaan dan pedesaan, modifikasi teknik SEM, metode kuantitatif eksplanatif.*

KETERLIBATAN MASYARAKAT (*PUBLIC ENGAGEMENT*) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Syaiful

Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya pelibatan unsur masyarakat (*society engagement*) dalam semua aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Bukan hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam pengawasan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan semakin bermakna dan berbobot dapat dilihat dari sejauhmana pelibatan masyarakat dalam aktivitas pengawasannya. Sejak diberlakukannya PermenPAN dan RB no. 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas bahwa setiap pegawai negeri sipil (pejabat maupun non-pejabat) wajib menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas (PI), ternyata praktek korupsi di kalangan aparatur pemerintahan masih saja terjadi. Praktek korupsi di beberapa Daerah ternyata tidak juga berkurang, bahkan melibatkan Kepala Daerah dan unsur pimpinan lainnya.

Salah satu penyebab tidak berfungsinya Pakta Integritas dalam mencegah praktek korupsi di kalangan aparatur ditengarai karena tidak berjalannya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pakta tersebut. Forum Pemantau Independen (FPI) yang seharusnya berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam PermenPAN dan RB tersebut ternyata belum berfungsi optimal. Sarana dan mekanisme yang memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan pun juga sangat terbatas. Bahkan Pemerintah Daerah yang sudah mendeklarasikan bahwa Daerahnya adalah Zona Integritas dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) juga tidak luput dari adanya praktek korupsi.

Secara teoritik Ani Matei dan Lucica Matei (2009) menyatakan bahwa untuk membangun sebuah Sistem Integritas Publik (*creating the public integrity system*) diperlukan adanya sebuah kerangka kerja (*framework*), bukan hanya *Integrity Leadership*, tetapi juga diperlukan adanya keterlibatan masyarakat (*public engagement*) agar *performance* sistem integritas dapat berjalan optimal. Menurutny salah satu instrument yang harus tersedia agar sistem integritas berjalan optimal adalah diperlukan adanya *reporting breaches* atau pelibatan masyarakat untuk ikut melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah. Bertolak dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya (Propinsi Sumatera Barat), salah satu daerah yang telah mendeklarasikan daerahnya



sebagai Zona Integritas, bahwa ketika penelitian ini dilakukan FPI (Forum Pemantau Independen) yang seharusnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pakta Integritas belum juga terbentuk. *Rule of conduct* yang mengatur tentang bagaimana bentuk dan mekanisme agar masyarakat terlibat dalam memberikan pelaporan pun juga tidak tersedia. Meskipun Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2007 merupakan pelopor penegakan integritas, namun upaya untuk menegakkan pelaksanaan Pakta Integritas di daerah tersebut ternyata masih terkesan kedodoran dan belum sistematis.

Keyword: *public engagement, pengawasan, pakta integritas,*



**DEMOKRASI,
DESENTRALISASI, GOVERNANCE**





DEMOKRASI, DESENTRALISASI, GOVERNANCE

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	ZAENAL HIRAWAN	FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NIAGA UNIVERSITAS SUBANG	REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>
2.	SUSWANTA	DOSEN ILMU PEMERINTAHAN FISIPOL UMY	PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN BERBASIS <i>STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE</i>
3.	APRIWAN, SILSILA ASRI, WIWIK RUKMI	FISIP UNAND	OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM; STUDI OPTIMALISASI POTENSI SUMATERA BARAT DALAM KERJASAMA <i>INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION</i> (IORA)
4.	DR. BUSYRA AZHERI, SH., M.HUM	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS,	KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)
5.	RONI EKHA PUTERA	FISIP UNAND	MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI: SUATU STUDI PENDAHULUAN
6.	HENDRI KOESWARA, SIMSON GINTING	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DANA DESA: APAKAH SOLUSI MENGATASI PERSOALAN KEUANGAN DESA?
7.	DESNA AROMATICA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
8.	HUSNI KAMIL MANIK, DIDI RAHMADI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	RELASI PEMERINTAH DAN PETANI: PENGALAMAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
9.	HASMUN A. SJU'EIB	KOPBATARA	PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA DEPAN: PENDEKATAN SISTEMIK UNTUK MENGGUNAKAN MASYARAKAT



REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Zaenal Hirawan

Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan system budgeting yang lebih respon terhadap kepentingan masyarakat yang dapat memfasilitasi peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Selain itu, reformasi keuangan dapat menciptakan budgeting yang efisien untuk membiayai program pemerintah yang pro rakyat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah khususnya Daerah Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang tidak menekankan pada aspek anggaran berbasis kinerja, standar akuntansi pemerintah, penetapan standard operating procedure sehingga pemerintah Kabupaten Subang mendapat opini disclaimer pada tahun 2016. Hal ini sangat berdasar karena anggaran pemerintah yang dikeluarkan lebih bersifat politis sehingga pembangunan yang direncanakan dalam proses Musrenbang tidak terlaksana dengan baik

Kata kunci: *reformasi, pengelolaan keuangan daerah, good governance*

PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN BERBASIS *STAKEHOLDER COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Suswanta

Salah satu problem pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia adalah belum dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam konteks proses pembuatan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perbatasan. Kebijakan yang dibuat masih berorientasi pada kepentingan negara atau pemerintah. Peran dan kontribusi masyarakat (*civil society*) dan sektor swasta dalam pengelolaan kebijakan wilayah perbatasan masih minim. Kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini ironis, karena merekalah yang terkena dampak kebijakan. Merekalah yang paham dengan masalah utama, penting dan tidak penting terkait dengan perbatasan. Perbatasan seakan hanya dijadikan sebagai tempat bermainnya orang pusat atau orang daerah. Wilayah perbatasan dijadikan sebagai ajang uji coba kebijakan pemerintah pusat (*the exercise of policy*) yang sifatnya egoisme sektoral dan *project oriented*. Perencanaan program pembangunan perbatasan juga kurang efektif dilihat dari ketidakjelasan output dan outcomes program. Hal ini diperparah dengan masih kentalnya mentalitas proyek dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak mendapatkan kemajuan berarti. Regim masyarakat justru semakin lemah dan terpinggirkan akibatnya minimnya sumberdaya (*resources*) dan otoritas..

Territorial boundaries – selanjutnya disebut perbatasan – adalah konsepsi sekaligus elemen empiris dari konstruksi negara-bangsa. Perbatasan menjadi penanda bagi bekerjanya otoritas kedaulatan dan identitas kebangsaan. Wilayah perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan



wilayah negara karena berkaitan dengan penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, keamanan dan keutuhan wilayah. Garis perbatasan dengan tata kelola wilayah perbatasannya memiliki arti dan fungsi strategis untuk menegakkan entitas kedaulatan teritorial sekaligus basis dari identitas kolektif suatu bangsa (Yohanes Sanak, 2011). Wilayah perbatasan memiliki makna yang sangat vital dan sangat strategis baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, budaya (Dahuri dan Nugroho, 2012).

Dengan demikian, pelibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) secara kolaboratif dalam konteks perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi sangat penting. Melalui model stakeholder collaborative governance dapat diidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan, selain pemerintah dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan mulai dari tingkat pusat sampai desa, baik terkait dengan persoalan pertahanan, keamanan, pelayanan publik, maupun infrastruktur. Selain itu akan diperoleh kejelasan peran maupun pola relasi yang setara dan otonom, saling berbagai manfaat dan resiko, serta penggabungan sumber daya dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang (Dwiyanto, 2012). Melalui pengelolaan berbasis stakeholder collaborative governance juga memungkinkan dilakukannya share vision dan mewujudkannya bersama-sama, partisipasi tinggi dari seluruh unsur terkait, adanya jejaring (networking) luas dan kemitraan (partnership) yang kuat serta bersifat sinergis (Fosler, 2002 dan Munro, 2008).

Kata kunci: *collaborative governance, wilayah perbatasan*

OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM KERJASAMA KAWASAN MARITIM Studi Optimalisasi Potensi Sumatera Barat dalam Kerjasama *Indian Ocean Rim Association* (IORA)

Apriwan, Silsila Asri, Wiwik Rukmi

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi potensi-potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat dalam memanfaatkan kerjasama Regional IORA untuk kemajuan pembangunan wilayah pesisir barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ditunjukkanya Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebagai tuan rumah bagi KTM IORA 2015 lalu, telah menstimulasi perhatian pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan forum kerjasama regional ini. Penelitian ini menggunakan konsepsi Sea Power menjelaskan bagaimana suatu negara memaknai maritime sebagai potensi kekuatan. Alfred Tayer Mahan mengidentifikasi elemen-elemen sea power yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan menuju kesejahteraan, perdagangan, dan keamanan. Elemen-elemen sea power tersebut meliputi ; posisi geografis; sumberdaya fisik yang meliputi kekayaan laut dan iklim; kondisi wilayah pantai; jumlah dan karakteristik populasi; dan karakter pemerintah lokal termasuk institusi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan terkait, sedangkan data sekunder didapat dari studi dokumentasi baik dari sumber langsung maupun secara daring. Data



dianalisis sesuai dengan prinsip metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan data yang diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Berdasarkan elemen sea power tersebut dapat digambarkan Sumatera Barat memiliki posisi yang strategis dan kondisi pantai yang cocok untuk kota pelabuhan, karakteristik populasi sebagai pelaut sekaligus pedagang, serta pemerintah lokal yang terus berupaya untuk mengembangkan kota menjadi enterprenurial city. Dalam konteks ini, Sumatera Barat, khususnya wilayah pesisir baratnya memiliki potensi daya saing untuk dikembangkan dalam kerangka kerjasama IORA seperti keamanan, investasi, perdagangan dan bisnis, manajemen resiko bencana, budaya dan pariwisata, manajemen perikanan dan kerjasama dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kata kunci: *maritime, sea power, local, regional cooperation, indian ocean*

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)

Busyra Azheri

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 371 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat urgensi dari Bum Des ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pendirian dan pengembangan BUM Des. Namun demikian masih terdapat persoalan berkaitan dengan bentuk badan hukum BUM Des yang berimplikasi pada sumber permodalannya. Selain itu perlu dipahami bahwa BUM Des merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa atau nagari di Sumatera Barat yang pendirian dan pelaksanaan kegiatannya ditujukan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa/nagari. BUM Des atau BUM Nag dalam aktivitasnya dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Untuk itu perlu suatu konsep kelembagaan BUM Des atau BUM Nag yang sejalan dengan karakteristik Nagari yang ada di Sumatera Barat.

Keywords: *kewenangan pemerintahan desal nagari, badan usaha milik desa*



MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA AWAL BAGI PERSIAPAN KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI Suatu Studi Pendahuluan

Roni Ekha Putera

Kota Padang Merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki ancaman bencana gempa bumi yang tinggi. Secara Geografis Kota Padang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan beresiko Tinggi terhadap bencana gempa bumi yang disebabkan oleh subdiksi mentawai. Perkiraan gempa besar yang akan terjadi didasarkan pada Penelitian yang dilaksanakan oleh para ahli kegempaan dari Nanyang Technology University dan LIPI. Mengingat Kota Padang yang Rawan Gempa Bumi tersebut maka perlu upaya yang sejak awal dilakukan oleh Kota Padang dalam hal ini Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait guna meminimalisir kemungkinan terburuk yang akan terjadi akibat bencana gempa bumi. Upaya Mitigasi bencana menjadi hal yang penting untuk dilakukan, seperti amanat Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan bencana, bahwa upaya mitigasi yang dimaksud adalah berupa (1) Pelaksanaan tata ruang yang aman terhadap bencana, (2) Pengaturan Pembangunan, pengaturan infrastruktur dan tata Bangunan serta (3) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara modern maupun konvensional. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder yang terkait dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) sebagai leading sector, tanpa pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang hal ini, maka akan sukar untuk mengembangkan lingkungan hidup yang aman dari bencana alam.

Ketika mitigasi bencana alam sebelumnya hanya sebatas himbauan dan anjuran pemerintah, sehingga kenyataan ini tidak pernah dilakukan dengan serius. Namun dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 merupakan awal dari era baru dalam mitigasi bencana di Indonesia. Sekarang, mitigasi bencana bukan lagi sekadar anjuran dan himbauan, tapi sudah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan, mengingat satu falsafah dasar dalam mitigasi bencana alam, yaitu laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat maka akan menjadi semakin tinggi, karena akan semakin banyak manusia menempati wilayah-wilayah rawan bencana, yang tadinya tidak atau sedikit dihuni atau dikembangkan. Tujuan yang sangat penting dalam mengurangi dampak bencana alam adalah dengan memasukkan faktor bencana alam dalam perencanaan pembangunan dan perluasan wilayah. Disamping itu, juga melakukan usaha-usaha untuk mengurangi kerawanan bencana bagi wilayah yang terlanjur ada di wilayah rawan bencana tidak terkecuali Kota Padang.

Kata kunci: *mitigasi bencana, gempa bumi, pemerintah kota, dan rawan bencana*



DANA DESA **Apakah Solusi Mengatasi Persoalan Keuangan Desa?**

Hendri Koeswara, Simson Ginting

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan komitmen pemerintahan saat ini untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Tapi, hal tersebut tidak mudah dalam tataran implementasi, regulasi yang mumpuni, kemampuan dan kesiapan pemerintahan desa yang belum maksimal menjadikan Dana Desa sebagai dilemma dalam mengatasi persoalan keuangan desa menuju kemunduran atau kemandirian desa itu sendiri dalam hal keuangan. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian tentang Bagaimana pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015? Bagaimana realisasi pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015? Bagaimana kesiapan regulasi pemerintah daerah dan dokumen perencanaan desa dalam pelaksanaan Dana Desa? Dampak Dana Desa dalam mengatasi persoalan keuangan desa? Dan, apa pertimbangan pemerintah desa dalam penentuan belanja desa dari aspek prioritas penggunaan Dana Desa? Tujuan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dengan pendekatan teori siklus anggaran menurut Mullins adalah sebagai berikut; (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015, (2) Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015, (3) Untuk mengetahui kesiapan regulasi pemerintah daerah dan dokumen perencanaan desa dalam pelaksanaan Dana Desa, (4) Untuk mengetahui dampak Dana Desa dalam mengatasi persoalan keuangan desa, (5) Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penentuan belanja desa dari aspek prioritas penggunaan Dana Desa, dan (6) Untuk mengetahui model terbaik perencanaan keuangan desa dalam pembangunan desa. Hasil yang didapatkan adalah Dana Desa merupakan solusi dalam mengatasi keterbatasan keuangan desa saat ini. Tapi, masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi pemanfaatan Dana Desa hal tersebut salah satunya adalah karena bertentangan kebijakan prioritas penggunaan desa yang terkadang berbeda dengan kebutuhan masyarakat desa. sehingga, masih diperlukan sebuah model perencanaan desa yang efektif dalam optimalisasi pelbagai sumber pendapatan Desa ke depan.

Kata kunci: *dana desa; pemerintahan desa, keuangan desa; APBDesa, perencanaan keuangan desa.*

DESENTRALISASI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Desna Aromatica

Desentralisasi dan akuntabilitas adalah dua hal penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan desentralisasi adalah sebuah era pemerintahan dimana tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi idola baru dalam manajemen pemerintahan di Indonesia. Meskipun kemudian konsep ini mengalami banyak kritikan sebagai konsep barat yang tidak pas penerapannya di Indonesia yang notabene punya karakteristik pemerintahan yang dibangun oleh lingkungan



pemerintahan yang berbeda, tidak menjadikan konsep ini ditinggalkan. Pilihan atas tipe desentralisasi yang berbeda-beda diterapkan pada pemerintahan daerah dengan karakteristik kulturalis dan pluralis yang masih kental, ditambah kekhawatiran bahwa konsep good governance merupakan sebuah konsep barat yang dipaksakan diterapkan menimbulkan perdebatan terus menerus terutama diruang-ruang akademis. Sesuai atau tidak, nyatanya proses adopsi yang dilakukan ditataran pemerintahan daerah tetap berlangsung.

Akuntabilitas adalah salah satu pilar penting dalam konsep Good Governance yang menuntut adanya pertanggungjawaban atas seluruh kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah dalam berdesentralisasi. Dengan tipe desentralisasi yang berbeda di beberapa daerah tentu seharusnya diikuti dengan model atau sistem akuntabilitas yang berbeda pula. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan pertalian desentralisasi dan tipenya dengan akuntabilitas serta bagaimana Pemerintahan daerah mengadopsi model akuntabilitas dari bentuk aslinya hingga menjadi model akuntabilitas versi Indonesia yang harusnya dibenahi agar tercipta pemerintahan daerah yang demokratis yang menumbuhkan public trust.

Keywords: *desentralisasi, good governance, akuntabilitas, public trust*

RELASI PEMERINTAH DAN PETANI Pengalaman Negara Maju Dan Berkembang

Husni Kamil Manik, Didi Rahmadi

Relasi yang terjadi antara pemerintah dan petani selalu berlangsung cukup rumit dan berubah. Peran negara terhadap kaum tani di beberapa negara selalu dipengaruhi oleh dominasi model produksi dan keterkaitannya dengan pasar. Dua faktor tersebut disebut dengan istilah globalizing process yang turut mempengaruhi kebijakan disektor pertanian. Tulisan ini secara kritis mengulas beberapa literatur yang membahas pasang surut hubungan negara dan petani berdasarkan pengalaman negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan penelusuran dokumen. Adapun pembahasan yang diulas dalam tulisan ini adalah peran negara dan kebijakan pertanian, perjalanan kebijakan pertanian di negara maju dan berkembang, serta pengaruh liberalisasi ekonomi di sektor pertanian. Dari penelusuran berbagai sumber didapati bahwa ada ketegangan permanen antara negara dan petani khususnya di banyak negara berkembang, meskipun negara tetap mencoba memecahkan dilema dalam kebijakan pertanian.

Kata kunci: *negara, petani, globalisasi, negara berkembang, negara maju*

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA DEPAN: PENDEKATAN SISTEMIK UNTUK MENGGUNAKAN MASYARAKAT

.....



PEMILU DAN PARLEMEN





PEMILU DAN PARLEMEN

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	DEWI SILVIA ARIANI	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM: STUDI KPU PROVINSI RIAU
2.	AIDINIL ZETRA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	E-DEMOKRASI UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN DI SUMATERA BARAT
3.	IRA NOVITA	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
4.	ANDRI RUSTA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	AKUNTABILITAS POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP PEMILU LEGISLATIF 2014
5.	ETWIN JUANDA	MAHASISWA S2 TATA KELOLA PEMILU, UNIVERSITAS ANDALAS	PEMASALAHAN-PEMASALAHAN PEREKRUTAN PENYELENGGARAN PEMILU (ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM)
6.	ALEXSANDER YANDRA	UNIVERSITAS LANCANG KUNING	DINAMIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU PERIODE 2014-2019 PASCA PENETAPAN MENJADI PASANGAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015
7.	DARWIN TARIGAN	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF UNTUK PEMILU 2019
8.	SADRI CHANIAGO	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH KEPADA KANDIDAT PADA PILKADA PADANG PARIAMAN TAHUN 2010
9.	HASNUL MARLI	MAHASISWA TATA KELOLA PEMILU UNAND	<i>INDEPENDENT INDONESIAN MODEL:</i> KAJIAN MENGENAI MODEL BADAN PENYELENGGARA PEMILU INDONESIA
10.	BAKARUDDIN ROSYIDI AHMAD, AIDINIL ZETRA, CANANG BAGUS PRAHARA UMPU	FISIP UNAND	PEMETAAN PARTISIPASI PEMILIH DAN SIKAP TERHADAP POLITIK UANG (<i>VOTE BUYING</i>) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Studi KPU Provinsi Riau

Dewi Silvia Ariani

Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat dapat terpelihara secara baik apabila diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Untuk tetap terlaksananya pemilihan umum secara baik, langsung, umum, bebas dan rahasia serta berkesinambungan perlu diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Penelitian ini membahas tentang penerapan PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Riau. Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan dan penyediaan Informasi Publik pada KPU Provinsi Riau beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Riau terkait PPID dalam implementasi PKPU nomor 1 tahun 2015 yaitu, Keterbatasan Personil /Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi termasuk pengetahuan dan pengetahuan dalam bidang TI, Kendala penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran.

Kata kunci: *informasi, publik, dokumentasi*

E-DEMOKRASI UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN DPRD DAN KONSTITUEN DI SUMATERA BARAT

Aidinil Zetra

DPRD sebagai anggota perlemen di Daerah mempunyai peranan yang amat strategis dalam menangani paradoks demokrasi. Hubungan interaksi antara anggota DPRD dengan konstituennya penting dilakukan seperti semakin mudah diakses, lebih akuntabel kepada pemilih, lebih transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi politik yang intensif sehingga anggota DPRD mampu menjaring dan memperjuangkan aspirasi, mengetahui berbagai isu maupun permasalahan yang dihadapi konstituennya, menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan berbagai alternatif solusi yang mungkin diajukan. Tanpa komunikasi politik yang efektif antara parlemen daerah dan konstituen maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.



Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile web yang berfungsi memperkuat hubungan interaksi antara anggota DPRD dengan konstituen. Fitur-fitur aplikasi ini didesain sesuai dengan keperluan konstituen dan anggota DPRD. Aplikasi yang dihasilkan oleh penelitian ini dapat dipatenkan dan dijual kepada perusahaan penyedia (provider) aplikasi sehingga bermanfaat secara ekonomi karena memiliki nilai jual yang tinggi sebab dapat berfungsi sebagai media komunikasi alternatif yang efektif antara anggota parlemen dan konstituen di semua level parlemen (DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD), di manapun berada. Metode penelitian ini adalah gabungan antara penelitian ilmu politik dengan pendekatan kualitatif eksploratif dan penelitian teknik informatika dalam pembuatan aplikasi berbasis mobile web. Luaran akhir dari penelitian ini berupa hasil uji coba aplikasi pintar bernama “DPRD App” berbasis mobile web ternyata cukup diminati anggota DPRD untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat secara langsung, di sisi lain masyarakat juga menilai aplikasi ini akan bermanfaat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil-wakil mereka di parlemen.

Kata kunci: *aplikasi mobile web, media sosial, DPRD, konstituen.*

ANALISA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Ira Novita

Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi sebuah harapan baru dan optimisme untuk pemilihan Kepada Daerah. Salah satu kemajuan dari Undang Undang ini adalah poin pengaturan tentang kampanye. Undang-undang ini untuk pertama kalinya mengatur pembiayaan kampanye oleh negara; dan untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye. Pengaturan dana kampanye selain berfungsi untuk mencegah masuknya dana-dana yang terlarang, menjaga independensi para kontestan terhadap pemberi bantuan dana dikemudian hari, memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk setiap kontestan untuk berkompetisi, juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengawasi dana kampanye dan memberikan penilaian untuk memilih atau tidak. Peraturan Komisi Pemilihan (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pilkada yang berfungsi sebagai pelaksana amanah Undang-Undang juga mengisi kekosongan peraturan yang belum terakomodir, serta memberikan petunjuk teknis guna mengatasi kesulitan penerapan peraturan dilapangan. Akan tetapi didalam realisasinya masih ditemui kekosongan-kekosongan aturan di dalam PKPU seperti pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Hasil audit yang hanya diumumkan setelah pelaksanaan pemilihan tidak bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih atau tidak, dan juga jenis audit yang dilaksanakan adalah audit kepatuhan yang tidak bisa menginvestigasi langsung data-data yang dicurigai kebenarannya. Kasus Pilkada Pasaman Barat yang disidangkan DKPP dan memberikan sanksi peringatan kepada anggota KPU, seharusnya tidak terjadi jika proses audit terjadi pada pra, saat dan setelah masa pemilihan. Kajian ini akan melakukan analisa terhadap PKPU dan



memberikan rekomendasi sehingga pengaturan dana kampanye ini mampu merumuskan tata kelola dana kampanye yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Kata kunci: *analisa, PKPU, dana kampanye, transparansi, akuntabilitas*

AKUNTABILITAS POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANG TERHADAP PEMILU LEGISLATIF 2014

Andri Rusta

Akuntabilitas pemilu dapat diukur dari berbagai aspek, baik itu dari aspek penyelenggara, kandidat maupun pemilih. Dari aspek pemilih, salah satunya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap hasil pemilu tersebut dan apakah janji-janji politik yang disampaikan oleh kandidat diimplementasikan dalam bentuk program dan kebijakan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penilaian masyarakat terhadap hasil pemilu 2014, apakah masyarakat menganggap bahwa hasil tersebut telah memuaskan mereka, kemudian juga akan dilihat bagaimana interaksi antara masyarakat pemilih dengan kandidat setelah pemilu 2014. Dengan menggunakan metode kuantitatif survey, penelitian dilakukan di Kota Padang dengan mewawancarai 289 orang responden yang dipilih secara multistage sampling, responden tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang. Hasil menunjukkan bahwa 77% pemilih menganggap bahwa anggota legislatif hasil pemilu 2014 belum menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, kemudian 59% masyarakat menganggap adalah suatu hal yang baik apabila pemilih meminta bantuan keuangan kepada anggota dewan terpilih. Sebanyak 21 % responden memiliki saudara/teman yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan, dan ketika setelah pemilu 51% diantaranya Meminta bantuan pada anggota Dewan dalam bentuk uang/barang/fasilitas tertentu untuk keperluan organisasi. Hal menarik lainnya adalah ternyata 95,16% masyarakat tidak akan memilih kembali anggota dewan yang mereka anggap tidak berprestasi. Walaupun hanya 40% responden yang memantau kinerja anggota dewan terpilih.

Kata kunci: *akuntabilitas politik, pemilu 2014, interaksi pemilih, kota padang.*

PEMASALAHAN-PEMASALAHAN PEREKRUTAN PENYELENGGARAN PEMILU Anggota Komisi Pemilihan Umum

Etwin Juanda

Tumbuh kembang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu sudah melewati masa yang panjang. Pada pemilu 1999 sebagai awal dilaksanakannya pemilu pasca orde baru menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai ujung tombak pelaksana Pemilu. Pada saat itu, demi memfasilitasi semua kepentingan yang ada maka Komisi Pemilihan Umum saat itu berisikan 5 orang wakil pemerintah dan 48 orang wakil partai politik serta pemilu. Dengan komposisi seperti itu ini jelas akan menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum karena begitu banyak kepentingan didalamnya. Terbukti, Komisi Pemilihan Umum periode ini gagal menetapkan hasil pemilu karena terdapat penolakan dari sebagian besar anggotanya.



Penyelenggaraan pemilu 2014 sudah semakin dekat, tepatnya pada bulan April 2014 yakni pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan pada bulan Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk terselenggaranya pemilu ada beberapa komponen yang ikut berpartisipasi. Komponen tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu, Partai Politik sebagai peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu sebagai komponen yang mengawasi jalannya pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai lembaga yang sangat strategis karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi maka lembaga tersebut berwenang untuk merencanakan program dan jadwal, menetapkan peserta pemilu, menerima pendaftaran pemilu sampai dengan menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Karena dengan kewenangan yang melekat tersebut KPU dianggap sebagian orang dapat memenangkan pemilu. KPU ibarat gadis cantik yang mempesona semua orang dan ingin mempersuntingnya. Rekrutmen calon anggota KPU menjadi titik awal sebuah pemilu dan prosesnya mendapat perhatian semua pihak sehingga menjadi hiruk pikuk didalam negeri ini. Dalam ketentuan umum UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Oleh karena itu, KPU adalah lembaga tunggal Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan sangat luas. KPU adalah komisi independen yang dibentuk sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan umum yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, harapan yang sangat tinggi bagi terselenggaranya Pemilu 2014 yang sukses dan berkualitas akan tertuju pada KPU dari tingkat pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota. Harapan ini tidaklah berlebihan karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa KPU memiliki tugas yang sangat sentral terhadap penyelenggaraan pemilu. Kemandirian penyelenggara Pemilu di tingkat daerah dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pernah ditegaskan oleh MK melalui Putusan Nomor perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 diucapkan pada sidang. Keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tidak serta merta menjadikan lembaga ini, lembaga yang begitu dihargai karena berhasil mengantarkan seseorang menjadi Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD maupun anggota DPRD. Partai Politik seakan-akan mencari kambing hitam terhadap keagalannya merebut simpatik pemilih dengan menumpahkan kesalahannya pada KPU yang dianggap tidak profesional sehingga menimbulkan berbagai persoalan terkait pemilu. KPU dijadikan sebagai lembaga yang dipandang sebelah mata tidak hanya karena para petingginya terseret kasus hukum tetapi juga karena KPU dianggap sebagai batu loncatan untuk menggapai sesuatu atau hanya untuk mencari perlindungan. Anggapan sebegini masyarakat tersebut cukup beralasan karena beberapa mantan anggota KPU nya dipercaya menempati posisi strategis. Pertama, Hamid Awaludin dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM (20 Oktober 2004 – 9 Mei 2007) oleh Presiden SBY pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kedua Anas Urbaningrum hijrah ke Partai Politik dan saat ini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dan yang ketiga Andi Nurpati juga pindah ke Partai Demokrat. Untuk kepindahan Andi Nurpati pada Partai Demokrat menjadi catatan buruk bagi masyarakat maupun parpol lain yang merasa dihianati karena mengulang kesalahan kedua kali setelah bergabungnya Anas Urbaningrum pada Partai Demokrat. Dewan Kehormatan (DK) KPU yang dipimpin Jimly Asshiddiqi membacakan keputusan setelah sehari sebelumnya menggelar sidang pendahuluan. Dalam putusannya, DK merekomendasikan agar KPU



memberhentikan Andi karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran terkait kasus Pemilukada Toli-Toli dan kasus kepengurusan Partai Demokrat. DK merekomendasikan Andi Nurpati untuk diberhentikan oleh KPU. Kewajiban tersebut wajib dilakukan oleh KPU paling lambat tiga hari setelah penetapan dibacakan. Karena pengalaman tersebut, masyarakat menganggap bahwa partai politik sengaja menempatkan orang-orangnya untuk di KPU, atau partai politik menganggap bahwa keindependenan KPU sudah tidak lagi independen meskipun didalam pasal 11 huruf i UU 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan : “tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Tetapi tidak dapat memberikan jaminan bahwa bahwa KPU betul-betul independen. Masa bakti Anggota KPU Periode 2007 – 2012 yang akan habis masabaktinya dijadikan momentum oleh anggota DPR untuk merubah UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengalaman masuknya dua anggota KPU pada partai politik menjadi dasar bahwa masa 5 (lima) tahun dapat memberikan jaminan bahwa anggota KPU bersifat independen. Karena tidak ada jaminan, maka pada perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai persyaratan menjadi anggota KPU cukup mengundurkan diri dari keanggotaan parpol pada saat mendaftar. Disamping itu pula partai politik memberi pagar yang sangat rapat agar KPU periode berikutnya (2012-2017) sulit untuk keluar ditengah jalan dari keanggotaan KPU. Diantara upaya yang dilakukan antara lain, anggota KPU yang mengundurkan diri maka wajib mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima, untuk menjaga keindependenan KPU dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi). Karena itu, pasal 11 huruf i UU No 22 Tahun 2007 harus diubah tidak perlulagi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka 5 (lima) tahun. Perdebatan pemaknaan “mandiri” muncul dalam penyusunan UU 15/2011 sebagai pengganti UU 22/2007. Perdebatan tersebut mengemuka dalam perumusan syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i. Perdebatan mengemuka apakah ketentuan syarat “tidak menjadi anggota partai politik Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik” akan dihapuskan dan diganti dengan frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik”.

Sementara Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima ganjil atau dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus dibaca “ undang – undang sudah mempromosikan Komisi Pemilihan Umum sebagai sebuah lembaga idela baik dari sisi landasan hukumnya maupun fungsinya. Namun, dengan masih banyaknya pihak yang menyatakan bahwa pemilu yang sudah dilaksanakan masih jauh dari sesuatu yang ideal maka perlu dicermati, pastilah ada yang sala dengan semua yang sudah diatur dan dibentuk. Banyak sisi yang bisa dilihat, banyak sudut yang bisa dicermari. Apabila kita berada didalam struktur, maka terdapat beberapa hal yang bisa dicermati dan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kata kunci: *konsep perekrutan penyelenggara pemilu*



DINAMIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU PERIODE 2014-2019 PASCA PENETAPAN MENJADI PASANGAN KEPALA DAERAH PADA PILKADA 2015

Alexsander Yandra

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) enam anggota DPRD Riau periode 2014-2016 melalui mekanisme yang panjang dan menimbulkan berbagai polemik baik ditingkat elit maupun pada masyarakat. Mulai dari tahap pengusulan pemberhentian oleh dewan perwakilan daerah (DPD) Provinsi partai politik, persetujuan dalam rapat DPRD, verifikasi KPUD Provinsi Riau, surat pengusulan yang kemudian diteruskan ke Mendagri untuk dikeluarkan peresmian PAW. Keterlambatan surat keputusan Mendagri terkait penetapan pengganti PAW dari keenam anggota DPRD Riau yang ikut pilkada 2015 berimplikasi terhadap kekosongan perwakilan di daerah pemilihan enam anggota dewan yang mengundurkan diri tersebut. Hal ini secara administrasi sangat berpengaruh terhadap DPRD Riau dalam pengambilan keputusan dan bagi masyarakat daerah pemilihan juga berdampak terhadap berkurangnya perwakilan mereka di pemerintah. Penelitian ini menggunakan konsep penggantian antar waktu (PAW) dan teori lembaga perwakilan politik. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme proses PAW enam anggota DPRD Riau periode 2014-2019 pasca ditetapkannya menjadi calon kepala daerah pada pilkada desember 2015 terjadi dinamika ditingkat DPRD dan Partai Politik Pengusung serta memakan waktu yang cukup panjang. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kekosongan dalam lembaga perwakilan (DPRD) Provinsi Riau yang mana secara administrasi tidak lengkapnya anggota DPRD dalam pengambilan keputusan sehingga tertundanya dalam penetapan APBD Riau tahun 2016.

Kata kunci: *pergantian antar waktu, perwakilan politik*

DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF UNTUK PEMILU 2019

Darwin Tarigan

Pemilu merupakan ‘instrumen politik yang dapat dibentuk yang paling spesifik’, artinya ia dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk dipilih dalam pemilu, maka para politisi harus menjadi anggota partai politik, karena partai politik merupakan peserta pemilu legislatif. Dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, yaitu: sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem pemilu di luar mainstream. Pada pemilu 2009 dan 2014 sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD ialah melalui sistem proporsional suara terbanyak. Tetapi, dalam pelaksanaan 2 (dua) pemilu tersebut, harapan yang diinginkan untuk menciptakan anggota legislatif yang bersih, transparan dan akuntabel tidak juga kunjung tiba. Bahkan, banyak kelemahan-kelemahan yang muncul dari sistem proporsional



terbuka murni ini, dan pada akhirnya, membawa pemilu kita menjadi sistem sangat pragmatik dan transaksional bahkan liberal. Menurut Pramono Anung Wibowo (2013, 268-275), terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh legislator, dan ternyata bermuara dari adanya perubahan dari sistem pemilu, terutama pada saat kampanye pemilu 2009. Hambatan sekaligus tantangan, berawal dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Begitupun perilaku memilih masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya rasional dan sangat transaksional dalam menentukan pilihan. Sehingga, penerapan sistem proporsional suara terbanyak belum tepat untuk digunakan pada pemilu legislatif di Indonesia saat ini. Maka, pada pemilu 2019 ada baiknya kita kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Kata kunci : *sistem pemilihan umum, proporsional terbuka suara terbanyak, proporsional tertutup;*

DUKUNGAN POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH KEPADA KANDIDAT PADA PILKADA PADANG PARIAMAN TAHUN 2010

Sadri Chaniago

Makalah ini mengelaborasi dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah terhadap kandidat pada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, yang difokuskan kepada identifikasi terhadap proses dan penyebab dukungan politik Zubir Tuanku Kuniang terhadap pasangan calon Yobana Samial – Dasril (YOBANA – RIL) pada Pilkada Bupati / Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010. Artikel dihasilkan melalui penelitian dengan metode kualitatif berbentuk penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Informan yang terpilih melalui teknik penarikan sampel bola salju (snow ball sampling). Data sekunder diperoleh melalui kajian perpustakaan (library research). Analisis menggunakan konsep dukungan politik tuanku tarekat Syathariyah dalam pemilu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tuanku senior (memiliki kharisma, dan memiliki banyak murid dan jamaah) masih menjadi “magnet” yang didekati calon dalam pilkada, karena dianggap masih memiliki otoritas dan pengaruh yang cukup kuat terhadap jemaah tarekat Syathariyah dari aspek ajaran tarekat maupun aspek kehidupan politik. Fakta kajian juga menunjukkan kecenderungan terbelahnya dukungan politik para tuanku tarekat Syathariyah pada Pilkada Padang Pariaman tahun 2010. Adapun penyebab dukungan Politik Zubir Tuanku Kuniang terhadap Pasangan Calon YOBANA – RIL adalah: kekecewaan terhadap calon petahana, Visi dan Misi YOBANA – RIL, serta Hubungan Emosional yang sudah terjalin dengan YOBANA-RIL.

Kata kunci: *tuanku, tarekat syathariyah, pilkada.*



INDEPENDENT INDONESIAN MODEL **Kajian Mengenai Model Badan Penyelenggara Pemilu Indonesia**

Hasnul Marli

Pemilu merupakan salah satu instrumen dalam demokrasi dan badan penyelenggara pemilu yang profesional merupakan aspek utama yang menentukan apakah suatu pemilu telah dilaksanakan sesuai standar pemilu yang demokratis. Sejarah kepemiluan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah badan penyelenggara pemilu Indonesia. Rekam jejak badan penyelenggara pemilu dimasa orde baru memberikan kesan yang negatif bahwa penyelenggara pemilu hanyalah merupakan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya melalui pemilu yang penuh dengan rekayasa dan intimidasi. Secara umum terdapat tiga model badan penyelenggara pemilu yaitu governmental model, independent model dan mixed model. Dihubungkan dengan teori tersebut, badan penyelenggara pemilu Indonesia disebut sebagai independent model. Namun jika diteliti lebih jauh lagi, ternyata badan penyelenggara pemilu Indonesia memiliki bentuk organisasi yang unik. Sesuai cita-cita konstitusi, badan penyelenggara pemilu indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri/independen. Namun, terdapat dua badan sebagai satu kesatuan fungsi pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Fungsi birokrasi pemilu yang dijalankan oleh sekretariat KPU juga memberikan warna dalam independensi badan penyelenggara pemilu Indonesia. Hasil analisa dari makalah ini menyimpulkan bahwa model penyelenggara pemilu Indonesia tidaklah sepenuhnya independen sesuai teori independent model. Perkembangan pemilu pada era reformasi membuat badan penyelenggara pemilu indonesia bertransformasi menjadi model independen ala Indonesia yang dapat disebut sebagai Independent Indonesian Model. Bagi negara maju, model seperti ini sangat rumit dan kompleks. Namun, sebagai negara demokrasi baru model ini cocok bagi Indonesia untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis dan profesional sesuai standar internasional.

Kata kunci : *pemilu, badan penyelenggara pemilu, electoral management bodies, independent model*

PEMETAAN PARTISIPASI PEMILIH DAN SIKAP TERHADAP POLITIK UANG (VOTE BUYING) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bakaruddin Rosyidi Ahmad, Aidinil Zetra, Canang Bagus Prahara Umpu

Tulisan ini berkenaan dengan pemetaan partisipasi pemilih dan sikap masyarakat terhadap politik uang (*vote buying*) dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa partisipasi pemilih, sekurang-kurangnya yang terekam dalam tiga Pileg di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 2004, 2009, dan 2014 memperlihatkan fluktuasi seperti 63,53% pada 2004 dan naik menjadi 74,29% pada 2009, tetapi menurun menjadi 73,71% pada 2014. Namun persoalannya ternyata partisipasi memilih sebagaimana banyak diungkap oleh media massa lebih-lebih media sosial, telah diwarnai oleh politik uang. Banyak caleg mendulang suara melalui cara-cara transaksi politik uang dengan beragam jenisnya seperti pembagian bahan makanan, mie instant, bahan pakaian, uang



tunai, alat-alat olah raga, bantuan transportasi dan konsumsi ketika mengikuti kampanye, dan lain sebagainya. Dengan demikian, politik uang (*money politics*) atau dalam khazanah kajian perilaku memilih disebut *vote buying* telah menjadi fakta yang tak terbantahkan.

Tujuan tulisan ini adalah pertama, untuk memetakan partisipasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pileg 2014 berdasarkan latar sosio-ekonomi mereka. Kedua, untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis politik uang yang terjadi Kabupaten Pesisir selatan. Ketiga, untuk menggambarkan sikap masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap politik uang Keempat, untuk menjelaskan pengaruh sikap masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mengenai politik uang terhadap partisipasi memilih.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan paduan desain kuantitatif dengan metode survei dan metode kualitatif, dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, tingkat partisipasi memilih pada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada Pileg 2014 tergolong tinggi yakni 97% atau 388 orang dari 400 responden yang menjawab kuesioner. Partisipasi memilih ini tersebar secara merata menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kategori pemilih, negeri asal, suku bangsa, dan agama. *Kedua*, jenis-jenis politik uang yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah persentasenya adalah bahan makanan (45,8%), uang tunai (15,0%), bahan pakaian (12,5%), transportasi dan konsumsi ketika mengikuti kampanye (9,88%), alat-alat pertanian (4,8%), traktir makan warga (4,0%), ikan (3,3%), sunatan masal (2,8%), alat-alat olah raga (1,8%), dan pengobatan gratis (0,5%). *Ketiga*, lebih dari setengah responden yaitu 69,6% bersikap setuju dan menerima politik uang. Namun terdapat perbedaan sikap masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terhadap politik uang yang terbagi menjadi tiga kategori; pertama menerima uangnya tapi soal pilihan adalah urusan nanti; kedua menerima uangnya dan akan memilih orangnya; dan ketiga terima uangnya tetapi tidak memilih orangnya. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena telah merusak sendi-sendi demokrasi. *Keempat*, sikap masyarakat tentang politik uang pada kenyataannya memang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci: *Pemilu Legislatif, Partisipasi pemilih, Politik uang (vote buying),*



**PERUBAHAN SOSIAL, GERAKAN
SOSIAL, MULTIKULTURALISME,
KONFLIK, TERORISME,
PENEGAKAN HUKUM**





PERUBAHAN SOSIAL, GERAKAN SOSIAL, MULTIKULTURALISME, KONFLIK, TERORISME, PENEGAKAN HUKUM

NO.	NAMA PEMAKALAH	INSTITUSI	JUDUL MAKALAH
1.	AULIA ROSA NASUTION	FAKULTAS HUKUM DI UNIVERSITAS MEDAN AREA, MEDAN	KEJAHATAN TERORISME DAN RADIKALISME DI ABAD KE 21: UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA
2.	ZULFADLI	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	ILMU SOSIAL PROFETIK INTEGRASI ILMU DAN AGAMA MENUJU HUMANISASI, LIBERASI DAN TRANSEDENSI
3.	PUTRI GEMALA SARI	POLITEKNIK NEGERI PADANG	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN <i>SOFTWARE</i> DI KOTA CILEGON
4.	VIRTUOUS SETYAKA	FISIP UNIVERSITAS ANDALAS	POLITIK DAN KONFLIK GERAKAN SOSIAL OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998
5.	ANGGRAENI PRIMAWATI	PRODI SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL
6.	DEDET DEPERIKY, HELMI, RIKA AMPUH HADIGUNA, MUHAMMAD MAKKY	MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS	MODEL INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT HORTICULTURE COMMODITY FOR SMALL FARMING SYSTEM BY USING POST-HARVEST TECHNOLOGY



KEJAHATAN TERORISME DAN RADIKALISME DI ABAD KE 21 Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia

Aulia Rosa Nasution

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena terorisme dan radikalisme di abad ke -21 serta upaya pencegahan dan penanggulangannya khususnya ditinjau dari aspek hukum. Terorisme telah menjadi trending topic dan isu yang mengglobal pasca terjadinya serangan teror bom di gedung WTC, New York, pada tanggal 11 September 2001. Munculnya berbagai aksi terorisme di berbagai daerah di Indonesia sejak terjadinya ledakan teror bom di Legian- Kuta , Bali (2002) hingga ledakan bom Thamrin, Jakarta (2016) telah menunjukkan bahwa tindakan terorisme bukanlah kejahatan biasa (Ordinary crime) akan tetapi merupakan kejahatan yang luar biasa (Extraordinary crime) yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (Hostis Humanis Generis). Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi ketahanan nasional bangsa dari ancaman terorisme yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang – Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum di dalam mengadili dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia. Namun upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme sepatutnya tidak hanya dilakukan dalam aspek hukum, akan tetapi melibatkan berbagai aspek dan unsur lainnya secara komprehensif serta melibatkan peran serta masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap terorisme dapat berjalan dengan optimal.

Kata kunci: *extraordinary crime, kejahatan, ketahanan nasional , terorisme, radikalisme*

ILMU SOSIAL PROFETIK INTEGRASI ILMU DAN AGAMA MENUJU HUMANISASI, LIBERASI DAN TRANSEDENSI

Zulfadli

Tulisan ini ingin mengulas tentang ilmu sosial profetik sebagai alternatif di tengah dinamika perkembangan ilmu-ilmu sosial dewasa ini. Ilmu sosial sosial belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi dalam mentransformasikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Yaitu memanusiation manusia, membebaskan manusia, dan termasuk juga mengenali Tuhan-Nya. Krisis yang dialami ilmu sosial tersebut, dikenal juga dengan istilah “mandate akademis” ilmu sosial. Untuk itu, upaya penyempurnaan bahkan pencarian jalan alternatif adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Sebagian pemikiran ilmu sosial, melakukan terobosan-teorobosan baru dengan menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif. Ilmu sosial profetik mempunyai misi dalam pengembangan ilmu-ilmu dengan mengintegrasikan ilmu dan agama sehingga melahirkan transformasi ilmu sosial yang bersifat humanisasi, liberasi dan transedensi. Tulisan ini ingin menjawab bagaimana perspektif ilmu sosial profetik menjadi salah satu alternatif dalam ilmu ilmu sosial dewasa ini.

Kata kunci: *ilmu sosial, profetik, integrasi*



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SOFTWARE DI KOTA CILEGON

Putri Gemala Sari

Software adalah salah satu unsur yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan produsen software untuk melindungi properti intelektual hasil inovasi mereka dari pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan software di Indonesia dan mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap software di Indonesia. Manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis kepada pihak-pihak terkait khususnya lembaga penegak hukum serta instansi pemerintah, swasta dan masyarakat mengenai regulasi copyright software serta implikasinya di Indonesia. Penulis menggunakan beberapa landasan teori dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Padang dan Populasi penelitian adalah pihak yang menggunakan software komputer seperti pengguna komputer pribadi, pegawai pemerintah dan perusahaan swasta, pemilik warnet serta pegawai toko penjualan komputer. Data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dengan melakukan metode wawancara/ interview dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data kemudian dijelaskan secara deskriptif dan diambil kesimpulan secara relevan. Hasil Penelitian yang dilakukan menyimpulkan; Pertama, Pengaturan hukum terhadap software di Indonesia yang diwujudkan dalam UUHC No 19 Tahun 2002 belum diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku. Kedua, Tindakan yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap software di Indonesia adalah berupa tindakan hukum oleh aparat kepolisian seperti meningkatkan operasi penindakan terhadap produksi dan peredaran software bajakan dengan menentukan target operasi secara bertahap serta melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap setiap hasil penindakan kasus pembajakan software. Alternatif dalam mengurangi pembajakan software dilakukan pemerintah melalui DEPKOMINFO dengan program Indonesia Go Open Source (IGOS) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap software import.

Keywords: *software, hak kekayaan intelektual, penegakan hukum*

POLITIK DAN KONFLIK GERAKAN SOSIAL OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Virtuous Setyaka

Makalah ini akan mendiskusikan tentang dua hal yang penulis asumsikan penting terkait dengan gerakan sosial di Indonesia, yaitu tentang Politik Gerakan Sosial di Indonesia dan Konflik Gerakan Sosial di Indonesia. Gerakan sosial sendiri sesungguhnya sebuah politik atau aktivitas politik yang



dilakukan oleh aktor-aktor non-politisi khususnya non-elit politik. Dengan kalimat lain, gerakan sosial adalah aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan terorganisir atau Organisasi Masyarakat Sipil. Dinamika sosial-politik dalam struktur yang diselenggarakan dengan sistem, menjadi lebih demokratis ketika adanya pengakuan bahkan legitimasi terhadap keberadaan OMS yang melakukan aktivitas politiknya melalui gerakan sosial. Sungguhpun ketika dinamika sosial-politik tersebut berjalan dengan karakter non-demokratis atau otoritarian/totalitarian, maka gerakan sosial oleh OMS justru semakin relevan sebagai oposisi yang langsung berasal dan mungkin sekali merepresentasikan masyarakat sipil secara keseluruhan. Namun demikian, tidak berarti bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh OMS selalu berhadapan langsung dengan organisasi pemerintahan atau lembaga negara dan turunannya. Sangat mungkin politik dan konflik terjadi diantara OMS yang melakukan gerakan sosial. Oleh sebab itu, menarik untuk mendiskusikan politik dan konflik gerakan sosial oleh OMS di Indonesia terutama pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah (1) apakah demokratisasi sebagai bagian dari reformasi 1998 semakin menyatukan atau justru memecah gerakan sosial yang dilakukan oleh OMS di Indonesia? (2) Bagaimana gambaran politik gerakan sosial yang dilakukan oleh OMS di Indonesia pasca reformasi 1998? (3) Bagaimana gambaran konflik gerakan sosial yang dilakukan oleh OMS di Indonesia pasca reformasi 1998? Dengan analisis pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan metode historis, maka diharapkan ditemukan deskripsi tentang politik dan konflik gerakan sosial yang dilakukan oleh OMS di Indonesia pasca reformasi 1998.

Kata kunci: *politik, konflik, gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil, reformasi*

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL

Anggraeni Primawati

Gelombang demokrasi bukan hanya membawa nilai-nilai positif dalam pengertian penghormatan terhadap hak azasi manusia (HAM) dan eksistensi kelompok masyarakat, tetapi juga mengandung bahaya perpecahan suatu negara. Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilization* meramalkan akan terjadinya benturan antar peradaban. Benturan itu disinyalir akibat beberapa faktor: politik, sosial, budaya, ekonomi, ras bahkan agama. Melihat fenomena tersebut, pendidikan di Indonesia haruslah peka menghadapi arus perputaran globalisasi. Pengalaman pahit selama Orde Baru tidak perlu berulang lagi. Pola pemaksaan kehendak dari Pemerintah untuk membentuk satu kehidupan berbangsa yang seragam melalui aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan perlu ditinjau ulang dan dipertanyakan. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu. Perlu disadari bahwa proses pendidikan adalah proses pembudayaan dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsur budaya nasional.



Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau prejudice untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya (the pride in one's home nation). Pendidikan yang lebih mampu menjawab problematika pendidikan adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat martabat manusia di manapun dia berada dan dari manapun datangnya (secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, agama dan negara). Pelaksanaan pendidikan multikultural secara inheren merupakan dambaan semua orang. Hal ini didasarkan pada sebuah keyakinan atas konsep pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia sesuai dengan kemanusiaannya. Manusia yang menyadari kemanusiaannya akan membutuhkan dan menghendaki model pendidikan multikultural. Paradigma yang dibangun juga sesuai dengan humanitas tanpa menafikan dan mengeksploitasi diri sendiri, sesama manusia, alam semesta, dan bahkan Allah. Paradigma ini dapat membimbing masyarakat untuk keluar dari problematika proses dan hasil pendidikan.

Kata kunci: *pendidikan multikultural dan pembelajaran multikultural*

MODEL INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT HORTICULTURE COMMODITY FOR SMALL FARMING SYSTEM BY USING POST-HARVEST TECHNOLOGY

Dedet Deperiky, Helmi, Rika Ampuh Hadiguna, Muhammad Makky

This research was conducted in August 2015 - June 2016. Aims to (1) describe the application of the commodity supply chain horticultural on small farming, (2) analyze the performance of the commodity supply chain horticultural on small farming, and (3) analyze the horticultural supply chain model for small farming. The population is all small farmers (44 farmers), Anak Randai (3 person), Wholesalers (5 Person), Middelman (5) and Exporter (3). This research use purposive sampling methods. Samples take are as much as 50% of the population are 22 farmers, anak randai (3 person), Wholesalers (3) Traders Intermediary (3) and Exporter (3).

The results showed the application of the supply chain has not been done by farmers due to several factors, among others: (1) Linkage subsystem farming (aquaculture) with industry and low marketing (2) The cost of logistics / supply chain of agricultural high (above 15% of the cost total), the condition is caused by agricultural logistics infrastructure from production centers to consumer centers are not in good shape as well as incomplete, (3) lack of support for agricultural financing from banks and non-banks. This condition occurs because financial institutions do not understand agriculture or agribusiness risk management (4) Not effective institutional governance of the start level agribusiness producers, supply chain (supply chain), regional (cluster) to the macro (policy) .and (5) government yet assertive in making good pricing model of the government purchase price, penetapan producer



price and consumer price fixing. Supply chain performance in horticulture on small farming is farmers – anak randai (small traders) -whoseller - large-trader and exporter in three streams run in the supply chain of horticultural commodities in small agricultural and the flow of goods, money flow and flow information and supply chain performance horticulture on small farming that supply chain performance reliability to obtain the value that is 20.35 supply chain responsiveness is 4.5 days, the value of supply chain agility do not tally due to absence of demand additional amount of 20% of the chain actors supply and for the value of supply chain cost is 1.52 and Results Key Performance Indicator Critical calculation, s of supply Chain cost to metric level 3 in occurred at the farm level is 0.563

Advice given is the development of the supply chain system of small farms consisting of institutional governance of agribusiness, agro-industry oriented logistics services and logistics players, increasing the capacity of financial institutions (banking and non the banking), the development of food safety management system in the form of e-purchasing agriculture supply chain ranging from producers to the final consumer, to establish a partnership and cooperation among the parties supply chain and the ability of the government in setting the HPP, the determination of producer prices and consumer price fixing and applying post-harvest technology to increase the value and quality to withstand the storage and delivery

Key word: *sructure, small farming. supply chain reliability, responsiveness agility, cost critical key performance indicator,s, HPP*

DENAH TEMPAT SEMINAR

